



**UNIVERSITAS INDONESIA**



**PEMIKIRAN HASYIM MUZADI DALAM ICIS  
(INTERNATIONAL CONFERENCE OF ISLAMIC SCHOLARS)**

**SKRIPSI**

**HAFID FUAD  
070507036X**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI ARAB  
DEPOK  
JULI 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PEMIKIRAN HASYIM MUZADI DALAM ICIS  
(INTERNATIONAL CONFERENCE OF ISLAMIC SCHOLARS)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora

**HAFID FUAD  
070507036X**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI ARAB  
DEPOK  
JULI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Hafid Fuad**

**NPM : 070507036X**

**Tanda Tangan : .....**

**Tanggal : .....**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

**Depok, 10 Juli 2010**

**Hafid Fuad**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Hafid Fuad

NPM : 070507036X

Program Studi : Arab

Judul Skripsi : Pemikiran Hasyim Muzadi dalam ICIS  
(International Conference of Islamic Scholars)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Arab, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Drs. Juhdi Syarif, M. Hum (.....)

Penguji : Dr. Apipudin (.....)

Penguji : Suranta, M. Hum (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Juli 2010

Oleh  
Dekan  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia

(Dr. Bambang Wibawarta)

NIP: 131.882.265

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang terucap selain mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan dalam kehidupan yang fana ini. Sungguh saya meyakini bahwa hidup di dunia ini hanya untuk membangun kehidupan di akhirat kelak. Tiada harapan selain menjadi insan yang selalu berikhtiar di jalan Islam. Kemudian shalawat dan salam penulis haturkan untuk Rasulullah SAW, penutup para nabi dan penyempurna ajaran Islam. Betapa kami merindukan kehadiranmu ya kekasih Allah.

Penulisan skripsi ini secara formal dilakukan untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Humaniora pada FIB UI, namun selain itu juga untuk memenuhi dahaga intelektual penulis akan ilmu dan pengetahuan. Ilmu akan agama Islam, agama orang tua penulis, dan agama para Nabi Allah. Dalam masa pengerjaan skripsi yang tertunda-tunda ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menyukseskan penyelesaian skripsi ini. Terima kasih saya haturkan kepada ;

1. Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, selaku Rektor Universitas Indonesia.
2. Dr. Bambang Wibawarta, selaku Dekan FIB UI yang telah memberikan waktu bagi penulis untuk merampungkan perkuliahan ini.
3. Dr. Afdol Tharik Wastono, M.Hum, selaku Koordinator Prodi Arab yang telah sangat membantu para mahasiswanya.
4. Drs. Juhdi Syarief, M.Hum, selaku pembimbing skripsi ini yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tanggung jawab yang tertunda ini.
5. Siti Rohmah Soekarba, M.Hum, selaku pembimbing akademis penulis selama berkuliah, yang telah memberikan banyak kemudahan dan masukan kepada penulis selama berkuliah.
6. Seluruh dosen Program Studi Arab FIB UI. Saya memohon maaf untuk segala khilaf atau silap kata. Serta berterima kasih yang setulusnya dan hanya Allah SWT yang dapat membalas segala kebaikan kalian.

7. KH. Hasyim Muzadi, sebagai Rais Syuriah PBNU dan Sekjen ICIS, yang telah bersedia meluangkan waktu di rumahnya dengan kesibukan yang mengantri 'Si Mbah Hasyim'.
8. Prof. Dr. Masykuri Abdillah, yang telah bersedia memberikan waktu yang berkualitas kepada penulis untuk berdiskusi di kantor Dewan Pertimbangan Presiden.
9. Dr. N. Hasan Wirajuda, yang telah memberikan waktu khusus kepada penulis untuk melakukan wawancara di tengah kesibukan beliau. Sebuah kesempatan langka dapat berdiskusi dengan mantan Menteri Luar Negeri dua periode ini.
10. (Alm) Rozy Munir, yang pada tahun 2009 telah menerima penulis di Sekretariat ICIS di PBNU, dan memberikan akses kepada penulis untuk mendapatkan informasi. Beliau yang saat itu tengah menjadi Duta Besar RI di Qatar, sangat kooperatif dan terbuka. Semoga amalan beliau diterima di sisi Allah SWT.
11. Ayah, Mama, Kak Monie, dan Bang I'i. Selaku 'tim sukses' pengerjaan skripsi ini. Terima kasih atas 'intervensi' dari kedua orang tua penulis. Tidak semua orang tua mampu memberikan 'intervensi' kepada anaknya. Semoga kita berkumpul lagi di surga Allah yang kekal.
12. Keluarga (lumayan) besar UKM Teater UI, yang telah menampung sejak pertama kali penulis di UI. Walaupun kita bukanlah seniman 'permanen', tapi kita bertemu untuk bersenang-senang secara positif. Penulis haturkan terima kasih untuk kebersamaan dari: Bang Pian, Dancuk, Yesi, Anas, Artur Haris, dan Aulia. Untuk angkatan 5: Agus, **Ety Juwitasari** (terimakasih untuk KTM-nya), Abie, Martha, Kodok, Prima, plus Randu. Semoga hanya maut yang bisa menghentikan denyut kreativitas itu. Kita laksanakan kewajiban kita untuk berbuat yang terbaik, lalu baru kita ambil hak 'untuk bersalah'. Serta, tidak lupa kepada seluruh orang yang telah hadir dan menghilang di rumah Teater UI, berhenti sejenak untuk melepas lelahnya, dan selalu ada tempat untuk kalian.
13. Rekan-rekan angkatan 2005 Program Studi Arab UI. Semoga kita bertemu kembali dalam kemuliaan.

14. HomeSchooling Kak Seto: Jete, Janu, Budi, Cica, Suhe', Afif, dan Aji.
15. Voice of Palestine: Bang Mujtahid, Bang Yusa, dan Bang Musa.
16. Alia Kreasi: Bang Ma'ruf dan Bung Faiz.
17. UIYSEP yang telah memberikan dana hibah wirausaha, insyaallah akan penulis teruskan semangat kemandirian itu.
18. Wishnu Sudarmadji, M.Hum, selaku editor dadakan. Terimakasih Syekh.
19. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan do'a selama penulis mengerjakan skripsi ini. Khususnya para tetangga di kontrakan yang memberikan keberisikan dan sekaligus menghangatkan jiwa.

Akhirnya penulis berharap agar karya tulis ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya agar menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Penulis mempersilahkan jika ada yang tertarik untuk mengembangkan 'isu' baru ini, untuk menghubungi penulis dalam membagi informasi dan pengalaman. Wassalam.

Di sebuah kontrakan di Srengseng Sawah. Jakarta Selatan  
Juli 2010

Hafid Fuad

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafid Fuad  
NPM : 070507036X  
Program Studi : Arab  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Pemikiran Hasyim Muzadi dalam ICIS (International Conference of Islamic Scholars)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 19 Juli 2010

Yang menyatakan

(Hafid Fuad)

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan transliterasi huruf Arab yang disesuaikan dengan Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.158 dan No.0543-6/U/1987. Transliterasi Arab-Latin tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ﺀ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ﺏ	Ba	B	Be
ﺕ	Ta	T	Te
ﺓ	ﺀﺎ	ﺀ	Es (dengan titik di atas)
ﺝ	Jim	J	Je
ﺡ	ﺡﺎ	ﺡ	ha (dengan titik di bawah)
ﻙ	Kha	Kh	ka dan ha
ﺩ	Dal	D	De
ﺫ	ﺫﺎ	ﺫ	zet (dengan titik di atas)
ﺭ	Ra	R	Er
ﺯ	Zai	Z	Zet

Ó	Ain	S	Es
Ô	Syin	Sy	es dan ye
Õ	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
Ö	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
Ø	ṭaṭ	ṭ	te (dengan titik di bawah)
Ù	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
Ú	‘ain	‘	Koma terbalik di atas Ge
Û	gain	G	Ge
Ý	Fa	F	Ef
Þ	Qaf	Q	Qi
ß	Kaf	K	Ka
á	Lam	L	El
ã	Mim	M	Em
ä	Nun	N	En
æ	Wau	W	We
ح	Ha	H	H
Á	Hamzah	-	Apostrof
í	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

Contoh:

İóÑóÓó : darasa

βõÊöËó : kutiba

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Tanda dan Huruf	Nama
ي-----	fathah dan ya	Ai	a & i
و-----	Fathah dan wau	Au	a & u

Contoh:

ÓóæúÝó : saufa

Ëóíúäó : baina

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-----ى	fathah & alif atau ya	Ā	a & garis di atas
-----ى	kasrah & ya	Ī	i & garis di atas
-----و	dammah & ya	Ū	u & garis di atas

Contoh:

ÞóÇáó ÑóÓóæúáó Çááá : qālā rasūlullāhu

#### D. Ta' Marbutoh

Transliterasi untuk *ta' marbutoh* ada tiga, yaitu:

1. *Ta' Marbutoh* hidup

*Ta' marbutoh* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasroh, dan dhommah, transliterasinya adalah /t/

2. *Ta' Marbutoh* mati

*Ta' marbutoh* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

3. Jika pada kata yang terakhir dengan *ta' marbutoh* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutoh* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

اَتَّالِبُالْجَدِيْدَ : aṭ-ṭālibah al-Jadīdah  
aṭ- ṭālibatul Jadīdah

#### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

فَا'اَلَا : fa'āla

فَارْحَا : farraḥa

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *Çá* namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah atau kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

أَطْرَابُ : at-ṭālibu

أَنْوَارٌ : an-nūr

: an-nūr

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَيْتُ : al-baitu

الْيَوْمُ : al-yaumu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

سَامُوْنٌ : samā'un

أَخْزَا : akhza

akhza

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	ii
Halaman Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah.....	viii
Abstrak.....	ix
Pedoman Transliterasi.....	x
Daftar Isi.....	xv.

### **BAB 1. PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Penulisan.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Metode Penulisan.....	9
1.5 Tinjauan Kepustakaan.....	10
1.6 Landasan Teori.....	12
1.7 Sistematika Penulisan.....	14

### **BAB 2. DINAMIKA KEHADIRAN NU**

2.1 Sejarah Berdirinya NU.....	16
2.1.1 Ulama Nusantara dan Penyebaran Islam di Indonesia.....	16
2.1.2 Gerakan Pemikiran Islam dan Pengaruhnya.....	20
2.2 Membaca Nahdlatul Ulama.....	24
2.2.1 Ulama dan Pesantren.....	24
2.2.2 Posisi dan Fungsi NU.....	29

2.2.3 Islam Moderat.....	33
2.3 Tradisi Ahlussunnah Wal Jamaah.....	36
2.3.1 Pengertian dan Kemunculannya.....	36
2.3.2 Tradisi Aswaja NU.....	40

### **BAB 3. SEJARAH BERDIRINYA ICIS**

3.1 Sejarah Berdirinya ICIS.....	46
3.2 Fondasi Pemikiran ICIS .....	54
3.3 Program Kerja ICIS.....	62

### **BAB 4. SOSOK DAN PEMIKIRAN TOKOH TENTANG ICIS**

4.1 Ahmad Hasyim Muzadi.....	72
4.1.1 Biografi Intelektual.....	72
4.1.2 Pemikiran Tentang ICIS.....	74
4.2 Masykuri Abdillah.....	83
4.2.1 Biografi Intelektual.....	83
4.2.2 Pemikiran Tentang ICIS.....	85
4.3 Hassan Wirajuda.....	88
4.3.1 Biografi Intelektual.....	88
4.3.2 Pemikiran Tentang ICIS .....	89

### **BAB 5. PENUTUP.....**

5.1 Kesimpulan.....	94
5.2 Saran.....	96

### **DAFTAR REFERENSI.....**

### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Nama : Hafid Fuad  
Program Studi : Arab  
Judul : Pemikiran Hasyim Muzadi dalam ICIS (International Conference of Islamic Scholars)

Skripsi ini membahas tentang pemikiran Hasyim Muzadi dalam mendirikan dan mengembangkan ICIS, pada tahun 2004, 2006, dan 2008. Hasyim Muzadi yang juga membawa nama NU sebagai ormas Islam terbesar di dunia, melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar* secara global melalui peran ulama. Dalam era globalisasi, segala peristiwa yang terjadi akan saling mempengaruhi ke negara lainnya. Maka yang menjadi perhatian penulis disini ialah untuk menjelaskan apa pemikiran Hasyim Muzadi dalam ICIS, bagaimana sejarah ICIS, serta bagaimana dampak ICIS pada tingkat Nasional dan Internasional. Hal tersebut penulis jelaskan dengan menggunakan pendekatan sejarah pemikiran.

Kata kunci:

Nahdlatul Ulama, ICIS, Islam Rahmatan Lil 'alamin, Ulama.

## ABSTRACT

Name : Hafid Fuad  
Study Program : Arabic  
Title : The Hasyim Muzadi's Thought on ICIS (International Conference of Islamic Scholars)

This study focus to describe about the Hasyim Muzadi's thought who establish and evolving the ICIS, on 2004, 2006, and 2008. Hasyim Muzadi who carried NU as the biggest Islam mass organization in the world, make amar ma'ruf nahi mungkar to a global level through scholars competently. Due to globalization era, all kind of activity on a country would infectious the other one. From that point, the focus of this study is to describe what is Hasyim Muzadi's thought role for ICIS, describe how ICIS's history, and what is the impact on national and international level. All this phenomena would be explained with 'history of thought' approximation method.

Keywords :

Nahdlatul Ulama, ICIS, Islam Rahmatan Lil 'alamin, Scholars.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Islam pada hakikatnya merupakan agama yang universal, nilai universal tersebut tergambar dalam nilai-nilai perdamaian yang mengatur hubungan manusia terhadap sesama manusia, terhadap sang pencipta, serta terhadap lingkungannya. Nabi Muhammad SAW telah menjadi menyempurnakan ajaran Islam dalam Hadits yang bersumber dari tindakan dan ucapan Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman:

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (Rahmatan Lil 'alamin)”. (Q.S al- Anbiya’: 107)<sup>1</sup>

Melalui ayat tersebut, manusia diperintahkan untuk menyebarkan kebaikan kepada seluruh alam semesta, termasuk manusia dan lingkungannya. Hal ini menunjukkan Islam tidak menyukai perbuatan yang merusak, baik itu permusuhan, konflik, atau merusak lingkungan. Manusia, khususnya umat Islam, harus menyadari posisinya sebagai manusia yang beriman. Suatu kekeliruan jika menjadikan dalil agama sebagai pembenaran dalam melakukan pengrusakan, dan manusia harus mampu memilah motif-motif non-agama dalam konflik yang terjadi dewasa ini.

Pada tahun 2001, terjadilah peristiwa dahsyat di Amerika Serikat (AS) yang merusak citra Islam yang mencintai perdamaian. Ketika pada 9 September, Pesawat

---

<sup>1</sup> Bustani A. Gani. *Al- Quran dan Tafsirnya*. Jilid VII. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1991. hal: 337.

Boeing 767 American Airlines menabrak gedung World Trade Center WTC yang ketinggiannya mencapai 417 meter. Tidak lama, pesawat Boeing 757 American Airlines segera menabrak menara selatan gedung WTC lainnya. Hanya berselang satu jam, kedua gedung pencakar langit itu akhirnya runtuh.<sup>2</sup>

Belum selesai warga AS dikejutkan dengan runtuhnya dua gedung itu, setengah jam kemudian, pesawat lain menabrak gedung Departemen Pertahanan AS di Pentagon. Belakangan diketahui pesawat itu merupakan milik American Airlines dengan nomor penerbangan 77 dan menewaskan sedikitnya tujuh orang. Kerusakan negara adidaya itu bertambah. Sekitar setengah jam kemudian, dilaporkan sebuah pesawat United Airlines nomor 93 jatuh di Pittsburg. FBI menduga kuat, pesawat tersebut menasar Gedung Putih atau Gedung Kongres (Capitol).

Walaupun terorisme telah menjadi fenomena sejarah, namun hingga kini masih belum ditemukan formula yang efektif untuk menangkalnya. Gerakan terorisme merupakan dunia tersendiri yang sulit untuk dimengerti oleh akal sehat. Model terorisme mengalami transformasi. Dari model tahun 1960-an dan 1970-an yang ditandai oleh kebutuhan pelaku terror akan publikasi atas kejahatan mereka, hingga kemudian berubah di tahun 1998, ketika tidak ada pihak yang bertanggung jawab dalam peledakan kedutaan AS di Kenya dan Tanzania yang menyebabkan 200 orang tewas.<sup>3</sup>

Kondisi ini dapat berdampak menjadi traumatisasi, yaitu sebuah fenomena yang dikaji oleh F. Budi Hardiman tentang suatu kondisi mengenai dampak pasca

---

<sup>2</sup> Iwan Syamsir Alam Hadibroto dan Eric K. Suryaputra, Eri Widjanarko. *Osama bin Laden Teroris atau Mujahid*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001. hal: 62.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal: 226.

sebuah kejadian yang mengerikan. Hal ini bukan trauma pribadi, melainkan trauma kolektif. Trauma yang diderita oleh suatu bangsa, penganut agama, ataupun kelompok manusia. Dalam psikologi massa, peristiwa kolektif negatif itu disebut 'psikosis massa' seperti pengejaran terhadap minoritas, pembantaian massal, perang agama, dan seterusnya. Dalam psikosis massa, individu adalah ketiadaan, dan kelompok (mereka) menjadi segalanya.<sup>4</sup>

Sebagai imbas dari tragedi 9/11, Islam terpojokkan sebagai akar persoalan dan secara otomatis menimbulkan berbagai wacana tentang Islam yang radikal atau fundamental. Perang wacana ini justru memperparah kondisi traumatis, karena wacana tersebut berkembang pesat di pihak 'Islam' dan 'barat'. Kemudian, wacana ini mempengaruhi cara pandang pemerintah di hampir seluruh negara di dunia. Berikutnya muncul wacana alternatif yaitu Islam Moderat dengan slogan *Rahmatan Lil 'alamin* yang merupakan inisiatif Hasyim Muzadi sebagai pimpinan PBNU. Wacana ini dikonkretkan dalam bentuk forum dengan judul ICIS, singkatan dari *International Conference of Islamic Scholars*.

Forum ini dibentuk untuk menciptakan ruang baru bagi pencitraan Islam di mata masyarakat internasional dan umat muslim sendiri. ICIS menjadikan ulama dan cendekiawan dari segala penjuru dunia sebagai media utama untuk pendekatan informal yang efektif di tengah masyarakatnya. ICIS mengedepankan Islam *Rahmatan Lil 'alamin* dalam sudut pandang NU dengan perspektif pluralismenya. Konsep *Rahmatan Lil 'alamin* yang diambil dari al- Quran tersebut terbukti ampuh

---

<sup>4</sup> F. Budi Hardiman. *Memahami Negativitas, Diskursus tentang Massa, Teror, dan Trauma*. Jakarta: Kompas, 2005. hal: 170.

dalam mengakomodir semua kalangan baik muslim atau non-muslim untuk bersama-sama berbicara mengenai moderatisme.

Dengan latar belakang ini, penulis berkeinginan untuk meneliti pemikiran NU yang berlabel tradisional, namun bertransformasi dalam konteks global. Ungkapan mengenai NU sebagai 'sebuah pesantren besar' diterjemahkan dengan baik, dengan fakta telah terbentuknya 14 cabang istimewa NU di berbagai negara. NU telah menjadi sebuah *civil society* dengan mobilisasi yang terbukti efektif di era globalisasi ini. Konsep Islam yang *Rahmatan Lil 'alamin* dapat diterima sebagai pengejawantahan dari wacana Islam moderat dan dapat direspon dengan baik oleh KH. Hasyim Muzadi yang juga menjabat sebagai ketua PBNU. Hal ini yang akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan dalam dua pertanyaan:

1. **Apa pemikiran Hasyim Muzadi yang dituangkan dalam ICIS?**
2. **Bagaimana sejarah ICIS?**
3. **Bagaimana dampak ICIS pada tingkat Nasional dan Internasional?**

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tradisi kultur NU yang erat dengan nilai-nilai lokal, membuat NU mempunyai massa terbesar di Indonesia dan ini memberikan daya tawar untuk mempengaruhi perikehidupan masyarakat Indonesia. Sejak NU kembali ke khittah

1926 pada tahun 1984, NU berkiprah menjadi *civil society* yang berdiri di atas segala kepentingan politik. Sejak masa kepemimpinan Gus Dur, NU mulai berkiprah dalam forum internasional dan kemudian dilanjutkan oleh Hasyim Muzadi. Hal ini kemudian menjadikan NU sebagai representasi bangsa Indonesia, ketika globalisasi mulai menuntut kecepatan untuk merespon dengan jangkauan yang melintasi batas-batas negara. Sebuah hal yang sulit dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dalam tataran formal sebuah negara berkembang dengan berbagai keterbatasan diplomasi ‘*G to G*’ (*government to government*).<sup>5</sup>

Dalam tulisan ini, penulis akan mendeskripsikan pengaruh pemikiran NU di ICIS dengan tujuan untuk:

- a) Menjelaskan pemikiran Hasyim Muzadi dalam ICIS sehingga menghasilkan gambaran yang sistematis dan terperinci. Analisis pemikiran tokoh sebuah ormas Islam, yang sering dicap tradisional, namun mampu mempunyai peran secara global dapat menjadi variasi kajian di masa depan. Hal tersebut luar biasa, karena Hasyim Muzadi berhasil mengaplikasikan pemikiran-pemikiran modern, dalam konteks keindonesiaan. Dalam hal ini Hasyim Muzadi membawa NU (Indonesia) tidak sebagai konsumen. Nilai tambah lainnya ialah, pendekatan multidisiplin dibutuhkan, selain untuk mendapatkan analisa yang komprehensif, namun juga untuk memperjelas analisa dari perspektif disiplin yang dipilih.

---

<sup>5</sup> Hasyim Muzadi. “Pak Hassan Telah Berhasil Mengemas Islam Moderat dalam Diplomasi Global.” *Tabloid Diplomasi*. Jakarta: Departemen Luar Negeri RI, 2009. 15 November-14 Desember. hal: 9.

- b) Memberikan perspektif baru, mengenai peran forum Islam yang memadukan nilai-nilai informal keagamaan, dengan peran formal sebuah negara. ICIS yang lahir dan dikembangkan oleh Hasyim Muzadi sebagai ulama, berusaha meningkatkan kapabilitas dan ruang gerak ulama, sehingga tidak terperangkap dalam wilayah politik praktis atau praktik keagamaan yang dangkal. Ulama harus merubah perspektif tentang makna ‘ummat’, mentransformasinya dalam konsep *Rahmatan Lil 'alamin*.
- c) Tulisan ini tentu saja merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Humaniora, di Program Studi Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI).

#### 1.4 Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan ialah analisis deskriptif, dimana penulis akan menyaring sumber dari berita-berita (media cetak dan elektronik) ataupun referensi lainnya, kemudian mendeskripsikan hasil-hasil penemuan, lalu membandingkannya dalam bentuk tulisan ilmiah.

Pendekatan sejarah pemikiran yang penulis gunakan akan menjelaskan sumber informasi dalam kerangka kajian teks, kajian konteks sejarah, dan kajian antara teks dan masyarakatnya.<sup>6</sup> Dengan tiga kajian sejarah pemikiran, penulis mempunyai variasi cara dalam membedah peran pemikiran Hasyim Muzadi tersebut. Penulis dapat melihatnya dari nilai-nilai pemikiran NU, atau dari para aktor yang menggerakkan ICIS.

---

<sup>6</sup> Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008. hal: 190.

Sumber data dalam skripsi ini menggunakan tiga referensi utama. Pertama, data yang penulis dapatkan dengan melakukan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada Hasyim Muzadi, Masykuri Abdillah, dan Hassan Wirajuda, serta informasi tambahan yang penulis dapatkan dari Arif Zamhari dan Iqbal Sullam. Sementara wawancara yang penulis lakukan ketika bertemu (alm) Rozy Munir pada tahun 2009 belum bisa dijadikan sumber rujukan karena keterbatasan waktu saat itu hingga akhirnya dia dikabarkan meninggal dunia.

Kedua, sumber referensi yang penulis gunakan ialah literatur-literatur mengenai pemikiran NU atau mengenai pemikiran Islam moderat lainnya. Sumber rujukan penulis turut diambil dari buku, tulisan, pidato, atau berita tentang tokoh di media lainnya. Hal ini sebagai bukti konsistensi pemikiran sang tokoh tersebut, dan juga bukti kapabilitasnya. Bahkan, penulis juga menggunakan literatur tambahan dari disiplin ilmu yang berbeda, seperti ilmu hubungan internasional, ilmu psikologi, dan ilmu komunikasi. Hal ini tentu saja karena luasnya dampak yang dihasilkan objek penelitian ini, sehingga walaupun sulit, penulis ingin memaparkannya secara komprehensif.

Ketiga, sumber yang penulis dapatkan dari cetakan hasil tiga konferensi ICIS, sebanyak enam volume. Literatur ini merupakan pinjaman Rozy Munir, pada tahun 2009, dimana penulis berhasil menemui dia di sela-sela kesibukannya sebagai Dubes RI di Qatar.

Data-data tersebut kemudian penulis seleksi, kemudian dilakukan analisis, dan pendeskripsian sehingga menjadi sistematis dan sesuai dengan tujuan penulisan skripsi ini.

### 1.5 Tinjauan Kepustakaan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa referensi buku sebagai bahan tinjauan, dalam menganalisa fenomena yang dibahas. Tinjauan kepustakaan berfungsi sebagai pembanding. Dalam pengertian agar karya tulis yang dikerjakan tidak berada dalam karya penulis lainnya yang lebih dahulu sehingga terjaga orisinalitasnya. Sebagai pedoman, penulis membutuhkan rujukan dalam memperkuat analisa agar mencapai objektivitas pemikiran. Tinjauan kepustakaan tersebut antara lain ;

a) *NU “LIBERAL”: Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam.*

Buku karangan Mujamil Qomar ini merupakan karya tulis yang menganalisa fenomena pemikiran di kalangan NU yang mengarah kepada liberalisasi. Para intelektual kaum sarungan tersebut telah bertransformasi dengan mengombinasikan kajian literatur klasik dan metodologi ilmiah. Hal tersebut membuat mereka mampu menciptakan dinamika intelektual dan keragaman wacana secara longgar. Penelitian ini dapat merubah paradigma umum mengenai kejumudan dan ketradisional dalam konotasi yang selama ini menghimpit kalangan NU.

b) *NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme dan Fundamentalisme Neo Liberal.*

Tulisan karya Ahmad Baso ini merupakan sebuah analisa dari sudut pandang kalangan muda NU yang mencoba menggali fenomena keagamaan pasca 9/11. Dia mencoba menjelaskan sebuah kondisi yang memandang agama hanya sebagai *lifestyle* dan tidak lagi sebagai gerakan sosial yang mencerdaskan umatnya. Ada sebuah korelasi yang muncul ketika

membaca fenomena pasca 9/11 dengan konsep ‘perang melawan teror’ yang diangkat AS dan penyeragaman persepsi mengenai ‘fundamentalisme’ dan ‘radikalisme’ beragama dalam wacana barat.

c) *NU: Identitas Islam Indonesia*. Buku yang merupakan karya dari Hilmy Muhammadiyah dan Sultan Fathoni ini, mencoba memandangi hakikat NU sebagai agama dan budaya di masyarakat Indonesia. NU yang mencoba membudayakan falsafah *ahlussunnah wal jamaah* di Indonesia, sekaligus memberikan inovasi terhadap fenomena sosial di masyarakat. Paham *ahlussunnah wal jamaah* yang berarti golongan sunni, akan selalu diterjemahkan kembali setiap masanya untuk mendapatkan keotentikan dan selalu *up to date*. Dengan menjadikan kultur Indonesia sebagai *local genius* yang justru menciptakan lingkungan sosial yang moderasi dan penuh toleransi.

Dengan menjadikan ketiga buku ini sebagai tinjauan pustaka, penulis terbantu dalam melakukan perbandingan dan mempunyai pedoman untuk menjaga konteks berfikir. Penulis membutuhkan kehadiran buku-buku tersebut sebagai syarat dari penulisan ilmiah untuk menghasilkan keotentikan buah pikiran dan objektivitas pengamatan. Pemikiran-pemikiran dalam buku tersebut merupakan pijakan bagi penulis dalam menyoroti transformasi pemikiran di kalangan NU. Transformasi dalam pengertian jangkauan yang semakin luas, namun dengan konsistensi substansial.

Namun, berbeda dari yang disampaikan oleh buku-buku tersebut, penulis akan coba menjelaskan perkembangan pemikiran tokoh di NU. Dengan mencoba menjadikan metode Islam kultural ala NU, sebagai *role model* sikap toleransi

beragama di dunia, Hasyim Muzadi mencoba memberikan pemahaman baru mengenai Islam di dunia. Karena banyak negara-negara di Barat, yang tidak dikaruniai keberagaman layaknya Indonesia.

## 1.6 Landasan Teori

Dalam menjabarkan pemikiran-pemikiran NU dan aktor intelektualnya dalam bentuk tulisan ilmiah, penulis menggunakan pendekatan sejarah pemikiran sebagai teori dalam ‘membedah’ fakta-fakta dan fenomena sosial. Karena permasalahan yang berusaha penulis angkat ialah pemikiran NU dalam ICIS, dan posisi pemikiran NU melalui ICIS dalam pencitraan Islam moderat di dunia.

Kuntowijoyo mengatakan sejarah pemikiran pada dasarnya merupakan terjemahan dari *‘history of thought’*, *‘history of ideas’*, atau *‘intellectual history’*. Hal ini sering didefinisikan oleh Roland N. Stromberg, sebagai *the study of the role of ideas in historical events and process*. Dalam sejarahnya, manusia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemikiran. Segala aktivitas atau kejadian dapat dipastikan memiliki pengaruh pemikiran dari individu-individu manusia. Bahkan hingga ke level hal yang sering dianggap remeh, bahkan setiap harinya, manusia tidak bisa memisahkan diri dari pengaruh ide atau pemikiran. Hal tersebut akan terus menjadi motivasi dalam hidup.<sup>7</sup>

Kuntowijoyo dalam bukunya mengenai Metodologi Sejarah menjelaskan bahwa dalam sejarah pemikiran kita harus melihat kepada siapa pelakunya dan apa

---

<sup>7</sup> Kuntowijoyo, *op.cit.* hal: 190.

tugas sejarah pemikiran tersebut. Pelaku sejarah pemikiran dapat dilakukan oleh perorangan (Sukarno, Natsir, John Locke), isme (nasionalisme, sosialisme, komunisme), gerakan intelektual (strukturalisme, post modernisme), periode (*the dark ages, renaissance*), dan pemikiran kolektif ( Muhammadiyah, NU). Sedangkan tugas sejarah pemikiran ialah; membicarakan pemikiran-pemikiran besar yang berpengaruh pada kejadian bersejarah, melihat konteks sejarahnya tempat ia muncul, tumbuh, berkembang (sejarah di permukaan), dan pengaruh pemikiran pada masyarakat bawah.<sup>8</sup>

Di akhir tugas sejarah pemikiran yang tersebut ialah berusaha menghubungkan antara ide intelektual dan masyarakatnya. Hal tersebut merupakan dampak yang ditimbulkan dari para tokoh dan pemikirannya yang dimilikinya. Kita tidak bisa memisahkan sejarah pemikiran pada kaum intelektual (dalam pikiran-pikiran abstraknya), dan masyarakat bawah (tempat bermuaranya segala bentuk ide dan pikiran). Dibutuhkan ketelitian dalam menyeleksi dan memverifikasi dokumen yang ditemukan sehingga nantinya akan muncul hasil penyusunan yang akurat, karena peneliti hanya dapat melakukan kembali pikiran masa lalu tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal: 192.

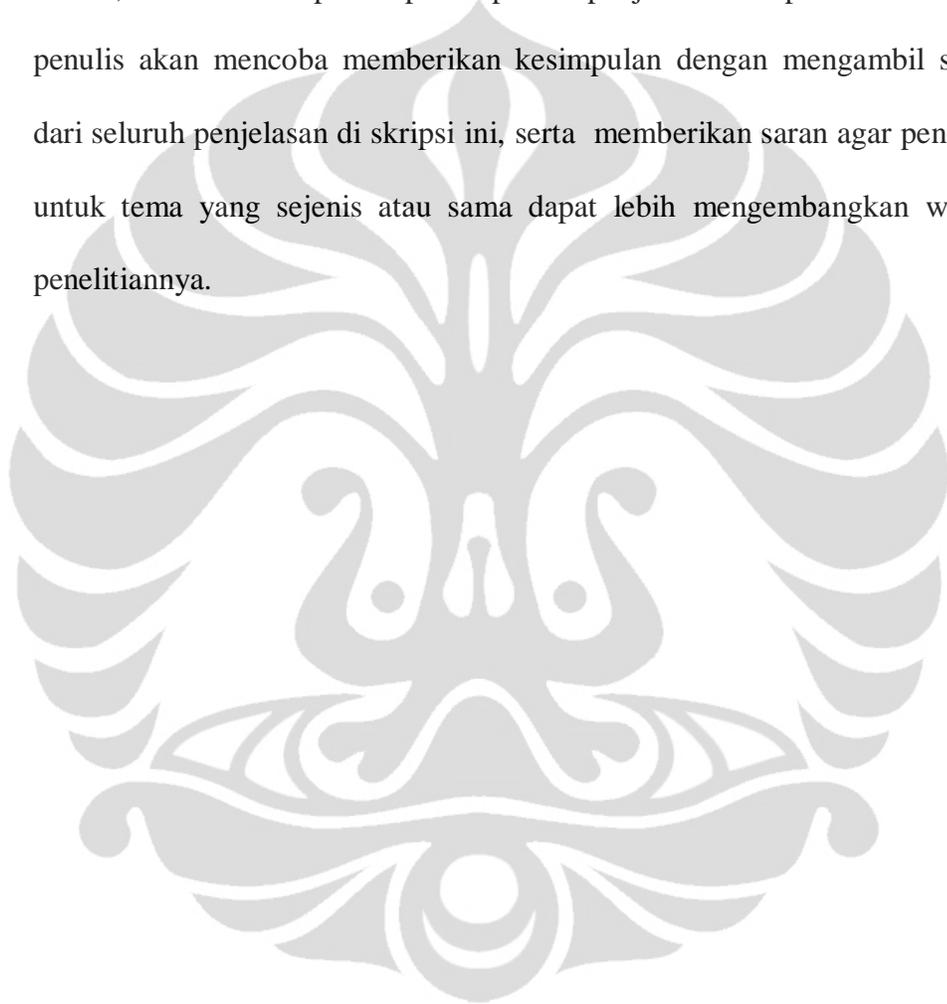
<sup>9</sup> *Ibid*, hal: 194.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Tahapan dalam sistematika penjelasan skripsi ini ialah sebagai berikut

- a) Bab 1. Pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang penulisan skripsi ini, apa permasalahan yang akan diangkat, dan relevansinya terhadap kehidupan sosial masyarakat dewasa ini. Menjelaskan rumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, landasan teori, dan sistematika penulisan.
- b) Bab 2, bab ini menjelaskan tentang dinamika pemikiran NU, dalam nilai-nilai yang berpengaruh terhadap perkembangannya sebagai organisasi sosial kemasyarakatan. Penulis menganggap penting peran NU sebagai ormas yang diusung oleh Hasyim Muzadi dalam menterjemahkan makna *Rahmatan Lil 'alamin*. Sehingga NU dianggap mampu menghadapi perubahan kontelasi global dengan cita rasa Indonesia.
- c) Bab 3, pada bab ini penulis mencoba menjelaskan proses berdirinya ICIS yang dikembangkan dari nilai-nilai pemikiran NU. Pemikiran NU tersebut dikembangkan oleh Hasyim Muzadi yang kemudian bekerjasama dengan Deplu RI.
- d) Bab 4, pada bab ini penulis mencoba menjelaskan pemikiran Hasyim Muzadi sebagai ketua PBNU yang menggerakkan ICIS. Pemikiran tersebut didukung oleh Masykuri Abdillah dan Hassan Wirajuda. Pemilihan tokoh ini tanpa bermaksud mengecilkan peran tokoh-tokoh lainnya dalam melahirkan ICIS. Namun dikhawatirkan pemikiran tokoh lainnya yang kurang intens terlibat, dapat mendistorsi fokus penelitian ini.

- e) Bab 5, pada bab ini akan membahas dampak yang dihasilkan oleh ICIS baik untuk level dalam negeri atau luar negeri. Dampak tersebut merupakan bukti bahwa ICIS bukan sekedar wacana, namun usaha konkret dalam menyebarkan citra Islam moderat
- f) Bab 6, bab ini merupakan penutup dari penjelasan skripsi ini. Di bagian penulis akan mencoba memberikan kesimpulan dengan mengambil sintesa dari seluruh penjelasan di skripsi ini, serta memberikan saran agar penelitian untuk tema yang sejenis atau sama dapat lebih mengembangkan wilayah penelitiannya.



## **BAB II**

### **DINAMIKA KEHADIRAN NU**

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan dinamika kehadiran Nahdlatul Ulama (selanjutnya dalam penelitian ini disebut NU). ‘Kehadiran’ di sini mengandung arti keberadaan yang saling mempengaruhi dengan lingkungannya. Dimulai dari situasi dan kondisi yang melahirkan Nahdlatul Ulama (NU), nilai-nilai utama NU, dan pemahaman *Ahlussunnah wal Jamaah*. Hal ini dianggap penting oleh penulis mengingat posisi NU cukup penting dalam pembahasan ini, sehingga penulis berkewajiban untuk menjabarkan dasar pemikiran dan sikap NU. Sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia saat ini, wajar jika keberadaan NU senantiasa menghiasi lembar sejarah Indonesia. Penulis mengakui, dibutuhkan pengamatan yang cermat dalam menelaah substansi dari organisasi besar seperti NU.

#### **2. 1. Sejarah Berdirinya NU**

##### **2.1.1 Ulama Nusantara dan Penyebaran Islam di Indonesia**

Pada masa sekitar tahun 1515, digambarkan bangsawan Jawa yang kafir secara sukarela memeluk agama Islam dan para pedagang Islam memperoleh kekuasaan. Para pedagang Islam mendapatkan tempat yang sangat terhormat, bersama para cendekiawan Islam yang tinggal di rumah para pedagang tersebut.<sup>10</sup> Wilayah Indonesia dikatakan telah memiliki bentuk agama yang berasal dari konsep-

---

<sup>10</sup> H.J de Graaf dan Th. Pigeaud. *Kerajaan Islam Pertama di Jawa; Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti dan KITLV, 2000. hal: 32.

konsep kerohanian yang tumbuh dan berkembang secara internal dalam masyarakatnya. Nilai-nilai kerohanian tersebut mencapai kesempurnaan tanpa melakukan imitasi atau pengaruh eksternal. Dalam ritualnya, dikatakan tidak jauh berbeda dengan layaknya agama-agama berhala yang melakukan pemujaan atas dasar pandangan bersahaja terhadap fenomena-fenomena alam.<sup>11</sup>

Agama telah menjadi entitas yang sangat penting dalam proses masuknya nilai-nilai ke wilayah publik negara Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan sejak hadirnya agama Hindu dan Budha di Nusantara, Indonesia telah memiliki kehidupan yang religius. Candi-candi yang ditinggalkan peradaban tersebut menjadi bukti bahwa agama telah tertanam sebagai sistem ritual, sosial, dan budaya.<sup>12</sup> Esensi yang dapat diambil dari pernyataan di atas adalah bangsa Indonesia sejak dahulu tidak mengenal sekularisasi.<sup>13</sup>

Islam telah menjadi bagian terbesar dalam sejarah keindonesiaan. Peran Wali Songo mengubah lokalitas budaya menjadi masyarakat dinamis dengan fleksibilitas yang tinggi. Pergulatan Wali Songo dalam mengajarkan Islam dilakukan dengan pendekatan humanistik dan peka terhadap kondisi budaya sekitar. Pemikiran moderat dan kosmopolit ini hadir sejak awal dakwah Islam ke Indonesia yang dibawa oleh

---

<sup>11</sup> Alwi Shihab. *Islam Sufistik Islam Pertama dan Pengaruhnya Hingga Kini di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2001. hal: 1.

<sup>12</sup> Said Aqil Siradj. "Wajah Islam di Indonesia." dalam *NU: Identitas Islam Indonesia.*, Hilmy Muhammadiyah dan Sulthan Fatoni. Jakarta: eLSAS, 2004. hal: viii.

<sup>13</sup> Mengenai sekularisme, Buya Hamka menggunakan istilah "Perpisahan Agama dan Negara", yang merupakan terjemahan dari "separation of church and state". Konsep tersebut berasal dari teori 'dua pedang' atau 'dua kekuasaan', dari Paus Glasius pada abad ke lima masehi. Teori ini menginginkan adanya pemisahan yang tegas antara kekuasaan gereja Katolik, dan kekuasaan kaisar. Argumen ini diklaim berdasarkan ayat-ayat kitab Injil. Lihat Ahmad M. Sewang. "Hubungan Agama dan Negara: Studi Pemikiran Politik Buya Hamka". Amir Mahmud (Ed). *Islam dan Realitas Sosial di Mata Intelektual Muslim Indonesia.*. Jakarta: Edu Indonesia Sinergi, 2005. hal: 308.

para pedagang dari Gujarat.<sup>14</sup> Para juru dakwah ini memilih dakwah yang berorientasi pada esensi dan bukan kepada syariat Islam. Hal ini disebabkan oleh dakwah Islam yang senantiasa didasarkan pada penanaman nilai-nilai sufistik yang mengedepankan aspek religiusitas yang mendalam. Dampak nyata dari pendekatan sufistik ini dapat dilihat pada pola beragama (Islam) masyarakat pesantren di Indonesia yang menampilkan wajah Islam lokal dan moderat, namun acapkali menjadi minoritas di tengah masyarakat muslim dunia.<sup>15</sup>

Bahkan jauh sebelum Islam Indonesia mendapatkan bentuk yang mapan, para ulama lokal nusantara telah menggaungkan pemikiran-pemikiran Islam tersebut ke mancanegara. Hal tersebut dapat dilihat pada Syekh Ahmad Khatib Sambas (1803-1875 M), seorang ulama terkemuka kelahiran Sambas, Kalimantan Barat. Sejak muda, ia bermukim di Mekah disebabkan iklim politik di Nusantara yang belum kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Syekh Sambas dikenal sebagai tokoh sufi dan pencetus tarekat *Qadiriyyah wa al Naqsabandiyah*, sebuah kodifikasi dua tarekat yaitu *Qadiriyyah* dan *Naqsabandiyah*. Tarekat Ahmad Khatib Sambas banyak diamalkan oleh umat muslim di negara-negara yang bermazhab Syafi'i serta bertasawuf al Busthami dan al Junaid.<sup>16</sup>

Nama ulama besar lainnya adalah Nawawi Banten. Ia merupakan murid dari Syekh Ahmad Khatib Sambas di Mekah. Nawawi Banten menjadi wujud dari geliat Islam lokal yang lahir di tengah keterbatasan Nusantara. Ia akhirnya menetap di

<sup>14</sup> Mayoritas penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara dilakukan oleh tokoh-tokoh tasawuf. Hal ini diakui oleh mayoritas sejarawan dan peneliti, karena sikap kompromis dan kasih sayang yang dimiliki oleh kaum sufi. Tasawuf memiliki kecenderungan sikap yang terbuka dan berorientasi kosmopolitan. Lihat Alwi Shihab, *op.cit.* hal: 13.

<sup>15</sup> Said Aqil Siradj, *op.cit.* hal: ix.

<sup>16</sup> *Ibid.* hal xii.

Mekah sebagai bentuk protes kepada pemerintah kolonial Belanda. Syekh Nawawi mencapai puncak karir sebagai *mujtahid mazhab* di bidang fikih. Ia meninggalkan lebih dari 100 karya tulis dan muridnya tersebar di seluruh dunia, khususnya di negara-negara penganut aliran Syafi'i.<sup>17</sup>

Ulama berikutnya yang meneruskan pemikiran Syekh Ahmad Khatib Sambas dan Syekh Nawawi Banten adalah Mahfudz Termas (ahli fikih, w. 1923). Ia adalah pengarang kitab *Minhaj al-Nadzar* yang merupakan sebuah komentar atas kitab *Minhaj al-Abidin* karya al-Ghazali. Kitab ini menjadi kajian penting di beberapa negara berpenduduk muslim serta di komunitas al-Azhar Mesir bahkan hingga ke wilayah Afrika Barat.<sup>18</sup>

Para ulama Nusantara dengan pemikirannya yang diakui oleh masyarakat dunia waktu itu, telah membuktikan bahwa Islam karakter Indonesia ialah Islam yang moderat. Tidak hanya itu, pemikiran-pemikiran dari wilayah Arab juga diserap nilai-nilainya oleh para ulama Nusantara dan kemudian disebarkan di Indonesia.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hal: xii

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Mekkah dan Madinah ( Haramayn atau 'dua haram'), sejak abad ke-16 telah mempunyai beberapa segmen imigran dan ulama internasional. Kategori *little immigrants*, yaitu orang yang datang dan bermukim di Haramayn dan kemudian larut dalam kehidupan sosial keagamaan setempat. *Grand immigrants*, yaitu ulama yang telah mempunyai kualitas dan aktif dalam memerikan gagasan keislaman. Ulama dan murid pengembara, umumnya datang ke Haramayn untuk menunaikan haji dan belajar pada beberapa guru, yang kemudian kembali ke daerah asalnya. Lihat Azyumardi Azra. *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan; 2004. hal: 72.

## 2. 1. 2 Gerakan Pemikiran Islam dan Pengaruhnya

Di awal abad ke-19, muncul fenomena dalam dunia Islam yang menginginkan pembaharuan pola pikir dan pemahaman keagamaan dengan melihat kondisi mayoritas umat Islam di dunia.<sup>20</sup> Para *mujaddid*, yang memperbaharui pemahaman agama dengan pemikirannya muncul di Mesir, seperti: Jamal al-Din al-Afghani dengan Pan-Islamisme mencoba melakukan terobosan dalam menggalang solidaritas internal umat; Muhammad Abduh dengan seruan ijtihad memperkenalkan pola pikir liberal untuk mencegah apatisisme kaum muslim akibat pemahaman keagamaan yang sempit; Rasyid Ridha mengemukakan pandangan salaf yang ingin membangkitkan semangat keilmuan kaum muslim. Pemikiran dan gerakan para tokoh ini yang selanjutnya menjadi dasar pendikotomian model keberagamaan yang dikenal dengan istilah tradisional dan modernis.<sup>21</sup>

Ide-ide mengenai pembaruan tersebut mulai diserap oleh para jama'ah haji ataupun ulama Indonesia yang berada di Mekah dan Madinah (Haramayn).<sup>22</sup> Terdapatlah nama-nama seperti Syekh Mahfuzh al-Tarmasy, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Imam Nawawi al-Bantani, Syekh Sambas, Syekh Abdul Karim,

<sup>20</sup> Mujammil Qomar. *NU "Liberal": Dari Tradisionalisme Ahlussunah ke Universalisme Islam*. Bandung: Mizan, 2002. hal 30.

<sup>21</sup> Para tokoh pembaharu Islam (khususnya al- Afghani, Abduh, dan Ridha) bergerak dengan melihat kondisi umat Islam yang mayoritas berada dalam kolonialisme Barat. Mereka mengkaji ulang kondisi tersebut dengan menggunakan khazanah modern bangsa Eropa. Lihat Hendro Prasetyo, Ali Munhanif, et al. *Islam dan Civil society: Pandangan Muslim Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.hal 29.

<sup>22</sup> Haramayn sering disebut sebagai 'panci pelebur' (*melting pot*), dalam pengertian terdapat berbagai tradisi 'kecil' Islam yang melebur membentuk suatu sintesis baru yang condong pada 'tradisi besar'. Tradisi-tradisi tersebut terutama dibawa oleh ulama dari India, Afrika Utara, dan Mesir. Lihat Azyumardi Azra. *op.cit*.hal: 118.

Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai M. Bisri Syansuri, dan sebagainya.

Di awal abad ke-20, dinamika keagamaan di Indonesia juga mulai berubah. Perubahan dalam hal kesadaran untuk mewujudkan pemikiran-pemikiran yang abstrak menjadi bentuk usaha-usaha yang lebih konkret. Hal ini turut dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri yang mulai melakukan gerakan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda secara nasional yang ditandai dengan munculnya Budi Utomo (1908). Catatan penting lainnya adalah kehadiran Serikat Islam telah memelopori gerakan keislaman yang terkoordinir secara modern. Pada tahun 1915, organisasi tersebut berakhir. Dalam umurnya yang hanya belasan tahun tersebut, organisasi ini menandai munculnya kesadaran politik Islam di Indonesia.<sup>23</sup>

Di awal abad ke 20 tersebut, muncul pula konflik tajam mengenai masalah di antara kalangan ulama pesantren (tradisional) dan kalangan 'modernis' (Muhammadiyah dan Al Irsyad).<sup>24</sup> Kedua kelompok tersebut mempersoalkan mazhab dan ijtihad *Ahlussunnah wal Jamaah* yang oleh pihak 'modernis' dituduh sebagai bid'ah dan khurafat yang mendekati *syirik*. Mereka menuntut kita-kitab klasik agar kembali pada al-Quran dan hadits.<sup>25</sup> Namun, ulama-ulama tradisional masih melihat relevansi dengan sumber aslinya al-Quran dan Hadits dalam memahami hukum

<sup>23</sup> H.Rozikin Daman. *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*. Yogyakarta: Gama Media, 2001 hal:45.

<sup>24</sup> Gerakan Islam modernis pada dasarnya berakar pada gerakan Wahabiyah (Abdul Wahab). Walaupun tidak sama, namun semangat tajdid yang dilakukan Wahabiyah telah merintis sebuah gerakan keagamaan yang mampu menjangkau perubahan sosial politik, dan tidak hanya berupa pemikiran teologi yang abstrak. Lihat Hendro Prasetyo, Ali Munhanif, et al. *op.cit.* hal 31.

<sup>25</sup> Achmad Siddiq mengatakan pada hakikatnya madzhab Ahlussunnah Wal Jamaah ialah suatu tajdid, yakni sebuah pembaharuan, untuk meluruskan terhadap penyelewengan, penyimpangan, kekacauan pikiran, dan pendapat dalam memahami al- Quran dan al- Hadits. Lihat Munawar Fuad Noeh dan Mastuki HS. *Menghidupkan Ruh Pemikiran K.H. Achmad Siddiq*. Jakarta: Gramedia, 2001. hal: 55.

Islam. Muncul gambaran bahwa kaum ‘modernis’ menyerang dengan cara-cara yang cenderung ofensif dan merendahkan, sedangkan kaum tradisional lebih memilih sikap yang cenderung defensif. Perselisihan ini semakin jelas terlihat pada kongres Islam di Cirebon (1922), Yogyakarta (1925), dan Bandung (1926).<sup>26</sup>

Memasuki abad ke 20, terdapat permasalahan yang ditandai oleh peristiwa politik pada tahun 1924 di Mekah. Kota Mekah direbut oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Su’ud yang mengalahkan Raja Hijaz (Mekah) Syarief Husein dan putranya. Hal tersebut menandakan berkuasanya kaum Wahabi<sup>27</sup> yang menyerang tradisi keagamaan dengan menghapuskan mazhab-mazhab yang ada. Berita tersebut membuat gusar para ulama tradisonal, terutama Kiai A. Wahab Hasbullah yang lalu berencana untuk mendirikan Jam’iyah Nahdlatul Ulama. Niat ini disampaikan ke Kiai Hasyim Asy’ari yang tidak serta merta langsung menyetujui.<sup>28</sup>

Tidak berselang berapa lama, Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Su’ud di Mekah berencana menggelar “Muktamar Khilafah” dalam upaya mendapatkan legitimasi menggantikan Khalifah Utsmaniyah sebagai pusat kekuasaan Islam. Diundanglah perwakilan setiap negeri yang mempunyai organisasi keislaman dan tidak luput perwakilan dari Indonesia yang rencananya diwakili oleh tokoh Syarikat Islam (H.O.S. Tjokroaminoto), tokoh Muhammadiyah (K.H. Mas Mansyur), dan ulama pesantren (Kiai A. Wahab Hasbullah). Akan tetapi, kemudian nama Kiai A.

<sup>26</sup> H. Rozikin Daman.*op.cit.* hal: 40.

<sup>27</sup> Dasar teologi Wahabi dibangun oleh Muhammad ibn ‘Abd al- Wahhab (w. 1206 H/ 1792 M) Lihat Khaled Abou El Fadl. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*. Trans. Helmi Mustofa. Jakarta : Serambi, 2006. Trans.of *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. 2005. hal:61.

<sup>28</sup> Deliar Noer meyakini pengaruh faktor dinamika Islam global, yang ditandai dengan naiknya Ibn Suud sebagai pemegang kekuasaan di Arab Saudi sebagai pengaruh berdirinya NU. Disamping itu juga masih banyak pendapat peneliti lainnya mengenai faktor berdirinya NU. Lihat Hilmy Muhammadiyah dan Sulthan Fatoni.*op.cit.* hal 116.

Wahab Hasbullah ditolak dengan alasan tidak mewakili suatu organisasi. Hal tersebut masih dapat diterima kaum 'santri' dengan syarat para utusan yang berangkat bersedia dititipi pesan oleh para ulama. Pesan itu berisi himbauan kepada Raja Su'ud untuk menghentikan tindakan-tindakan anti kebebasan bermazhab, ziarah kubur, membaca kitab Barzanji, dan sebagainya. Ternyata, pesan yang sederhana ini ditolak para delegasi dengan alasan formalistik hingga kongres Islam kelima pada Februari 1926 di Bandung.<sup>29</sup>

Dengan pertimbangan suara ulama yang tidak tertampung tersebut, kontan muncul pemikiran untuk mendirikan Komite Hijaz dan mengirimkan delegasi tersendiri untuk hadir ke Mekah.<sup>30</sup> Tentu saja setelah mendapat restu dari Kiai Hasyim Asy'ari. Delegasi tersebut terdiri dari:

- a) KH. Abdul Wahab Hasbullah, sebagai delegasi tunggal.
- b) Syekh Ghonaim (warga negara Mesir), penasehat delegasi, karena pada waktu itu Saudi Arabia masih memandang rendah bangsa Indonesia.
- c) KH. Dahlan Kohar, santri Indonesia yang sedang belajar di Mekah (dengan maksud penghematan biaya).

Setelah terbentuk, kemudian ulama mempertimbangkan bahwa delegasi tersebut membawa misi besar. Misi untuk menyampaikan pendapat besar kepada kerajaan yang sedang mengalami euforia kemenangan seperti Arab Saudi. Oleh karena itu, dirasa tidak pantas jika hanya berstatus utusan sebuah panitia saja. Delegasi harus berstatus utusan dari sebuah organisasi yang besar pula. Sehingga delegasi tersebut

---

<sup>29</sup> Mujammil Qomar. *op. cit.* hal 33.

<sup>30</sup> Tugas pokok Komite Hijaz ialah, menghimpun dana dan daya bagi pengiriman delegasi ulama *Ahlussunnah Wal Jamaah* Indonesia ke Hijaz. Lihat Abdul Mucith Muzadi. *op.cit.* hal 7.

berangkat ke Hijaz sebagai utusan dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tanggal 16 Rahab 1344 H, atau 31 Januari 1926. Hasyim Asy'ari dipilih sebagai Rois Akbar, sebuah nama besar yang tidak hanya dikenal di tanah air namun juga di Hijaz, melalui para guru dan teman dia disana.<sup>31</sup>

## **2. 2 Deskripsi Nahdlatul Ulama**

### **2. 2. 1 Ulama dan Pesantren**

'Ulama' merupakan kata yang merujuk kepada orang yang memiliki pengetahuan agama terutama di bidang fiqih atau hukum agama meskipun seorang ahli fiqih juga disebut sebagai 'fuqaha'. Berdasarkan hadits, ulama merupakan pewaris Nabi, yang meneruskan misi dan perjuangan para Nabi untuk menyampaikan agama Allah kepada manusia. Menurut Achmad Siddiq, istilah ulama diperuntukkan bagi orang yang mempunyai ilmu agama Islam, serta didukung oleh amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Namun, hakikat predikat ulama tersebut lebih merupakan sebagai pengakuan masyarakat terhadap kepribadiannya yang bersifat informal.<sup>32</sup>

Seseorang yang mendapat pengakuan ulama harus memiliki beberapa kriteria, yaitu tekun beribadah, baik yang wajib dan yang sunnah, zuhud, yaitu melepaskan diri dari segala kepentingan material duniawi, memiliki ilmu akhirat, yaitu memahami ilmu agama dalam kadar yang cukup, mengerti kemaslahatan masyarakat,

---

<sup>31</sup> Ibid. hal 6.

<sup>32</sup> Munawar Noeh dan Mastuki HS. *op.cit.* hal:100.

peka terhadap kepentingan umum, dan terakhir, mengabdikan seluruh ilmunya untuk Allah dengan niat yang benar untuk berilmu dan beramal.<sup>33</sup>

Secara kebahasaan, ‘Nahdlatul Ulama’ terdiri dari dua kata bahasa Arab, yaitu ‘*nahdlah*’ yang artinya ‘bangkit’, ‘bangun’, dan ‘loncatan’.<sup>34</sup> Kemudian kata ‘*al-ulama*’ yang artinya ialah ‘kelompok agamawan’<sup>35</sup>. Secara epistemologi, *nahdlatul ulama* ialah komunitas cendekiawan (ulama) yang mampu menerima, melestarikan, dan meneruskan tradisi serta budaya generasi sebelumnya, dan juga mampu melakukan eksplorasi, inovasi, dan kreasi yang lebih baik dan bermanfaat. Dengan demikian, NU mempunyai kesadaran historis dan kemampuan mereformasi kondisi yang secara kultural atau pemikiran kurang relevan.<sup>36</sup>

Hasyim Asy’ari memberikan nama organisasi yang didirikannya dengan nama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Kaum Ulama). Kata ulama tersebut dikutip dari kitab Syarh al-Hikam (Syarah Al-Hikam). Dalam kitab tersebut dituliskan ungkapan terpenting bagi seorang muslim yaitu “*la tashhab man la yunhidhuka ilallahi haluhu wa la yadulluka ilallahi maqaluhu*” (jangan kau temani orang yang perilakunya tidak membangunkan kalian kepada Allah SWT dan yang kata-katanya tidak menunjukkan kalian kepada-Nya). Ungkapan ini menjelaskan bahwa yang menunjukkan dan

<sup>33</sup> Ibid.hal:102.

<sup>34</sup> Secara etimologis, *A Dictionary of Modern Written Arabic Language* yang disusun oleh Hans Wehr, kata *nahda* diterjemahkan sebagai: *rising; awakening; (esp.,national)*. London: Macdonald & Evans Ltd, 1980. hal: 1004. yang berarti muncul, terbangun; (bangsa). Dalam Edi Sigar dan John Burnett, Phd. *Raja Kamus Inggris-Indonesia & Indonesia Inggris*. Jakarta: Pustaka Delapratasa, 1996. hal: 286 dan 26.

<sup>35</sup> Secara etimologis, *A Dictionary of Modern Written Arabic Language* yang disusun oleh Hans Wehr, kata ‘*ulama*’ diterjemahkan sebagai: *knowing; cognizant, informed; learned, erudite*. London: Macdonald & Evans Ltd, 1980. hal: 636. yang berarti pengetahuan, mengetahui, yang diberitahu, yang terpelajar, terpelajar. Dalam Edi Sigar dan John Burnett, Phd. *Raja Kamus Inggris-Indonesia & Indonesia Inggris*. Jakarta: Pustaka Delapratasa, 1996. hal: 191, 58, 174, 195, 111.

<sup>36</sup> Hilmy Muhammadiyah dan Sulthan Fatoni, *op.cit.* hal: 120.

membangkitkan adalah ulama. Dengan demikian, organisasi yang didirikan harus mengikuti para ulama, dan oleh karena itu disebut sebagai kebangkitan kaum ulama. Hal ini juga berarti kebangkitan moralitas yang sesuai dengan ajaran al- Ghazali.<sup>37</sup>

Pesantren tumbuh di Indonesia, khususnya di pulau Jawa, seiring dengan mulai menyebarnya agama Islam ke Indonesia. Setelah Islam cukup menyebar di wilayah Aceh, Islam disebarkan ke Jawa melalui jalur perdagangan, dan dakwah mengutamakan penduduk wilayah pesisir sebagai segmen utamanya. Efek dari pola seperti tersebut di atas adalah masyarakat pesisir terbuka terhadap ajaran Islam sehingga kemudian kitab-kitab agama Islam berbahasa Arab menjadi ramai di wilayah Jawa. Kondisi ini berbuntut pada berdirinya pesantren sebagai lembaga lokal yang mengajarkan praktik-praktik dan kepercayaan Islam. Pesantren adalah pengembangan dari sistem pengajaran yang mensyaratkan sang murid harus menetap dan hidup dalam *zawiyah* (kamar penyepian) Syekhnya (guru tarekat). Dari pesantren ini kemudian berkembang menjadi komunitas pesantren, yaitu masyarakat yang mempunyai karakter dan tradisi pesantren akibat terjadinya interaksi.

Menurut *Ensiklopedia Islam Indonesia*, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Kata pesantren berasal dari ‘santri’ yang diberi awalan ‘pe-‘ dan akhiran ‘an’, menjadi ‘pesantrian’ (pesantren), yang berarti tempat tinggal para santri. Santri sendiri berarti orang yang menuntut ilmu agama Islam. Pesantren di Jawa dan Madura sering disebut pondok. Di Aceh, corak pendidikan seperti itu disebut *meunasah* dan di

---

<sup>37</sup> Abdurrahman Wahid. “Antara Tasawuf Sunni dan Tasawuf Falsafi.” dalam Alwi Shihab. *Islam Sufistik Islam Pertama dan Pengaruhnya Hingga Kini di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2001. hal: xxiv.

Sumatra Barat disebut *surau*. Setiap pesantren secara minimal harus mempunyai elemen-elemen pesantren seperti pondok atau asrama, mesjid, santri, pengajaran kitab kuning, dan kiai. Santri sebagai elemen utama sebuah pesantren terbagi dua jenis yaitu santri kalong dan santri mukim. Santri mukim adalah para santri yang berasal dari luar daerah dan menetap dalam pondok, sedangkan santri kalong adalah para santri yang berasal dari desa-desa di sekeliling pesantren yang biasanya tidak menetap. Pesantren juga harus menampilkan pengajian kitab kuning. Disebut demikian karena memang kertas yang dipergunakan sebagai alas tulis dari kitab tersebut berwarna kuning. Umumnya, kitab-kitab tersebut bermazhab Syafi'i. Di samping itu, ada pula kitab-kitab pelajaran bahasa Arab, tauhid, sejarah, dan akhlak.<sup>38</sup>

Sistem pendidikan pesantren menggunakan pendekatan analitik yaitu kajian untuk menganalisis kelemahan dan kekuatan isi sebuah kitab yang bertujuan menciptakan mujtahid. Kekuatan sebuah pesantren terletak pada figur kiai, seorang cendekiawan agama (ulama) yang memperoleh gelar (kiai) tersebut dari pengakuan masyarakat. Sejak zaman Majapahit, para kiai telah ditaati oleh para santri dan posisinya dimuliakan, sehingga ada yang berkembang menjadi kesultanan (Demak). Figur kiai yang begitu kuat dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan agama, menjadikan pesantren sebagai pusat pendidikan dan dakwah Islam. Hal ini sangat terasa di wilayah pedalaman pulau Jawa. Strategi ini juga dimaksudkan untuk menyasati masa penjajahan Belanda, dengan menampilkan kesan eksklusif pesantren demi menjaga kelangsungan tradisi dan keyakinan masyarakat Islam. Pilihan ini menjadikan pesantren identik dengan komunitas Islam pedesaan. Pesantren dan

---

<sup>38</sup> Harun Nasution. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992. hal: 771.

budaya lokal saling mengubah, mengolah, dan saling memperbaharui, sehingga dikenal dengan budaya Islam pesantren.<sup>39</sup>

Memasuki paruh kedua abad ke 19, keberadaan pesantren semakin menjamur dengan meningkatnya arus perdagangan dan daerah-daerah yang terpelosok juga semakin terbuka. Beragam pendapat dinyatakan oleh para sejarawan tentang pesantren sebagai “produk” asli dari Indonesia. Hal ini berkaitan dengan peran kiai dalam perjuangan melawan penjajah. Agama Islam telah menjadi inspirasi utama perlawanan muslim pesantren terhadap kolonial Belanda. Di kalangan muslim pesantren muncul kesadaran mendalam bahwa pemerintah kolonial merupakan ‘pemerintah kafir’ yang menjajah agama dan bangsa mereka. Bentuk perlawanan utama mereka secara kultural adalah dengan menunjukkan penolakan terhadap segala hal yang ‘berbau’ Belanda dan segala identitas Eropa. Hal ini yang memicu gelombang kaum santri yang menempuh studi ke Timur Tengah, khususnya Haramain. Salah satu obsesi kaum santri, khususnya masyarakat dari luar Jawa, untuk studi ke luar negeri adalah untuk menunaikan ibadah haji,. Di Mekah, meskipun hanya menghabiskan beberapa minggu, namun mereka dapat berhubungan dengan orang-orang Nusantara yang setengah menetap di Mekah. Mereka menerima pandangan kota suci yang bersifat internasional dan secara tegas anti penjajahan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Hilmy Muhammadiyah dan Sulthan Fatoni. *op.cit.* hal: 110.

<sup>40</sup> *Ibid.* hal: 113.

## 2. 2. 2 Islam Moderat

Islam moderat merupakan suatu istilah yang menjadi sebuah terminologi baru dalam membahas wacana keislaman akhir-akhir ini. Merumuskan sebuah istilah atas suatu fenomena sosial bukan sebuah hal yang mudah. Islam moderat pada dasarnya hanya mengingatkan kembali mengenai sifat dasar Islam yang diperintahkan dalam al-Quran, dan ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi mempunyai karakter untuk selalu menolak untuk terjebak dalam pilihan yang ekstrem sehingga itulah yang menjadi akar dari istilah ‘moderat’ itu sendiri. Istilah moderat tidak dikuasai oleh Islam semata dan maknanya tidak dapat digantikan dengan istilah lain seperti ‘modernis’, ‘progresif’, dan ‘reformis’.<sup>41</sup>

Karakteristik Islam pada hakikatnya menurut Achmad Siddiq, ialah prinsip *tawassuth* (moderat, tetap berdiri di tengah), dan bertujuan Rahmatan Lil 'alamin. Dalam masalah keagamaan, *tawassuth* dapat diterjemahkan dengan bentuk menghindari fanatisme, seimbang dalam penggunaan akal dan wahyu. Konsep tersebut bertujuan untuk mengakomodasi Islam reformis dan tetap menjaga hubungan baik dengan tetangga yang abangan.<sup>42</sup>

Menurut Jhon L. Esposito, kaum muslim moderat tidak serta merta hanya mereka yang progresif, reformis, ataupun liberal, namun juga mereka yang konservatif dan tradisionalis. Kaum moderat di dalam Islam, layaknya di semua agama, merupakan

<sup>41</sup> Khaled Abou El Fadl. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*. Jakarta: Serambi, 2006. hal: 27.

<sup>42</sup> Martin Van Bruinessen. “Tradisi Menyongsong Masa Depan, Rekonstruksi Wacana Tradisionalis dalam NU.” dalam Greg Barton dan Greg Fealy (Ed.). *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan NU-Negara*. Yogyakarta: LKIS, 1997. hal: 151.

kelompok mayoritas atau arus utama (*mainstream*), yang mewakili beragam posisi keagamaan, politik, dan sosial-ekonomi. Seperti juga kaum moderat Yahudi dan Kristiani di seluruh dunia, namun juga terdapat aliran reformis, ultra ortodoks, atau fundamentalis. Kaum moderat adalah mereka yang hidup dan bekerja di dalam masyarakat dan melakukan perubahan dari bawah, kemudian menolak ekstrimisme dalam keagamaan, dan menganggap kekerasan atau terorisme sebagai suatu yang tidak sah.<sup>43</sup>

Menurut Hasyim Muzadi, istilah moderat dijelaskan seperti berikut:

“Hence, the moderates are different from the liberals or the fundamentalists. The liberals seek tolerance at the cost of gradually reducing faith. The liberals apply liberal thinking in religious matters without clear methodology. Hence it is often at the cost of fundamental principles, that amount to abandoning theological and ritual aspects of the religion. On the other hand, the fundamentalists view others with different faith as opposition and, even, animosity towards others. In a pluralistic society, fundamentalism and fanaticism are bound to create conflicts as there is no tolerance.”<sup>44</sup>

“oleh karena itu, istilah Moderat berbeda dari liberal atau fundamentalis. Kaum liberal menjadikan toleransi sebagai bahan untuk mengikis keimanan. Kaum liberal menempatkan kebebasan berpikir dalam hal keagamaan tanpa didukung pemahaman yang baik. Sehingga acap kali mengorbankan prinsip dasar akidah dalam beragama. Di sisi lainnya, kaum Fundamentalis memandang perbedaan akidah selayaknya permusuhan. Perbedaan akidah seakan membuatnya harus bermusuhan, dan bahkan menaruh dendam kepada yang berseberangan. Dalam masyarakat yang mejemuk, Fundamentalisme dan Fanatisme menjadi keterikatan dalam menciptakan konflik akibat tidak adanya toleransi.”

Dalam kutipan pidato tersebut, Hasyim Muzadi menegaskan bahwa nilai Moderat berbeda dengan pola pikir Liberalis ataupun Fundamentalis. Di kesempatan lain, Hasyim Muzadi juga menjelaskan bahwa Moderat berarti keseimbangan antara keimanan dan

<sup>43</sup> Muhamad Ali. “Gerakan Islam Moderat di Indonesia Kontemporer”. dalam Rizal Sukma dan Clara Joewono. (Ed.). *Gerakan dan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer*. Jakarta: CSIS, 2007. hal: 204.

<sup>44</sup> Hasyim Muzadi. Naskah Pidato Sekjen ICIS, di Praha, Republik Ceko. 27 Mei 2010. hal: 5.

toleransi. Sementara itu, dalam liberal, toleransi mereduksi keimanan, sedangkan Fundamentalis tidak memberi ruang untuk toleransi. Indonesia berada di garis Moderat, sehingga diterima oleh Barat dan juga Timur.<sup>45</sup>

NU telah membawa semangat Moderat dalam pergerakannya, sehingga wacana tersebut tidak hanya tercipta setelah tragedi 9/11. Justru hal ini telah menjadi watak khas umat muslim di Indonesia.<sup>46</sup> Dalam sebuah pidato ilmiahnya, Hasyim Muzadi menyampaikan bahwa NU telah berusaha sejak berdiri untuk mengimplementasikan ajaran Islam *Rahmatan Lil 'alamin*. NU juga mengembangkan sikap kemasyarakatan NU yaitu; *tawassuth* (moderat), *I'tidal* (tegak), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (seimbang), dan *tasyawur* (musyawarah). Pengembangan sikap dan pemikiran tersebut telah membuat NU sebagai organisasi yang besar, dan lebih khusus lagi mempunyai karakter kemasyarakatan yang khas. Dengan modal pemikiran para ulama yang mendirikan, NU telah menciptakan pergaulan yang luas pada ormas Islam lainnya, dan juga mewakili Islam di Indonesia. Salah satu yang dicatat sebagai prestasi NU ialah dengan turut membentuk Forum Lintas Agama dan Gerakan Moral Nasional (Gernalnas), yang diakui turut menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Lewat kinerja dan komitmen yang diakui itu, akhirnya NU dipercaya untuk mengkampanyekan ajaran Islam *Rahmatan Lil 'alamin* ke berbagai belahan dunia.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Hasyim Muzadi. "ICIS, Islam Moderat, dan Interfaith Dialogue." *Tabloid Diplomasi* 15 Juni-14 Juli. 2010. hal:12.

<sup>46</sup> Hasyim Muzadi. Berdasarkan wawancara. 13/05/2010.

<sup>47</sup> Hasyim Muzadi. "Islam Rahmatan Lil 'alamin Menuju Keadilan dan Perdamaian Dunia (Perspektif NU)." dalam Pidato Pengukuhan Doktor Honoris Causa. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2006. hal: 3.

## 2.3 Ahlussunnah Wal Jama'ah

### 2.3.1 Pengertian dan Kemunculannya

Kalimat “*Ahlussunnah wal Jamaah*” yang selanjutnya disebut Aswaja, dapat diterjemahkan sebagai berikut; pertama, kata ‘*ahl*’ bisa diartikan sebagai ‘pemeluk aliran’, bisa juga ‘pengikut mazhab’ (*ashhab al- madzhab*), jika dalam konteks aliran. Sedangkan Ibrahim Anis mengartikan ‘*ahl*’ dengan ‘keluarga besar’ atau ‘keluarga dekat’. Namun dia juga mengartikannya untuk mengelompokkan sebuah komunitas, *ahlussunnah* (sekelompok orang yang berpaham sunni). Kata ‘*ahl*’ berfungsi sebagai *badal al- nisbah* (kata yang berindikasi makna ‘asosiasi’), dalam gramatika Arab dikelompokkan dalam kata yang pemakaiannya tidak dapat berdiri sendiri. Kata tersebut baru dapat memberikan pemahaman ketika dirangkai dengan kata lain (*idlafah*). Hal itu bisa dilihat dalam kata; *ahl al-lughah* atau *lughawiy*.<sup>48</sup>

Kedua, kata ‘*al-sunnah*’, yang mempunyai arti ‘jalan’, yang terkadang dalam Al Quran digunakan sebagai penunjuk kepada hal-hal yang telah menjadi ketetapan Allah SWT. Pasca kelahiran Islam, term ‘*al-sunnah*’ mengalami perluasan makna, sehingga merujuk kepada segala sesuatu yang diserap dari ucapan dan tindakan Nabi yang diwartakan. Ketiga, kata ‘*al-jamaah*’, memiliki arti sekumpulan orang yang memiliki tujuan, dan kata ini tidak ditemukan dalam al- Quran. Kata ini hanya ditemukan pada beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dsb. Kata ‘*al-jamaah*’ hanya digunakan untuk kelompok *ahl al-sunnah*, karena kalangan *Khawarij* atau *Rafidhah* belum mengenal term *al-*

<sup>48</sup> Hilmy Muhammadiyah dan Sulthan Fatoni, *op.cit.* hal: 76.

*jamaah*, sementara *Mu'tazilah* menolak term tersebut karena tidak menerima konsensus para ulama sebagai suatu produk hukum.<sup>49</sup>

*Ahlussunnah wal Jamaah* dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, mempunyai pengertian pengikut sunnah dan golongan mayoritas. Maksudnya tidak lain dari mayoritas ulama dan umat Islam yang berpegang pada sunnah (perkataan, perbuatan, dan persetujuan) Nabi Muhammad, di samping berpegang pada kitab suci al- Quran. Ungkapan tersebut diketahui muncul sejak abad ke 10 M (4 H), ketika banyak teolog Asy'ariyah, Maturudiyah, serta ulama-ulama Hanbaliyah, banyak memakai istilah ini. Istilah ini kemudian merujuk kepada mayoritas ulama dan ummat yang hidup pada tiga abad pertama Hijriah, yang mereka nilai berpendidikan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad. Ketiga golongan teologi Islam tersebut juga mengaku sebagai bagian atau eksponen kaum *Ahlussunnah wal Jamaah*. Para pengikutnya mengikuti Nabi Muhammad yang tidak pernah mengkafirkan pelaku dosa besar, seperti yang dilakukan para Khawarij. Nabi tetap memandangnya sebagai mukmin yang fasik (berdosa), yang nasibnya di kahirat kelak ditentukan oleh Allah SWT. Atas dasar itu, baik kaum Asy'ariyah, Maturudiyah, dan Salafiyah, sejak abad ke 4 H menegaskan bahwa predikat *Ahlussunnah wal Jamaah* tersebut untuk ulama atau umat Islam yang hidup pada tiga abad pertama hijriah, dan juga menegaskan bahwa mereka adalah pengikut setia dan pantas pula menyandang predikat tersebut. Dewasa ini lazim

---

<sup>49</sup> Ibid. hal: 77.

muncul istilah kaum Sunni, yang maksudnya tidak lain dari kaum *Ahlussunnah wal Jamaah*.<sup>50</sup>

Sejarah '*Ahlussunnah wal Jamaah*' dalam pembentukannya telah mengalami berbagai fase historis yang membentuknya dari gelombang dan benturan satu sama lain hingga akhirnya menemukan titik keseimbangan dalam sebuah konsolidasi. Di masa awal Imperium Abbasiyah, Muktazilah mengklaim sebuah sistem nilai yang menguasai negara dengan kekuatan akal sebagai pedoman. Kemudian, al-Ghazali datang dengan tatanan harmonisasi antara agama, dunia, dan negara. Tatanan itu menempatkan 'agama' bukan 'akal' dalam kerangka *Ahlussunnah wal Jamaah*. Di masa awalnya, '*Ahlussunnah wal Jamaah*' merupakan kelompok ulama yang berniat menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* untuk melawan kaum Syi'ah, Muktazailah, dan Khawarij. Konsentrasi terhadap "ilmu dan ibadah", menjadi upaya dominasi dan menguasai, yang berarti ulama sekaligus menguasai arena sosial politik. Atau mengikuti konsep "*nizham ad-dunya*", dan "*nizham ad-din*" seperti yang dibawa oleh al-Ghazali, dan ini akan menjadi identitas pengikut Sunni dalam sejarah Islam di kemudian hari.<sup>51</sup>

Dalam perkembangan teologi Islam, *Ahlussunnah wal Jamaah* hanya sebuah *manhaj al-fikr* (pola pikir/paham), yang di dalamnya terdapat banyak aliran dan mazhab. Berbagai mazhab yang kontradiktif kemudian menyatu di dalam *Ahlussunnah wal Jamaah*, yang menjunjung 'delapan prinsip dasar hidup

<sup>50</sup> Harun Nasution. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992. hal: 76.

<sup>51</sup> Ahmad Baso. *NU Studies: Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*. Jakarta: Erlangga, 2006.hal: 89.

bermasyarakat'. Prinsip ini terdiri atas; *al-adalah* (keadilan), *al-syura* (musyawarah), dan *al-musawah* (persamaan derajat). Sedangkan *ushul al-khams* (lima prinsip) lainnya, untuk bersosialisasi di tengah masyarakat, yaitu; *hifdz al-din* (kebebasan beribadah), *hifdz al-nafs* (hak hidup), *hifdz al-mal* (hak milik), *hifdz al-'aql* (kebebasan berpikir), dan *hifdz al-'irdi wa al-nasl* (hak privasi).<sup>52</sup>

### 2. 3. 2 Ahlussunnah wal Jamaah dalam NU

Akar tradisional Islam di Indonesia, terletak pada Islam yang mempunyai corak khusus sebagai akibat penyesuaian dengan tradisi lokal di mana Islam tersebut berkembang dan dari madzhab yang mana ajaran Islam diperkenalkan. Kedua hal tersebut yang menjadi faktor penting dalam melihat tradisionalisme Islam di Indonesia. Islam tradisional ini merupakan akibat pandangan *Ahlussunnah wal Jamaah* yang fleksibel dan toleran sehingga masyarakat masih dapat mempertahankan tradisi pra Islam yang sudah mengakar. Mempertahankan tradisi mempunyai arti penting dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia pada waktu itu. Hal ini membuat kelompok tradisional Islam mampu menggalang pengikut yang cukup besar di pedesaan, dan berkembang menjadi gerakan tradisional Islam.<sup>53</sup>

Membaca tradisi pemikiran NU, maka kita akan membicarakan *Ahlussunnah wal Jamaah*. Paradigma tersebut bertumpu pada sumber ajaran Islam; 1) al- Quran, 2) al- Hadits, 3) al- Ijmak (kesepakatan antara mujtahid dari umat Islam atas syariat

<sup>52</sup> Ibid. hal: 91.

<sup>53</sup> H. Rozikin Daman, *op.cit.* hal: 25.

sesudah Nabi Muhammad wafat), dan 4) al-Qiyas (upaya seorang mujtahid dalam menganalogikan adanya kasus baru terhadap kasus lain berdasarkan adanya kemiripan kandungan hukum kasus baru dengannya). Pentingnya makna Aswaja pada NU dapat dilihat dalam fungsi utama NU untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan *Ahlussunnah wal Jamaah* dan menganut salah satu empat mazhab.<sup>54</sup>

Dalam bidang akidah (kalam), NU mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, yang dikenal sebagai pelopor *Ahlussunnah wal Jamaah*, hasilnya ialah keseimbangan di antara dalil naqli dan dalil aqli. Secara umum sistem al-Asy'ari dianggap Moderat dan efektif dalam menghimpun pengikut di dunia Islam. Letak keunggulan al-Asy'ari terletak pada sisi metodologisnya, yang dapat diringkas sebagai jalan tengah di antara berbagai ekstrimitas. Suatu jalan tengah di antara metode *harfi* kaum Hanbali, dan metode *takwil* kaum Mu'tazilah. Namun, karena al-Asy'ari lebih cenderung kepada Jabariyyah, antara pikiran al-Asy'ari dan Mu'tazilah dapat ditengahi oleh pikiran al-Maturidi. Pikiran al-Maturidi di kalangan NU masih kurang dibandingkan al-Asy'ari, hal ini dikarenakan masih kurangnya literatur tentang Maturidiyah yang rasional, dan warga NU lebih mudah untuk menyerap pikiran-pikiran tekstual al-Asy'ari.<sup>55</sup>

Tradisi pemikiran fiqih warga NU ialah mengikuti salah satu dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), dan hal ini juga dicantumkan dalam

---

<sup>54</sup> Mujamil Qomar, *op.cit.* hal: 62.

<sup>55</sup> Mujamil Qomar. *op.cit.* hal: 69.

Khitthah NU tahun 1984. Pemilihan keempat mazhab ini didasari oleh *manhaj* (metode berpikir) dan *aqwal* (ucapan-ucapan) para pendirinya tercatat secara lengkap dan rapi. Hal ini memberikan keuntungan, yaitu dapat diteliti dan dikoreksi kembali setelah berabad-abad diikuti kaum muslim, serta dapat dipertanggungjawabkan pada al- Quran dan Hadits. Dalam banyak hal NU menggunakan pendekatan fiqh dalam memecahkan suatu masalah. Namun dengan pendekatan fiqh itu pula, NU berhasil melewati berbagai masalah tanpa mengorbankan akidah sedikitpun.<sup>56</sup>

Di bidang tasawuf, NU mengikuti Imam Junaid al- Baghdadi, Imam al- Ghazali, dan imam lainnya yang sealaran. Karya monumental al- Ghazali yang berjudul *Ihya' 'ulum al- Din*, merupakan puncak dari tradisi sufisme Moderat yang bergerak pada abad ke 3 H dan 4 H. Baik Imam Junaid dan Imam Ghazali dianggap sebagai pembaharu tasawuf Moderat, yang meluruskan tasawuf berada dalam kendali Sunnah. Ciri yang paling utama dari ajaran mereka ialah, ajaran tasawuf harus selalu menempel pada ketentuan syariat, atau tasawuf merupakan tahap lanjut kehidupan orang-orang yang telah mantap syariatnya. Al- Ghazali membangun moderatisme di bidang pemikiran dan filsafat yang berdasarkan Mazhab Syafi'i di bidang fiqh, dan Mazhab Asy'ari di bidang akidah.<sup>57</sup>

Dalam ranah politik, NU yang menganut Sunni mengambil peran yang berpihak kepada 'substansi', namun tanpa menutup mata kepada 'realitas'. Dalam hal ini berarti mengutamakan 'keselamatan ummat', 'stabilitas politik', dan selalu

---

<sup>56</sup> Ibid. hal 70.

<sup>57</sup> Ibid. hal:80.

berkisar pada ‘tataran normatif’. Dengan menggunakan pendekatan gagasan yang persuasif, untuk menghindari gagasan yang radikal, maka Sunni memutuskan terlibat ke dalam “sistem”. Walaupun posisi tersebut berpotensi menimbulkan sifat yang pragmatis.<sup>58</sup> Pemikiran yang mempengaruhi tradisi politik Sunni dipengaruhi dua tokoh utama yaitu Abu Hasan al-Mawardi dan al-Ghazali. Karya al-Mawardi yang menjadi rujukan adalah *al-Ahkam al-Sulthaniyah* yang dianggap sebagai karya ilmiah pertama mengenai ilmu politik dan ketatanegaraan dalam sejarah Islam. Prinsip al-Mawardi mengenai kewajiban umat Islam untuk taat kepada pemimpin semakin diperjelas oleh al-Ghazali dalam karyanya *al-Iqtishad fi al-I’tiqad*. Karya al-Ghazali tersebut membahas hubungan antara kekuasaan politik (*sulthan*) untuk ketertiban dunia yang kemudian menjadi syarat ketertiban agama dan itu menjadi keberhasilan di akhirat.<sup>59</sup>

Dalam bidang perekonomian, Sunni juga memperlakukan bidang tersebut dengan khusus demi terciptanya keseimbangan dunia fisik dan metafisik. Allah SWT berfirman;

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashash : 77)<sup>60</sup>*

Menurut Sunni, substansi perekonomian dalam Islam adalah perwujudan kemakmuran dan keadilan seluruh masyarakat dengan menggerakkan sendi-sendi

<sup>58</sup> Hilmy Muhammadiyah dan Sulthan Fatoni. *op.cit.* hal: 136.

<sup>59</sup> Munawar Fuad Noeh dan Mastuki HS. *op.cit.*hal: 93.

<sup>60</sup> Bustani A. Gani. *Al- Quran dan Tafsirnya*. Jilid VII. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1991.hal 385.

perekonomian secara merata tanpa diskriminasi. Secara tegas, anti terhadap konglomerasi, yang memposisikan nasib kesejahteraan umat ditentukan oleh segelintir orang. Cara pandang tersebut merupakan dekonstruksi atas sistem kapitalisme yang memberikan kebebasan, dan hak kepemilikan terhadap seseorang secara tidak terbatas. Namun, di sisi lain juga tidak sejalan dengan gaya sosialisme yang menghilangkan hak individu dan menyerahkannya kepada negara. Sistem tersebut cenderung merugikan rakyat. Kemudian muncul sistem alternatif yaitu sistem ekonomi Moderat. Dengan prinsipnya yang mempunyai pengertian, otoritas negara tidak bisa menguasai bidang ekonomi secara mutlak dari hulu hingga hilir. Ada kebebasan dalam perekonomian, namun tanpa kehilangan kontrol negara di sektor perekonomian yang vital bagi rakyat banyak.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Hilmy Muhammadiyah dan Sultan Fathoni. *op.cit* hal. 138.

### BAB III

#### SEJARAH BERDIRINYA ICIS

Gagasan tentang terbentuknya ICIS dan peran aktifnya dalam menyuarakan wacana mengenai Islam Moderat sudah tentu tidak dapat kita lepaskan dari pemikiran yang berkembang di NU dan tokoh-tokohnya. Kuntowijoyo menjelaskan, pada dasarnya tidak ada perbuatan manusia yang terlepas dari pemikiran manusia itu sendiri, disadari maupun tidak, bahkan dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti seorang saleh yang tidak bisa lepas dari ide teologi agamanya atau sebaliknya bagi orang sekuler. Penekanan terhadap ide tersebut akan mengalami penguatan terhadap sebuah peristiwa bersejarah dan monumental. Demi sebuah idealisme, seorang patriot merelakan nyawanya (nasionalisme), pejuang muslim yang berjihad untuk tanah airnya (*hubb al-wathon minal iman*), ataupun bangsa Eropa yang menjelajah samudra (imperialisme).<sup>62</sup>

Pada bagian ini, penulis menggunakan sejarah pemikiran dalam menelaah proses lahirnya ICIS yang dibidani oleh tokoh NU, dan yang kemudian menciptakan keberadaannya sendiri. Bergulirnya ICIS selanjutnya mempunyai relevansi terhadap kondisi sosial politik maupun keagamaan pada masanya. Bahkan, yang mungkin belum umum diketahui adalah bagaimana ICIS juga mempunyai kegiatan reguler dan tidak hanya menunggu momentum. Ini merupakan bentuk nyata dari

---

<sup>62</sup> Kuntowijoyo, *op.cit.* hal: 189.

‘Internasionalisme NU’ ketika globalisasi semakin tidak terhindarkan di zaman yang semakin praktis ini.

### 3.1 Sejarah Berdirinya ICIS

Perang melawan terorisme pasca 9/11, pada dasarnya adalah perang antara AS dengan berbagai negara, terutama negara-negara di wilayah Timur-Tengah. Akan tetapi, dampak selanjutnya adalah, terorisme tersebut justru menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang juga tengah mengalami masa peralihan dari Orde Baru. Masa peralihan dengan judul reformasi tersebut menyebabkan peran negara dan elemen-elemennya menjadi lemah. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan terhadap masuknya nilai-nilai dan kepentingan asing. Aparatur negara tidak mempunyai kebebasan untuk melaksanakan tugasnya seperti ketika masa orde baru. Hal ini membuat para tokoh terorisme dan pemikirannya dapat berkembang di Indonesia dengan kedok dakwah keislaman.<sup>63</sup> Perkembangan radikalisme di Indonesia akhirnya mencapai puncaknya dengan peristiwa Bom Bali I dan II. Bahkan, pada peristiwa bom di Senen, Jakarta Pusat, di tahun 2000, telah terlihat kerja sama terorisme internasional dengan warga Malaysia.<sup>64</sup>

Dalam menghadapi terorisme, kita menghadapi ‘teror’ dan ‘isme’. ‘Teror’ harus dihadapi dengan *intelligent territorial* yang telah dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi, untuk masalah ‘isme’ yang berkarakter agama, solusi terbaik hanya bisa diperoleh dari pemikiran moderat yang berasal dari keseimbangan ilmu-ilmu dalam

---

<sup>63</sup> Hasyim Muzadi. “ICIS, Islam Moderat, dan Interfaith Dialogue.” dalam *Tabloid Diplomasi* 15 Juni-14 Juli. 2010. hal: 12.

<sup>64</sup> Hassan Wirajuda. Berdasarkan wawancara. 04/06/2010.

Islam. Ilmu-ilmu tersebut antara lain fiqih yang legal formal, dakwah yang *guiding* dan *counseling*, dan tasawuf yang memiliki nilai etis dan humanis. Setelah pemikiran yang moderat tersebut muncul, baru kemudian dilakukan penguatan yang mendapatkan perlindungan oleh negara untuk pemikiran-pemikiran moderat. Dengan demikian, harus dijelaskan bahwa tidak semua bentuk terorisme berlandaskan agama, karena terdapat faktor lain seperti perlawanan yang bersifat separatis, maupun kesenjangan perekonomian. Hal ini berarti terdapat faktor non-agama yang “diagamakan”. Untuk itu, harus ada kerjasama antara nilai agama yang moderat dengan kebijakan negara yang menjadi korban.<sup>65</sup>

Hal ini yang membuat Hasyim Muzadi, pada tahun 2003, berpikir untuk mengundang para ulama dan cendekiawan dari luar negeri untuk datang ke Indonesia. Keinginan ini memiliki dua tujuan, yang pertama yaitu untuk menyamakan persepsi, dan kedua adalah untuk bersama-sama menekan konflik global dalam forum yang diberi nama International Conference of Islamic Scholars (ICIS). Forum ini merupakan sebuah forum yang berlandaskan visi NU sebagai perkumpulan ulama yang bangkit bersama masyarakatnya. Ide tersebut kemudian dibawa oleh Hasyim Muzadi, yang juga menjabat sebagai Ketua Tanfidziyah PBNU, ke Menteri Luar Negeri RI, *Hassan Wirajuda*. Inisiatif untuk menggandeng Departemen Luar Negeri diambil agar moderasi pemikiran Islam dan aspek kebangsaan Indonesia dapat dipromosikan ke luar negeri. Dengan demikian, akan timbul konsep meng-Indonesia-

---

<sup>65</sup> Hasyim Muzadi. “Menangkal Terorisme Dengan Memberdayakan Pemikiran Moderat”. *Tabloid Diplomasi* 15 Desember-14 Januari. 2010. hal:17.

kan luar negeri, dan bukan sebaliknya.<sup>66</sup> Setelah mendapat dukungan dari Deplu, rencana ICIS dibawa kepada Megawati Soekarno Putri, selaku Presiden RI saat itu. Persetujuan dari Presiden dibutuhkan karena forum ini masih baru dan membutuhkan jaminan dari pemerintah untuk meyakinkan peserta forum agar datang ke Indonesia. Dukungan pemerintah ini menjadi bukti harmonisasi hubungan yang dimiliki oleh NU (agama) dan negara. NU sebagai model *civil society*, pada akhirnya akan bersinergi dengan negara sehingga tidak muncul ketegangan antara negara dan agama.<sup>67</sup>

Sejak awal, Hasyim Muzadi sudah menekankan konsep moderasi yang dimiliki oleh NU sebagai hasil proses yang menyeimbangkan tiga hal utama sebagai berikut:

a. Fikih dan Dakwah.

Dalam memahami Islam, NU tidak saja mengutamakan pendekatan teori fikih, namun ada konsep dakwah untuk mengembangkannya di sana. Dengan demikian, ada upaya-upaya yang persuasif dalam menyiarkan Islam dan meminimalisasi sikap-sikap arogan atau radikalisme yang tidak menguntungkan siapapun. Demarkasi antara muslim dan non-muslim itu harus seimbang dengan proses dakwah.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Hasyim Muzadi. "ICIS, Islam Moderat, dan Interfaith Dialogue." *op.cit.*

<sup>67</sup> Hasyim Muzadi. "Menangkal Terorisme Dengan Memberdayakan Pemikiran Moderat." *Tabloid Diplomasi* 15 Desember-14 Januari. 2010. hal: 17.

<sup>68</sup> Dalam konteks hubungan dalam masyarakat plural seperti indonseia, NU harus bisa menjaga keharmonisan sosial. NU memilah-milah implementasi pendekatan dakwahnya, yaitu: (1) fiqih al-ahkam, dalam rangka menentukan hukum fikih dan ini berlaku untuk umat yang telah siap melakukan hukum positif Islam. (2) Fiqih dakwah dalam rangka mengembangkan agama di kalangan masyarakat luas yang beraneka ragam sehingga pendekatannya tidak menggunakan pendekatan fiqih yang legal-formal, namun melalui pembinaan (*guiding and counseling*). (3) Fiqih Siyasah, bagaimana membawakan hubungan agama dengan politik dan kekuasaan negara. Lihat Hasyim Muzadi. "Khilafah Versus Demokratisasi." (<http://:khilafah1924.org>). Diunduh pada 20/05/2010.

b. Amar ma'ruf dan Nahi mungkar.

Dalam menyampaikan kebaikan dan mencegah yang jahat, NU mengambil jalur persuasif dengan tujuan penyadaran bukan menghakimi. Dengan demikian, tercipta suatu hubungan sosial yang nyaman dalam bermasyarakat tanpa adanya teror dan ketakutan.

c. Agama dan Negara.

Orang NU sebagai umat Islam harus menjalankan syariat Islam. Akan tetapi, sebagai Warga Negara Indonesia yang banyak diantaranya bukan orang Islam, hubungan agama dan negara disikapi sebagai hubungan substansial yang inklusif.

Dari hasil penelusuran di lapangan, penulis menemukan fakta bahwa ide kemunculan ICIS sangat diilhami dari buah pikiran Hasyim Muzadi yang dibicarakan kepada (Alm) Rozy Munir sebagai Ketua Bidang Luar Negeri di PBNU.<sup>69</sup> Akhirnya, Rozy Munir dipercaya untuk menjadi Ketua Panitia pada perhelatan ICIS tahun 2004 dan 2006, hingga saat ia menjabat sebagai Duta Besar RI di Qatar dan jabatan sebagai Ketua Panitia diserahkan kepada Masykuri Abdillah. Dengan demikian, praktis hanya kedua tokoh tersebut yang paham dengan seluk beluk kehadiran ICIS. Oleh karena itu, penulis mendapat hambatan untuk menggali informasi setelah meninggalnya Rozy Munir beberapa waktu yang lalu. Bahkan, ketika penulis mendatangi sekretariat ICIS di PBNU, penulis tidak terbantu dalam mendapatkan data administrasi terbentuknya ICIS. Hasyim Muzadi mengatakan kepada penulis bahwa bergulirnya ide pembentukan ICIS merupakan hasil diskusi informalnya bersama Rozy Munir dan Hassan Wirajuda.<sup>70</sup> Dari sini, hasil pembicaraan tersebut kemudian digulirkan ICIS I

<sup>69</sup> Hassan Wirajuda. Berdasarkan wawancara. 04/06/2010.

<sup>70</sup> Hasyim Muzadi. Berdasarkan wawancara. 13/05/2010.

pada 23-25 Februari 2004 yang dihadiri oleh 174 peserta dari dalam dan luar negeri. Para peserta hadir dalam kapasitasnya sebagai ulama, akademisi, cendekiawan, utusan-utusan kedutaan, dan tokoh pesantren. Dalam perjalanan selanjutnya, disusul oleh ICIS II pada tahun 2006 dan ICIS III pada tahun 2008.

Mengenai format hubungan antara ICIS dan NU, Hasyim Muzadi menyatakan bahwa ICIS tidak berada di dalam struktur PBNU. Keduanya hanya dihubungkan oleh kesamaan ide. Akan tetapi, Hasyim Muzadi dengan sengaja tidak meletakkan ICIS di bawah struktur NU. Hal ini bertujuan agar ICIS mempunyai hubungan yang 'longgar' dengan kepengurusan PBNU, sekaligus membuktikan bahwa ICIS bersifat mandiri dan tidak memiliki ikatan dengan lembaga lainnya. Hasyim Muzadi yang dipilih sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) ICIS, dalam ICIS I pada tahun 2004, mempunyai jabatan yang terpisah dari struktur PBNU. Jabatan tersebut hanya bisa diganti melalui sidang pleno ICIS.

### 3. 3. 2 Fondasi Pemikiran ICIS

Berdirinya ICIS mempunyai empat dasar yang dijelaskan oleh Hasyim Muzadi<sup>71</sup> sebagai berikut:

Pertama, sebagai wadah untuk menyampaikan Islam yang moderat dalam kerangka *Rahmatan Lil 'alamin* tanpa melihat sekte ataupun alirannya. Di sini yang

---

<sup>71</sup> Dikutip dari kolom "Taushiyah Cak Hasyim Muzadi." *Duta Masyarakat*. 21/06/2006. dalam *ICIS II Dalam Liputan Media* (Kumpulan kliping media). Rozy Munir (Ed). Jakarta. 2006. hal: 50.

dilihat hanya kesamaan visi, karena nilai moderat dapat dimiliki oleh semua aliran. ICIS memiliki pengertian mengenai nilai Moderat yaitu keseimbangan antara keimanan dan toleransi. Bahkan, toleransi di sini juga dalam batasan seperti yang diinginkan oleh agama.

Kedua, ICIS bertujuan untuk menjembatani hubungan Timur dan Barat, karena dalam pendikotomian Timur dan Barat seringkali merugikan kedua belah pihak. Pendikotomian tersebut akan semakin terasa bagi pihak yang minoritas dalam suatu wilayah. Kecenderungan konflik akan semakin tinggi. Melalui ICIS, kebijakan suatu negara, khususnya Barat, akan dipilah dari unsur agama atau unsur ekonomi dan politik. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kita tidak bisa menyamakan peran dan fungsi agama di suatu negara, terutama di negara sekuler yang cenderung meminimalisasi peran agama dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya dapat kita lihat ketika terjadi tragedi 9/11 di AS, NU dengan segera menyatakan ungkapan simpati kepada pemerintah dan masyarakat AS. Namun sebaliknya, ketika pemerintah AS menginvasi Afghanistan dan Irak, NU juga dengan segera mengutuk serangan tersebut dan menggalang kekuatan internasional untuk menghentikannya.

Ketiga, ICIS mencoba untuk mengatasi berbagai konflik pada umat Islam di dunia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya wawasan keagamaan dalam masyarakat. ICIS berusaha menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di Irak, Afghanistan, ataupun Pakistan dengan sebuah penyelesaian yang sistemik. Hal ini disadari oleh NU yang sebelum berdirinya ICIS telah turut terlibat dalam menyelesaikan konflik di Thailand Selatan. NU menguraikan faktor penyebab kekerasan yang terjadi pada

masyarakat muslim di Thailand Selatan tersebut mulai dari masalah kurikulum pengajaran hingga diskriminasi politik bagi minoritas muslim disana.

Keempat, ICIS bertujuan untuk memperbaiki bidang perekonomian, pendidikan, dan kebutuhan sosial lainnya yang mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu, dalam forum ICIS peserta akan dibagi menjadi beberapa komisi yang masing-masing membahas Islam *Rahmatan Lil 'alamin*, masalah perekonomian, atau resolusi konflik. Komisi ini akan menjadi nilai tambah bagi keberadaan ICIS karena tema yang dibahas disesuaikan dengan kondisi negara peserta forum.

Keunggulan lain dari ICIS adalah sebagai forum yang merupakan satu-satunya forum di dunia yang melibatkan ulama dari berbagai aliran. Bahkan, ada pula ulama yang hadir dari kalangan non-Islam. Hal tersebut dimungkinkan karena ICIS membuka dirinya terhadap semua cendekiawan yang mempunyai ketertarikan terhadap Islam. Hasyim Muzadi mengatakan, para cendekiawan merupakan pihak yang potensial untuk digandeng karena naluri mereka untuk menggunakan akal sehat dan bebas kepentingan. ICIS berbeda dari konferensi lainnya (di kawasan Arab) yang masih terkotak-kotak oleh perbedaan mazhab yang dianut negaranya, serta berbeda dengan OKI yang beranggotakan negara-negara Islam namun seringkali tidak bisa lepas dari pengaruh hegemoni AS. ICIS, di lain pihak, tidak dibatasi oleh mazhab dan berorientasi pada *people to people diplomacy* di level masyarakat.<sup>72</sup>

Menurut Masykuri Abdillah, keperluan NU dalam mengadakan ICIS mempunyai beberapa pertimbangan yaitu:

---

<sup>72</sup> Ibid.

Pertama, diarahkan untuk Islam sendiri secara umum di dunia. Untuk menjadi sebuah *image building* melalui konsep Islam *rahmatan lil alamin*, jangan biarkan masyarakat dunia hanya melihat umat muslim sebagai pejuang-pejuang di Palestina atau sebagai mujahidin. Tapi juga harus dilihat keragaman (umat Islam) di Indonesia. Dengan demikian, dunia menjadi tahu bahwa Islam itu berwarna-warni. Tidak semua hal mengenai Islam harus mengenai kekerasan atau anti demokrasi.

Kedua, dari sisi Indonesia, NU merasakan komunikasi di antara umat muslim Indonesia dan muslim di luar negeri masih sangat minim. Sementara itu, masyarakat di luar negeri mengetahui tentang umat Islam di Indonesia, namun dengan pemahaman yang kurang baik. Masih banyak ulama (Timur Tengah) yang menganggap Islam di Indonesia sebagai Islam yang lain dalam konotasi yang negatif. Mereka menganggap Islam di Indonesia sebagai sinkretisme sehingga mutlak membutuhkan penjelasan bahwa ibadah yang dilakukan di Indonesia memang berdasarkan pada mazhab yang diakui. Oleh karena itu, dirasakan bahwa forum yang mewadahi, khususnya untuk ulama, masih sangat kurang. Hal ini tidak bisa dilakukan dalam sebuah kunjungan singkat. Untuk itu, ICIS didirikan sebagai forum komunikasi agar ulama-ulama di Indonesia bisa berhubungan dengan pihak luar negeri, dan ulama di luar negeri juga dapat memahami karakter Islam yang sebenarnya secara langsung. Pada akhirnya, mereka mengerti bahwa tidak ada perbedaan antara Islam yang dilaksanakan di Indonesia maupun di wilayah lain karena mereka berpedoman pada kitab yang sama.

Ketiga, banyak masukan dari para pengamat yang melihat permasalahan di dunia sangat merugikan (umat Islam). Kenyataannya, mayoritas penduduk di Indonesia

beragama Islam. Hal tersebut menyebabkan munculnya tuntutan dari kalangan intelektual dalam dan luar negeri agar tokoh Islam dan pemerintah Indonesia dapat berperan lebih besar dalam menyelesaikan masalah-masalah di negara yang dihuni oleh umat muslim.<sup>73</sup>

Ketiga faktor tersebut mendasari NU untuk bergerak melalui ICIS. NU dapat turut terlibat secara aktif dengan didukung faktor moderasi sehingga ia bisa menyuarakan semangat kerukunan umat beragama di Indonesia ke negara lainnya. Hal itu diakui oleh semua pihak, dan merupakan suatu hal yang progresif. Tidak ada diskriminasi terhadap agama di Indonesia karena semuanya mempunyai hari besarnya masing-masing secara nasional. Hal tersebut disampaikan oleh pihak (Deplu) Jerman yang kagum dengan adanya hari besar masing-masing agama yang diakui menjadi hari besar nasional, sesuatu yang tidak mungkin terjadi di Jerman. Walaupun masih terdapat konflik di Indonesia, hal itu dianggap tidak terlalu signifikan dibanding kerukunan yang tercipta. Inilah yang membuat Indonesia diminta untuk berperan aktif dalam penyelesaian konflik yang terjadi di negara lainnya yang berpenduduk Islam.<sup>74</sup>

Bagi Hasyim Muzadi, konsep Islam *Rahmatan Lil 'alamin* yang berorientasi terhadap keadilan dan perdamaian dunia mempunyai beberapa landasan, yaitu:

Pertama, Hasyim Muzadi mempunyai tanggung jawab moral dalam menjabat sebagai Ketua PBNU dari tahun 1999. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa ia mendapat amanah dari sebuah ormas Islam terbesar di Indonesia. NU telah sejak lama mengimplemetasikan ajaran Islam *Rahmatan Lil 'alamin* dengan didukung sikap

---

<sup>73</sup> Masykuri Abdillah. Berdasarkan wawancara. 20/05/2010.

<sup>74</sup> *Ibid.*

*tawassuth, i'tidal, tasamuh, dan tawazun.* Dengan nilai-nilai tersebut, NU berhasil menciptakan hubungan yang kondusif dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia yang plural, sehingga sejak era 90-an NU telah menjadi representasi kondisi sosial beragama di Indonesia di dunia internasional, dan semakin dikembangkan dalam kepemimpinan Abdurrahman Wahid.

Kedua, semakin maraknya ketakutan terhadap Islam yang selama ini menguasai perspektif masyarakat Barat dalam memandang dunia Islam menyuburkan ketegangan di antara dua kubu, dan berujung pada peristiwa 9/11(2001) di AS. Seketika itu juga, Presiden George W. Bush menuduh Osama bin Laden sebagai penyebab serangan tersebut. Tuduhan terhadap Osama kemudian tergeneralisasi sehingga timbul pencitraan yang menuding pelaku terorisme adalah umat Islam.

Ketiga, Hasyim Muzadi sebagai ketua PBNU, menyadari posisi NU sebagai bagian pembangunan perdamaian dunia secara fisik (infrastruktur) dan moral yang terintegrasi akibat globalisasi. Dalam hal ini, agama jelas mempunyai peran yang signifikan, terutama setelah tahun 1960-an dengan lahirnya Konferensi Agama Dunia untuk Perdamaian (WCRP) di Jepang. Bahkan pada perkembangannya, Hasyim Muzadi diangkat menjadi salah satu presidennya di tahun 2006. Hal ini semakin memperkuat hubungan dan pengakuan masyarakat internasional untuk NU dalam proses perdamaian dunia dengan pendekatan keagamaan.

Keempat, untuk menciptakan basis nilai dan pendekatan dalam mewujudkan perdamaian dunia, berarti dibutuhkan kesadaran dalam infrastruktur perdamaian dunia bahwa keamanan tidak mungkin terjadi di suatu komunitas tanpa menjamin keamanan untuk komunitas lainnya. Prinsip ini hanya akan terwujud dalam basis

pemikiran keagamaan yang moderat. Oleh karena itu, dunia Islam harus mengedepankan visi Islam yang *Rahmatan Lil 'alamin* sebagai sebuah paradigma.<sup>75</sup>

Wacana Islam Moderat yang dipilih oleh Hasyim Muzadi pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang menjadi cara pandang NU dalam 'Empat Sikap Kemasyarakatan NU' yaitu : *tawassuth*, *tasammuh*, *tawazun*, dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sikap ini dijelaskan oleh KH. Abdul Mucith Muzadi<sup>76</sup> sebagai berikut:

a) Sikap *Tawassuth* dan *I'tidal*

*Tawassuth* dan *I'tidal* merupakan sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan bersama. NU dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat *tatharruf* (ekstrim).

b. Sikap *Tasamuh*

*Tasamuh* merupakan sikap toleran terhadap perbedaan, baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat *furu'* atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.

c. Sikap *Tawazun*

*Tawazun* adalah sikap seimbang dalam berkehidupan (*khidmah*), menyerasikan kepada Allah SWT, *khidmah* kepada sesama manusia, serta kepada lingkungan hidupnya. Menyelenggarakan kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang.

<sup>75</sup> Hasyim Muzadi. "Islam Rahmatan Lil 'alamin Menuju Keadilan dan Perdamaian Dunia." dalam *Pidato Pengukuhan Doktor Honoris Causa*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2006. hal: 3.

<sup>76</sup> KH. Abdul Mucith Muzadi, *op.cit.* hal: 27.

d. *Amar ma'ruf nahi Munkar*

*Amar ma'ruf nahi munkar* artinya selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.



## **BAB IV**

### **PARA TOKOH DALAM ICIS**

Dalam bab empat ini, penulis akan menjelaskan para tokoh utama yang memberikan sumbangan pemikiran bagi lahirnya ICIS. Dipilihnya para tokoh yang dimunculkan dalam penelitian ini tidak lantas bermaksud mengecilkan peran aktor-aktor lainnya yang turut berkontribusi dalam perjalanan ICIS. Para tokoh yang dipilih di sini memiliki sumbangan yang signifikan sejak munculnya ICIS hingga kini. Mustahil membayangkan kehadiran ICIS tanpa peran serta dari mereka yang mempunyai visi melampaui negara dan bangsa. Mereka yang terpilih ialah; Hasyim Muzadi, Masykuri Abdillah, dan Hassan Wirajuda.

#### **4. 1. Tokoh Pendiri**

##### **4. 1. 1 Ahmad Hasyim Muzadi**

###### **4. 1. 1. 1 Biografi Intelektual**

Ahmad Hasyim Muzadi lahir di Bangilan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada 8 Agustus 1944. Orangtuanya bernama Muzadi dan Rummyati. Hasyim Muzadi merupakan anak ketujuh dari delapan bersaudara. Salah satu kakaknya, Abdul Mucith Muzadi, juga merupakan tokoh NU. Pada usia enam tahun, Hasyim Muuzadi memulai masa pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah, Bangilan. Saat ia kelas lima, pendidikan dilanjutkan ke SDN Bangilan, namun hanya butuh dua bulan untuknya dapat langsung ke SMP Negeri di Tuban karena pada masa itu para siswa

yang dianggap mampu mengikuti pelajaran tingkatan di atasnya, diizinkan untuk “lompat” kelas. Lulus SMP, ia dikirim ke Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo. Di sini, ia tinggal dan belajar bersama Nurcholis Madjid (mantan Rektor Universitas Paramadina), Din Syamsudin (saat ini menjabat sebagai Ketua PP. Muhammadiyah), dan banyak rekan lainnya yang kelak menjadi pejabat penting. Setelah lulus dari Gontor pada tahun 1963, ia melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Malang hingga lulus tahun 1967. Selain itu, ia juga mendapat pendidikan informal dengan berguru di Pondok Pesantren Al Anwar, Lasem, Jawa Tengah dan mendapat ilmu dari kiai sepuh NU yaitu Kiai Abdullah Faqih dari Langitan, Tuban, dan Kiai Anwar dari Bululawang, Malang.<sup>77</sup>

Sebagai warga NU, ia juga aktif di organisasi NU mulai dari anggota dan kemudian menjadi ketua ranting di Bululawang. Ia juga aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) hingga menjadi ketua PMII cabang Malang, Ketua Pengurus Cabang GP Malang, Ketua Pengurus wilayah GP Ansor Jawa Timur, lalu menjadi sekretaris dan wakil ketua Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Timur, dan akhirnya mendapatkan amanah sebagai ketua PWNU Jawa Timur pada tahun 1992. Akhirnya, pada tahun 1999 ia menjadi orang nomor satu di PBNU dengan menggantikan Gus Dur yang berhasil memenangi pemilu bersama Megawati. Di samping itu, tentu saja KH. Hasyim Muzadi didaulat untuk menjadi Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) pada tahun 2004, dan juga disusul amanah sebagai anggota Commission of Eminent Persons (CEP) Organization of Islamic Conference (OIC)

---

<sup>77</sup> H.A. Hasyim Muzadi. *Membangun NU Pasca Gus Dur (Dari Sunan Bonang sampai Paman Sam)*. Jakarta: Grasindo, 1999. hal: 3.

pada tahun 2006. Tidak hanya sampai di situ, ia juga aktif sebagai anggota Majelis Pelaksana Muslim World League pada tahun 2006, dan menjadi Presiden World Conference of Religions for Peace (WCRP) pada tahun yang sama.<sup>78</sup>

#### 4. 1. 1. 2 Pemikiran Tentang ICIS

Hasyim Muzadi merupakan tokoh utama dalam keberadaan ICIS, baik di belakang layar maupun di dalam forum tersebut. Ia yang dibantu Almarhum Rozi Munir, sebagai Ketua Bidang Urusan Luar Negeri PBNU, memroses dan menyebarkan nilai-nilai NU ke mancanegara dalam menjawab tantangan global saat itu. Hasyim yang saat itu juga menjabat sebagai Ketua Umum PBNU merasa terpanggil untuk mensyi'arkan nilai-nilai NU dalam ranah internasional secara lebih teroganisasi. Dikatakan lebih teroganisasi karena menurut Hasyim, sejak dulu para ulama Indonesia telah merintis apa yang disebut globalisasi saat ini. Hal ini terbukti dengan adanya Jaringan Ulama Nusantara-Timur Tengah pada abad ke 17, yang di antara tokohnya adalah Muhammad Yusuf al-Makassari atau Syekh Yusuf (1627-1699)<sup>79</sup>, yang kemuian disebut sebagai “*founder of Islam in South Africa*”. Syekh Yusuf menjadi ikon Islam di Afrika Selatan. Makamnya disebut sebagai “Karamat Syekh Yusuf”. Syekh Yusuf dan keturunannya dikenal dengan “*The Cape Malays*” atau warga keturunan Indonesia Cape Town, di ibu kota Afrika Selatan tersebut.

<sup>78</sup> Hasyim Muzadi. “Islam Rahmatan Lil 'alamin Menuju Keadilan dan Perdamaian Dunia (Perspektif NU).” *op.cit.* hal: 50.

<sup>79</sup> Muhammad Yusuf al Makassari atau Syekh Yusuf, ialah seorang ulama asal Makasar yang menuntut ilmu di Mekkah dan Madinah. Kemudian beliau kembali ke nusantara dan berjuang bersama Sultan Agung Tirtayasa (1651-1683) melawan Belanda di Banten. Kemudian beliau ditangkap bersama 49 pengikut dan keluarganya, lalu diasingkan Belanda ke Sri Lanka (1684), dan Cape Town (1693). Lihat Azyumardi Azra. *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Kencana, 2004. hal: 260.

Dalam sejarah Islam di Afrika Selatan, Syekh Yusuf dan para pengikutnya, serta para ulama lainnya yang sengaja dibuang penjajah Belanda ke Cape Town, dikenal sebagai pembawa Islam di wilayah tersebut.<sup>80</sup>

Sikap untuk memperkenalkan NU kepada dunia juga dilakukan oleh Gus Dur yang dikenal dengan nilai-nilai pluralismenya<sup>81</sup>. Kesadaran untuk berorientasi dalam kerangka internasional tersebut sudah mulai dirintis sejak Hasyim menjabat sebagai Ketua PWNU Jawa Timur. Pada pertengahan 1998, ia berkunjung ke Amerika Serikat dan melakukan serangkaian diskusi dengan sejumlah tokoh LSM dan agama. Program kunjungan internasional tersebut bertema, “Peranan LSM dalam memajukan pendidikan masyarakat dan membangun demokrasi”. Kunjungan tersebut disponsori oleh *The United States Information Agency* (USIA) dan *Institute of International Education* (IIE). Hal ini sesuai dengan visinya yaitu membangun NU sebagai jami’yyah dan jamaah mandiri, dikelola profesional dengan dukungan SDM yang mumpuni, serta memiliki jaringan luas di dalam dan luar negeri.<sup>82</sup>

Konsep Islam moderat yang dibawa NU ke ICIS pada dasarnya merupakan nilai-nilai dari pengalaman panjang NU dalam membangun kehidupan beragama di antara keberagaman masyarakat Indonesia. Terdapat tiga keseimbangan yang dikemukakan oleh Hasyim sebagai landasan nilai moderat NU di Indonesia yaitu; (1) keseimbangan hubungan antara fikih dan dakwah, (2) keseimbangan hubungan antara amar ma’ruf dan nahi mungkar, dan (3) keseimbangan hubungan antara agama dan

---

<sup>80</sup> Azyumardi Azra, artikel “Capetown, Melayu Indonesia.” dalam *Kompas*. 12 Juni 2010. hal: 1.

<sup>81</sup> [www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com). Diunduh pada 07/05/2010.

<sup>82</sup> H.A. Hasyim Muzadi. *Membangun NU Pasca Gus Dur (Dari Sunan Bonang sampai Paman Sam)*. *op.cit.* hal: xxxii.

negara. Hal ini menyebabkan sistem moderasi yang terdapat dalam ajaran agama, nilai sosial, serta tata hubungan agama dan negara menjadi pilar dari NKRI. Jika saja NU mengambil sikap untuk menghadapi agama dan negara, bisa dipastikan tidak akan tercipta keamanan dan persatuan di Indonesia. Ketiga hal tersebut dipelihara oleh NU sejak pertama kali berdiri, karena pada dasarnya orang Indonesia berwatak moderat. Nilai-nilai yang disebut radikalisme, fundamentalisme, maupun ekstrimisme merupakan karakter impor dari luar negeri yang merupakan istilah pemberian kaum orientalis barat.<sup>83</sup>

Tiga keseimbangan tersebut kemuiian diterjemahkan oleh Hasyim Muzadi dalam tiga ‘kerangka teori’ yang dijelaskannya di hadapan Senat IAIN Sunan Ampel<sup>84</sup> sebagai berikut:

1) **Islam *Rahmatan Lil 'alamin***

Pemahaman NU mengenai Islam moderat berarti mempunyai fondasi ajaran Islam *Rahmatan Lil 'alamin* yang telah mempunyai pemahaman kuat dalam al-Qur'an dan al-Hadits, serta sejarah Islam klasik maupun abad pertengahan. Islam dikatakan Hasyim Muzadi sebagai ‘damai’, sedangkan *Rahmatan Lil 'alamin* berarti ‘rahmat bagi semesta alam’. Dengan demikian, dapat diterjemahkan sebagai Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam.

---

<sup>83</sup> Ahmad Baso. *op.cit.* hal: 397.

<sup>84</sup> Hasyim Muzadi. “Islam Rahmatan Lil 'alamin Menuju Keadilan dan Perdamaian Dunia (Perspektif Nahdlatul Ulama).” *op.cit.* hal: 5.

*Rahmatan Lil 'alamin* merupakan istilah yang terdapat di al-Quran, yaitu;

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*)”. (Q.S al Anbiya’:107)<sup>85</sup>

Ayat tersebut menegaskan, jika Islam dijalankan dengan benar, dengan sendirinya akan mendatangkan rahmat, baik itu untuk umat muslim ataupun untuk seluruh alam. Rahmat adalah karunia, yang dalam ajaran agama terbagi menjadi dua, rahmat dalam konteks ‘rahman’ yang bersifat *amma kulla syai’*, meliputi segala hal, yang berarti orang-orang non-muslim pun mempunyai hak kerahmanan, sedangkan ‘rahim’ adalah kerahmatan Allah SWT yang hanya diberikan kepada orang Islam, sehingga sifatnya *khoshshun lil muslimin*. Dengan demikian, berlaku hukum *sunnatullah*, baik muslim maupun non-muslim, kalau mereka melakukan hal-hal yang diperlukan oleh kerahmanan, mereka akan mendapatkannya.<sup>86</sup>

Entitas Islam sebagai *Rahmatan Lil 'alamin* mengakui eksistensi pluralitas, karena Islam memandang pluralitas sebagai *sunnatullah*, yaitu fungsi pengujian Allah SWT pada manusia, fakta sosial, dan rekayasa sosial (*social engineering*) kemajuan umat manusia. Pluralitas, sebagai *sunatullah* telah banyak iabadikan dalam al-Quran, seperti dalam firman Allah SWT yang maknanya :

<sup>85</sup> Bustani A. Gani. *op.cit.* Hal 337.

<sup>86</sup> Hasyim Muzadi. “Islam Rahmatan Lil 'alamin Menuju Keadilan dan Perdamaian Dunia (Perspektif Nahdlatul Ulama).” *op.cit.* hal: 5.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui” (QS. Ar Rum: 22)<sup>87</sup>

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS al Hujurat : 13)<sup>88</sup>

Ayat-ayat tersebut menempatkan kemajemukan atau pluralitas sebagai syarat determinan (*conditio sine qua non*) dalam penciptaan makhluk. Tidak hanya itu, dalam al Quran juga banyak ayat yang menyerukan perdamaian dan kasih sayang. Seperti dalam surat yang mempunyai makna sebagai berikut :

“Sesungguhnya orang-orang yang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (QS. Al Hujurat : 10).<sup>89</sup>

Benang merah yang muncul disini ialah adanya perintah untuk mewujudkan perdamaian, semua orang harus merasa bersaudara. Achmad Siddiq, Rais ‘Aam PBNU era 1980an, menjelaskan terdapat tiga bentuk persaudaraan (*ukhuwwah*) yang umat muslim harus pahami. Pertama, *ukhuwwah Islamiyah*, dalam pengertian persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar keagamaan (Islam), baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional. Kedua, *ukhuwaah wathaniyyah*, yaitu persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kebangsaan. Ketiga, *ukhuwah basyariyyah*, yaitu persaudaraan yang tumbuh atas dasar kemanusiaan. Oleh karena itu, ketiga macam

<sup>87</sup> Bustani A. Gani. *op.cit.* hal: 549.

<sup>88</sup> Bustani A. Gani. *op.cit.* Jilid IX. hal: 441.

<sup>89</sup> Bustani A. Gani. *op.cit.* hal: 427.

*ukhuwah* ini harus dimengerti dan dijalankan secara berimbang, dan tidak boleh dipertentangkan, sehingga dengan ketiga bentuk *ukhuwah* itu konsep *Rahmatan Lil 'alamin* akan dapat terealisasi. Tidak hanya itu, lanjut Ahmad Siddiq, persaudaraan '*inda al Islam* (versi Islam) bukanlah sebuah persaudaraan yang eksklusif, terbatas hanya pada umat Islam saja. Namun itu adalah sebuah persaudaraan yang luas, bahkan termasuk orang ateis sekalipun, selama mereka tidak berniat memusuhi Islam.<sup>90</sup>

Kemudian NU mengimplementasikan Islam *Rahmatan Lil 'alamin* dengan pendekatan *tawassuth* dan *i'tidal* yang dikongkritisasikan kedalam sikap *nahdliyah*. *Tawassuth* atau garis tengah ialah cara menampilkan agama secara kontekstual, sedangkan *I'tidal* menyangkut kebenaran kognitifnya. Dari penggabungan tersebut maka didapatkan pengertian Islam yang tepat dan benar, kemudian dibawakan secara metodologi yang benar pula. Atau suatu sikap yang mengambil posisi di tengah, namun jalannya lurus. Selanjutnya *tawassuth* dan *i'tidal* melahirkan langkah lanjutan yaitu *tasamuh* (toleran), *tawazun* (berimbang), dan *taysawur* (musyawarah/ialog). *Tasamuh* dalam pengertian keseimbangan antara prinsip dan penghargaan kepada prinsip orang lain, sehingga tidak muncul sikap eksklusif pada diri. Dan ini akan berlanjut dengan sikap *tawazun*, dan *tasyawur*.

---

<sup>90</sup> Munawar Foead Noeh dan Mastuki HS (Ed.). *Menghidupkan Ruh Pemikiran KH. Achmad Siddiq*. *op.cit.* hal: 15.

## 2) **Fikrah Nahdliyah dan Sikap Kemasyarakatan NU**

Reformulasi *Fikrah Nahdliyah* dimaksudkan untuk menjaga nilai-nilai historis dan tetap meneguhkan garis-garis perjuangan Khittah 1926, serta menjaga konsistensi warga NU agar berada dalam koridor yang ditetapkan organisasi. Sehingga *Fikrah Nahdliyah* merupakan kerangka berfikir yang didasarkan pada *ahlussunnah wal jamaah*, yang dijadikan landasan berfikir untuk menentukan arah perjuangan dalam rangka memperbaiki umat. Dalam merespon permasalahan baik mengenai isu keagamaan maupun kemasyarakatan, NU memiliki *manhaj* sebagai berikut : pertama, dalam bidang aqidah/teologi mengikuti pemikiran *ahlussunnah wal jamaah*, khususnya pemikiran Abu Hasan al Asy'ariy dan Abu Mansur al Maturidiy. Kedua, dalam bidang fikih/hukum Islam, bermahdzab *qauliy* dan *manhajiy* kepada *al madzahib al Arba'ah*. Ketiga, dalam bidang tasawuf, mengikuti Syekh Junaid al Baghdadiy dan Abu Hamid al Ghazaliy.

Kemudian ciri-ciri kader yang mempunyai *Fikrah Nahdliyah* ialah sebagai berikut : pertama, *Fikrah Tawassuthiyyah* (pola pikir moderat), artinya warga NU senantiasa bersikap *tawazun* (seimbang) dalam menyikapi berbagai persoalan. Maka NU tidak *tafrith* atau *ifrath*, yaitu melakukan sikap ekstrim baik ekstrim kiri ataupun kanan. Kedua, *Fikrah Tasamuhiyyah* (pola pikir toleran), yaitu warga NU dapat hidup berdampingan secara damai dengan pihak lain walaupun cara pikir, budaya, dan aqidahnya berbeda. Ketiga, *Fikrah Islahiyyah* (pola pikir reformatif), artinya warga NU senantiasa

mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik (*al islah ila ma huwa al ashlah*). Keempat, *Fikrah Tathowwuriyah* (pola pikir dinamis), artinya warga NU senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon berbagai persoalan. Kelima, *Fikrah Manhajiyyah* (pola pikir metodologis), artinya warga NU selalu menggunakan kerangka pikir yang mengacu kepada *manhaj* yang telah ditetapkan NU.<sup>91</sup>

### 3) Hubungan Agama dan Negara

Diskursus hubungan agama dan negara senantiasa menjadi perdebatan hingga dewasa ini, hal ini disebabkan oleh multitafsir Islam sebagai agama, atau sebagai negara. Sementara sistem pemerintahan setelah wafatnya Rasulullah adalah sistem *khilafah* yang berbeda dengan konsep negara. Pandangan hubungan agama dan negara dapat dikelompokkan menjadi tiga paradigma<sup>92</sup>, yaitu :

- a) Paradigma integralistik, yaitu paham yang beranggapan bahwa agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dua lembaga yang menyatu (*integrated*). Paham ini sama dengan teokrasi, yang berarti agama dan negara menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Sehingga urusan kenegaraan menjadi manifestasi dari titah Tuhan dalam kehidupan manusia, dan agama negara sebagai hukum positif.

<sup>91</sup> Hasyim Muzadi. "Islam Rahmatan Lil 'alamin Menuju Perdamaian Dunia (Perspektif NU)". *op.cit.* hal: 13.

<sup>92</sup> Ibid. hal: 13.

- b) Paradigma sekularistik, yang beranggapan bahwa ada disparitas antara agama dan negara, sehingga keduanya merupakan entitas yang berbeda. Satu sama lainnya tidak dapat mengintervensi. Bentuk sekularisme yang paling ekstrim, ialah ketika hubungan agama dan negara diletakkan dalam paham komunisme. Dengan memandang hakikat hubungan agama dan negara berdasarkan filsafat materialisme dialektik dan materialisme historis. Sehingga eksistensi agama dianggap sebagai persoalan pribadi, dan dipopulerkan sebagai candu masyarakat.
- c) Paradigma simbiotik, yang berarti agama dan negara merupakan entitas yang berbeda, namun saling membutuhkan timbal balik. Yaitu agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam menjamin dan mengembangkan agama, sebaliknya negara memerlukan agama untuk pembinaan moral dan etika.

Berdasarkan pembagian tersebut, NU lebih memilih menggunakan paradigma ketiga, yang dapat dilihat dalam sejarah pendirian bangsa Indonesia di tahun 1945, dimana para tokoh NU ikut merumuskan Pancasila sebagai dasar NKRI. Dengan demikian, NU memahami bahwa Indonesia bukan sebagai negara Islam, ataupun bukan negara sekuler, namun negara Pancasila. Selanjutnya, agama dalam konteks negara diletakkan sebagai sumber nilai, dan secara fungsional agama mengambil peran *tawassuth*. Dalam pengertiannya, visi kenegaraan NU ialah membangun masyarakat Islam, bukan membangun negara Islam. Tidak hanya itu, agama menjadi *spirit* konstitusi negara, yang terlihat dalam lima prinsip Pancasila yang semuanya berada dalam sistem

ajaran semua agama, dan diakui oleh semua tokoh agama saat pendirian NKRI tahun 1945.<sup>93</sup>

Jadi, pilihan atas Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia pada hakekatnya merupakan formula Islam *tawassuth* khas Indonesia. Hal itu dapat dilihat dengan penghapusan terhadap teks “kewajiban menjalankan syariat Islam” pada sila pertama, menjadi upaya menghindari ekstrimitas penerapan Islam di NKRI. Inilah visi yang selalu dibina dan ditegakkan oleh NU dalam membangun hubungan moderasi antara agama dan negara. Sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Mukhtamar NU tahun 1984 di Situbondo, yang memutuskan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi final NKRI. Ini bentuk komitmen kebangsaan NU yang berdasarkan pada konsep *tawassuth*, yaitu *tasyawur, i'tidal, tasamuh, dan tawazun*.<sup>94</sup>

## **4. 2 Para Tokoh Pendukung**

### **4. 2. 1 Masykuri Abdillah**

#### **4. 2. 1. 1 Biografi Intelektual**

Prof. Dr. Masykuri Abdillah, lahir pada tanggal 22 Desember 1958 di Weleri, Kendal, Jawa Tengah. Setelah tamat Sekolah Dasar (SD), ia melanjutkan belajar di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Mranggen, Demak (selesai 1973). Masykuri kemuian melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Tebuireng, Jombang

<sup>93</sup> Hasyim Muzadi. “Islam Rahmatan Lil ‘alamin (Perspektif NU).” *op.cit.* hal: 15.

<sup>94</sup> *Ibid.* hal: 16.

hingga selesai pada 1976. Gelar Sarjana Muda ia peroleh dari Fakultas Syariah Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta (1981), dan gelar Sarjana Lengkap dari Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (1985). Kemudian tahun 1995, berhasil meraih gelar doktor dalam bidang Islamic Studies pada Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Timur Tengah, Universitas Hamburg, Jerman dengan disertasi “*Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to The Concept of Democracy*”, yang telah diterbitkan oleh Abera-Verlag, Hamburg, Jerman pada 1996.<sup>95</sup>

Setelah kembali dari studi di Jerman ia mulai aktif mengajar di Fakultas Syari’ah, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan kemudian menjadi Ketua Jurusan Muamalah/Ekonomi Islam, Fakultas Syariah IAIN Jakarta (1997–1998), pada masa inilah IAIN Jakarta Jurusan Mu’amalah dikembangkan menjadi jurusan yang mempelajari dan mengembangkan ekonomi Islam, termasuk perbankan Syari’ah. Pada periode 2000–2003 ia mendapatkan amanat menjadi Pembantu Rektor IV (Bidang Kerjasama), dan pada 2003–2007 menjadi Pembantu Rektor I (Bidang Akademik) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>96</sup>

Saat ini ia adalah Guru Besar pada Fakultas Syari’ah dan Sekolah Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Direktur Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) UIN Jakarta. Di samping tugas di kampus, sejak 2004 ia menjadi Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sejak 2007 menjadi Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan sejak 2008 menjadi Sekretaris Bidang Kehidupan Beragama

---

<sup>95</sup> [www.bwi.or.id](http://www.bwi.or.id). Diunduh pada 25/05/2010. Sumber ini atas permintaan narasumber.

<sup>96</sup> Ibid

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Seiring dengan tugasnya sebagai akademisi dan pengurus ormas, ia sering menjadi pembicara dalam berbagai diskusi, seminar/conference dan workshop, baik di dalam maupun di luar negeri.<sup>97</sup>

Sejak menjadi mahasiswa pada 1980-an, ia mulai menulis artikel di media massa, kemudian setelah menyelesaikan program S3, ia semakin banyak menulis artikel di berbagai media massa, jurnal, antologi, diskusi dan seminar. Disertasinya telah diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan judul 'Demokrasi dalam Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi' (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999 dan 2004). Tulisannya terutama berkisar tentang Islam dan politik, hukum, pendidikan serta isu-isu kontemporer yang terkait dengan Islam.

Di antara tulisan itu terdapat dalam antologi Masykuri Abdillah, dkk, Fomalisasi Syari'at Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas (Jakarta: Renaisan, 2005). Artikel lain yang perlu disebutkan disini adalah Islam, Demokrasi, dan Masyarakat Madani (1999), Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia (2000), Islam, Negara dan *Civil society*: Prospek dan Tantangan Pasca Orde Baru (2001), Hukum Pidana Islam dalam Konteks Pembinaan Hukum Pidana Nasional (2002), Pesantren dalam Konteks Pendidikan Nasional dan Pengembangan Masyarakat (2003), Demokrasi yang Religius: Membincang Konsep Demokrasi di Indonesia (2004), Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya pada Masa Kini (2005), Syari'ah dalam Konteks Globalisasi (2006), Kebebasan Berfikir dalam Konteks Masyarakat Indonesia (2007), dan *Ways of Constitution Building in Muslim Countries* (2008).

---

<sup>97</sup> Ibid

#### 4. 2. 1. 2 Pemikiran Tentang ICIS

Masykuri Abdillah, mulai terlibat di ICIS ketika menggantikan Rozy Munir, yang selepas ICIS II mendapat amanah sebagai Duta Besar RI di Qatar. Akhirnya ia menjadi Ketua Pelaksana ICIS III dan terlibat hingga kepengurusan PBNU yang baru terpilih dalam Mukhtamar NU ke XXXII. Sebagai Ketua Panitia ICIS III, ia mempunyai pandangan tersendiri dengan latar belakang akademisnya yang berkonsentrasi pada relasi agama dan negara. Layaknya Hasyim Muzadi, ia juga meyakini bahwa para ulama Indonesia telah merintis globalisasi, yang terlihat dalam penggunaan kitab Imam Nawawi sebagai rujukan di Mekah. Dalam ICIS III yang diselenggarakan pada tahun 2008, muncul kesamaan suara bahwa sumber konflik bukanlah berasal dari agama, dan globalisasi mempengaruhi sumber konflik di suatu negara. Hal ini tertuang dalam Pesan Jakarta pada ICIS III.<sup>98</sup>

Nilai moderat yang terdapat pada NU merupakan hasil kemampuan NU dalam penyesuaian terhadap kondisi lokal, hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam yang mengakomodir nilai-nilai lokal selama tidak melanggar syariat Islam. Karena itu, NU dapat menerima beberapa tradisi di Jawa atau luar Jawa, dan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Demikian pula praktik-praktik yang diperdebatkan dalam mazhab, itu bukanlah sesuatu yang salah, karena itu ada dasarnya dalam membaca doa *qunut* atau pembacaan *usholli*. Tapi kemudian sifat itu masih dibawa hingga kini, dalam artian Islam juga mengakomodasi semua kultur dan peradaban, termasuk peradaban modern yang secara filosofis berbeda dari peradaban Islam. Karena itu, walaupun dalam satu sisi NU

---

<sup>98</sup> Masykuri Abdillah. Berdasarkan wawancara. 20/05/2010.

mempunyai sisi tradisionalisme, namun dengan sifat moderasinya bisa mengakomodasi ide-ide modern. Seperti nilai-nilai perdamaian, manajemen konflik, demokrasi, HAM, pluralisme, walaupun sebagian besar orang-orang NU masih mempertahankan tradisionalismenya secara fisik, baik dalam bentuk aian ataupun gaya hidup. Tapi dari segi ide, tidak mempunyai masalah secara keislaman. Hal ini yang membuat NU dicitrakan moderat karena bisa mengakomodasi ide-ide berbeda, yang sifatnya modern, bukan dalam pengertian sempit.<sup>99</sup>

Bersamaan dengan keputusan kembali ke Khittah 1926, NU secara resmi telah memposisikan dirinya sebagai *civil society*, bukan *political society*. Sehingga NU mempunyai tanggung jawab sebagai implementasi dari *civil society*, dimana karakter utama *civil society* ialah mempunyai kemandirian organisasi tanpa membedakan desa atau kota.<sup>100</sup> Dengan demikian, NU melakukan keswadayaannya untuk berkiprah tanpa adanya ketergantungan, menciptakan interaksi-interaksi dalam masyarakat untuk senantiasa bernalog. Kredibilitas ini membuat NU diakui pemerintah dan masyarakat internasional sehingga ketika munculnya penistaan terhadap Islam pasca 9/11, NU dipercaya untuk berdiplomasi. Dalam diplomasi tersebut NU otomatis mengakui relasi antara agama dan negara. Sebuah konsep demokrasi yang religius, yang tidak menghilangkan substansi demokrasi itu sendiri. Adapun konsep demokrasi yang religius mempunyai nilai-nilai sebagai berikut; (1) kehendak rakyat semestinya atau sebisa mungkin, tidak bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) putusan-putusan publik semestinya dapat dipertanggungjawabkan baik di hadapan manusia maupun

---

<sup>99</sup> Ibid.

<sup>100</sup> Muhammad A.S Hikam. *Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil society*. Jakarta: Erlangga, 2000. hal: 79.

Tuhan, (3) orientasi setiap individu semestinya tidak hanya menekankan hak-hak, tetapi juga kewajiban-kewajiban, (4) pemeliharaan keseimbangan antara hak-hak individual dan kolektif serta antara nilai-nilai material dan spiritual.<sup>101</sup>

Nilai moderatisme yang dimiliki NU, menyebabkan NU dipandang lebih kondusif dalam menyebarkan nilai-nilai moderat. Hal ini karena paham *Ahlussunnah Wal Jamaah* yang dimiliki NU tidak mengandung nilai purifikasi. Terutama dalam konteks studi mengenai radikalisme versi Barat pasca 9/11 yang menunjuk (Wahabisme) Arab Saudi sebagai faktor kekerasan dalam Islam. Mulai dari bom bunuh diri di Palestina, hingga fenomena Osama bin Laden.<sup>102</sup> Begitu pula dengan revolusi Islam di Iran, yang diterjemahkan oleh Barat sebagai ekspresi fanatisme kegamaan, tanpa memperhatikan faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang menyebabkan lahirnya revolusi tersebut.<sup>103</sup> Terdapat kecenderungan pada negara-negara muslim untuk mempunyai hubungan lebih erat dengan Barat. Seperti saat Libya atau Iran bersitegang dengan AS, sekaligus terdapat keakraban di antara AS dan Arab Saudi, Kuwait, Mesir, dan Bahrain.<sup>104</sup> Fenomena ini yang dikatakan Masykuri, sebagai peluang bagi moderatisme Indonesia yang diterima oleh negara-negara muslim di Timur-Tengah.<sup>105</sup>

<sup>101</sup> Masykuri Abdillah. "Agama dan Konsep Demokrasi". [www.okezone.com](http://www.okezone.com). Diunduh pada 25/05/2010.

<sup>102</sup> Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF. "Tipologi Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia". Dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Ed.). *Islam Negara & Civil society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina, 2005. hal: 492.

<sup>103</sup> Mun'im Sirry. "Benturan Kesalahpahaman Islam-Barat". Dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Ed.) *Islam Negara & Civil society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina, 2005. hal: 208.

<sup>104</sup> Ibid. Hal 205.

<sup>105</sup> Masykuri Abdillah. Berdasarkan wawancara langsung. 20/05/2010.

## **4. 2. 2 Hassan Wirajuda**

### **4. 2. 2. 1 Biografi Intelektual**

Hassan Wirajuda lahir pada tanggal 9 Juli 1948, di Tangerang, Banten. Ia menyelesaikan studi sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1971, lalu melanjutkan studinya ke program pascasarjana (S2) di Harvard School of Law, Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat, pada tahun 1985. Setelah menyelesaikan studi pascasarjana, ia kembali melanjutkan jenjang pendidikan tingginya di program doktoral sebagai Doctor of Juridical Science in International Science, Virginia School of Law, Charlottesville, Virginia, Amerika Serikat, pada tahun 1987. Karirnya sebagai diplomat dianggap cemerlang dengan berhasil meraih jabatan Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Namun, sebelum bekerja di Departemen Luar Negeri, ia juga pernah bekerja sebagai pengacara dan dosen di Jakarta.<sup>106</sup>

Sebelum menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI, Ia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik, Departemen Luar Negeri dan menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB dan Organisasi-organisasi Internasional lainnya di Jenewa, Swiss. Setelah berhasil mengemban jabatan sebagai Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, ia dipercaya sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia berkat kegemilangan prestasinya. Ia diangkat oleh presiden Megawati Soekarnoputri pada masa Kabinet Gotong Royong (2001-2004). Sebagai Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda memegang tanggung jawab memimpin diplomasi Indonesia pada saat Indonesia menghadapi masa

---

<sup>106</sup> [www.ensiklopediatokohindonesia.co.id](http://www.ensiklopediatokohindonesia.co.id). Diunduh pada 07/06/2010.

transisi. Ketika pertama kali diangkat sebagai Menteri Luar Negeri pada tanggal 10 Agustus 2001, saat itu Indonesia tengah berada dalam masa reformasi. Ia menjalankan tugas berat mencari dukungan dan kepercayaan internasional agar Indonesia bisa beranjak pulih dari krisis ekonomi yang dialami sejak tahun 1997.<sup>107</sup>

#### 4. 2. 2. 2 Pemikiran Tentang ICIS

Memasuki era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia dihadapkan pada permasalahan keamanan yang cukup serius seperti ancaman terorisme. Hassan Wirajuda mengatakan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memikul kewajiban untuk memproyeksikan wajah Islam yang moderat. Menurutnya, kita harus memberdayakan kelompok moderat yang merupakan mayoritas di Indonesia sehingga pencitraan moderat akan semakin lekat di negara kita. Terorisme sama sekali tidak bisa diidentikkan dengan peradaban atau agama apapun. Karena teroris merupakan orang-orang yang menggunakan kekerasan sebagai alat, tanpa pandang bulu siapa korbannya untuk mencapai tujuan politik mereka. Sejak serangan AS ke Afghanistan, perhatian dunia iarahkan ke kawasan Asia Tenggara secara keliru, yakni mengidentikkan terorisme dengan Islam.<sup>108</sup>

Pasca serangan 9/11, muncul beberapa kondisi. Pertama, Islam yang mudah diasosiasikan dekat dengan kekerasan, ekstrimisme dan terorisme. Kedua, AS sebagai negara adikuasa yang murka melampiaskannya ke negara atau kelompok masyarakat tertentu. Kita jangan melihat peristiwa 9/11 dalam satu sisi, namun dilihat dalam sebuah

---

<sup>107</sup> Ibid.

<sup>108</sup> Hassan Wirajuda. Berdasarkan wawancara. 04/ 06/ 2010.

rangkaian kejahatan. Penangkapan Syekh Rahman di New York telah memunculkan kecendrungan AS untuk mencurigai Islam sebagai terorisme. Kemudian ledakan di kantor polisi federal Oklahoma, yang bahkan sebelum penyelidikan usai, sudah muncul tuduhan terhadap muslim sebagai pelaku penyerangan. Jika sebelumnya telah muncul tesis *clash of civilization* dari Samuel Huntington, maka hal itu semakin diperkuat dengan adanya serangan 9/11 tersebut.<sup>109</sup>

Kemudian kita melihat AS melanjutkan kemurkaannya dengan menyerang Afghanistan yang dituduh sebagai negara yang mensponsori gerakan Al Qaeda. Tidak berapa lama juga menyerang Irak dengan dalih adanya senjata pemusnah massal, dan Saddam Husein yang merupakan bagian dari Al Qaeda. Walaupun mungkin ada kepentingan lain dalam penyerangan tersebut, seperti mengganti rezim yang mempunyai dosa dengan menyerang Kuwait sebelumnya. Ketika terjadi serangan tersebut, Hassan Wirajuda dipanggil Presiden, dan gambaran pertama yang muncul ialah kesan memunculkan Islam sebagai ekstrimisme dan terorisme. Hal tersebut diperkuat dengan muncul kecendrungan untuk menyalahkan Islam dalam beberapa kejahatan sebelumnya di AS.<sup>110</sup>

Hassan Wirajuda meyakini; pertama, Indonesia bukanlah sebagai negara Islam dan bukan juga negara sekuler, kita sebagai negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia sangat terbuka terhadap nilai moderat. Lalu kita juga yakin bahwa agama Islam yang kita jalankan ialah agama yang damai, toleran, dan anti kekerasan, bahkan Rahmatan Lil 'alamin. Sehingga gambaran yang diberikan oleh barat terhadap Islam yang dilekatkan

---

<sup>109</sup> Ibid.

<sup>110</sup> Ibid.

pada kekerasan tidak bisa kita terima. Indonesia mempunyai tanggung jawab sebagai negara muslim terbesar di dunia untuk meluruskan mispersepsi tersebut. Sehingga pernyataan yang pertama kita keluarkan ialah, negara Indonesia mengutuk tindakan terorisme. Kemudian menyatakan bahwa Islam ialah agama yang membawa kedamaian. Lalu mengajak seluruh negara di dunia untuk saling bekerjasama untuk menghadapi terorisme dalam kerangka multilateral dan bukan dalam unilateral yang sepihak.

Pada dasarnya terorisme merupakan ancaman terhadap kemanan internasional, bukan hanya AS yang menjadi korban, bahkan Indonesia juga telah mendapatkan serangan terorisme sebelum serangan 9/11. Seperti ledakan di Atrium Senen tahun 2000, ledakan di kedubes Filipina, bom malam natal. Bahkan pada kasus ledakan di Senen, sudah ditemukan adanya kerjasama terorisme dengan warga Malaysia, dan belakangan diketahui bahwa sebagian dari mereka telah terlatih di Afghanistan. Sehingga ancaman terhadap kemanan internasional merupakan suatu yang riil. Ini merupakan suatu rangkaian ancaman yang saling berkaitan, dan bukan sebuah isu yang diimport dari AS kepada pemerintah.

Hassan selalu menggunakan konsep diplomasi '*Indonesia incorporated*'<sup>111</sup>, yaitu diplomasi saat ini tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah, namun oleh semua elemen masyarakat. Ia mulai menyadari NU sebagai sebuah aset nasional ketika pada tahun 2002, diundang untuk menghadiri *istighotsah* NU di Surabaya. Dalam konsep *Indonesia incorporated* yang ia terapkan, dibutuhkan seorang menlu yang menjangkau ke luar,

---

<sup>111</sup> [www.vivanews.com](http://www.vivanews.com). Diunduh pada 30/05/2010.

bukan hanya beriam di Pejambon. Sehingga pemerintah perlu bermitra dengan kelompok-kelompok di masyarakat pada jalurnya masing-masing dan bersinergi.<sup>112</sup>

Kita ingin membuktikan bahwa tidak ada yang namanya *clash of civilization*, namun yang ada hanyalah mispersepsi terhadap Islam. Sehingga kita harus merubahnya dengan berialog baik kepada non muslim ataupun umat muslim sendiri. Deplu akhirnya menggandeng para ulama untuk melakukannya. Dalam tataran dunia Islam sendiri, harus diluruskan mengenai konsep jihad yang menghalalkan segala cara, dan hal ini tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah. Kemudian untuk membuktikan bahwa *clash of civilization* itu keliru, maka kita harus melakukan ialog dengan peradaban lainnya, terutama Barat. Ialog bukanlah sistem nilai bangsa kita, namun itu merupakan hasil dari kebhinekaan yang ada, dalam bentuk tenggang rasa dan toleransi. Disini kita meletakkan cara-cara ialog dalam posisi yang tinggi dan kita tampilkan ke luar.<sup>113</sup>

Hassan melihat perlu dilakukan ialog oleh para ulama atau *scholars*, namun bukan hanya *Islamic Scholars* muslim, namun juga *Islamic Scholars* yang non muslim dan mereka tersebar di negara-negara barat. Dan mereka lebih mudah untuk dirangkul untuk menjelaskan mengenai Islam, dan meluruskan persepsi tentang Islam yang iasosiasikan dengan kekerasan. Bahkan juga dengan ulama syi'ah, yang ternyata mereka lebih mudah untuk iajak bekerjasama, selain masalah teologi.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Ada 8 perubahan krusial yang dilakukan Hassan Wirajuda selama 8 tahun jadi Menlu. Beliau menggunakan pendekatan 'Diplomasi Total' dan 'Faktor Intermestik'. Salah satu upayanya ialah dengan membentuk Diplomasi Publik. Posisi ini termasuk dari reformasi internal yang dijalankan Wirajuda di tubuh Deplu. Berbeda dari upaya diplomasi konvensional yang berhadapan dengan pemerintah negara lain, maka diplomasi publik harus berhadapan dengan aktor-aktor non-pemerintah atau publik, baik di negeri sendiri maupun di negara lain. Lihat "Pak Hassan Telah Mengukir Masa Emas Diplomasi Indonesia." Dalam *Tabloid Diplomasi*. 15 November-14 Desember. 2009. hal: 7.

<sup>113</sup> Hassan Wirajuda. Berdasarkan wawancara langsung. 04/06/2010.

<sup>114</sup> Ibid.

## BAB V

### DAMPAK ICIS

Warga *nahdliyin* sering dipandang sebagai ‘tradisionalis’ dalam segi penampilan dan gaya hidupnya. Akan tetapi, sesungguhnya warga NU mampu mengakomodasi ide-ide modern bahkan yang secara filosofis berbeda dengan peradaban Islam. Ide-ide modern seperti demokrasi, HAM, ataupun pluralisme, tidak lantas mendapat penolakan dari warga NU yang mengusung tradisionalisme di satu sisi dan menjunjung moderasi di lain sisi.<sup>115</sup> Dengan demikian, wajar jika pencitraan moderat semakin melekat pada NU yang mampu mengakomodasi nilai-nilai ‘asing’ tersebut. Hal ini sesuai dengan semangat *al-muhafazhah ‘ala al- qadim al-shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah* (menjaga sesuatu yang lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru lagi lebih baik).<sup>116</sup>

#### 5. 1 Dampak ICIS

Nilai-nilai NU tersebut yang kemudian menjadikan Hasyim Muzadi untuk menghadirkan ICIS sebagai sebuah alternatif solusi dalam konflik global yang semakin berkembang. Prinsip pemikiran Hasyim Muzadi dalam ICIS tersebut adalah untuk mengukung pemikiran moderat dan kebangsaan. Konsep Moderat tersebut telah menjadi nilai kemasyarakatan NU yang disebut *tawassuth*. Dengan nilai tersebut, ICIS mengkampanyekan terorisme dan kekerasan bukan bagian dari agama. Akan

<sup>115</sup> Masykuri Abdillah. Berdasarkan wawancara. 20/05/2010.

<sup>116</sup> . Mujamil Qomar, *op.cit.* hal: 98.

tetapi, justru komponen yang merusak semua agama. Dengan mengkampanyekan ICIS di ranah global, nantinya ICIS dapat menyaingi kelompok-kelompok yang merusak moderasi yaitu kelompok liberal dan kelompok fundamentalis. Moderasi yang dibawa oleh NU merupakan keseimbangan antara keimanan dan toleransi, dan paham ini diterima di Barat dan Timur. Hal ini membuktikan bahwa negara-negara di dunia pada dasarnya telah mengakui kebenaran nilai Moderat. Namun, terdapat kondisi-kondisi di setiap negara yang menyebabkan praktik moderatisme tersebut tidak berjalan selayaknya di Indonesia. Bahkan di Barat, moderasi telah dapat menarik perhatian karena telah tertanam nilai-nilai liberal sehingga mudah untuk dimasuki dibandingkan dengan negara-negara yang ‘tertutup’.<sup>117</sup>

Pada level dalam negeri, ICIS yang dikomandoi oleh Hasyim Muzadi memberikan beberapa dampak yang dapat penulis analisa. Dampak tersebut menuju kepada konsolidasi di antara pemerintah dan NU, hal ini terlihat dengan kerjasama yang dilakukan oleh Hasyim Muzadi dengan menjadikan ICIS sebagai media dalam menjalin hubungan terhadap pemerintah. Kerjasama tersebut semakin kuat dengan hadirnya Presiden RI dalam setiap pembukaan ICIS I, II, dan III, bahkan setelah pergantian dari Megawati Soekarnoputri kepada Susilo Bambang Yudhoyono.<sup>118</sup>

Peran ICIS lainnya di tingkat dalam negeri ialah memperluas peran ulama, dalam hal ini ulama juga berarti cendekiawan Islam, tidak hanya berada dalam wilayah akademis semata. Ulama, khususnya di Indonesia, harus diakui telah melakukan peran yang semakin luas dari sekedar penceramah agama atau guru di

<sup>117</sup> Hasyim Muzadi. “ICIS, Islam Moderat, dan Interfaith Dialogue.” *op.cit.* hal: 12.

<sup>118</sup> Hasyim Muzadi. “Menangkal Terorisme Dengan Memberdayakan Pemikiran Moderat.” *op.cit.* hal: 17.

pesantren, menjadi aktor dalam wilayah politik, sosial, dan budaya. Melalui ICIS, para ulama akan semakin diberdayakan dalam mencitrakan Islam moderat di tengah umatnya.<sup>119</sup>

Di ranah internasional, posisi ICIS telah dapat disejajarkan dengan WCRP (World Conference of Religions for Peace), OKI (Organisasi Konferensi Islam), Liga Arab, dan lain-lainnya. Para ulama telah sepakat untuk mengembangkan ICIS sebagai saluran jenjang kaderisasi pemikiran-pemikiran generasi muda agar mereka berpikir global. Kemudian, para ulama juga menginginkan agar pemikiran *Ahlussunnah Wal Jamaah* yang merumuskan moderasi dapat dipertegas dalam forum ICIS melalui dua pendekatan. Pertama, merumuskan moderasi dan pencerahan, dan kedua, merumuskan cara untuk membawanya dalam gerakan yang komprehensif-inklusif yang sesuai dengan kultur Indonesia. Di masa yang akan datang, ICIS memproyeksikan diri untuk menjadi pusat kajian untuk mempelajari kasus-kasus global dengan berbagai perspektifnya. Diharapkan, pusat kajian ini akan dapat mendukung program *Interfaith Dialogue* sebagai bagian dari diplomasi total Indonesia.<sup>120</sup>

ICIS merupakan penyatuan antara diplomasi formal dan non-formal. Diplomasi non-formal yang dilakukan ICIS juga disebut *second track diplomacy* yang bertugas menjadikan diplomasi kenegaraan menjadi lebih efektif. Metode ini terbukti efektif terutama untuk negara-negara berkembang atau yang sedang bergejolak. Dalam kondisi negara seperti yang disebutkan tadi, diplomasi reguler

---

<sup>119</sup> Masykuri Abdillah. Berdasarkan wawancara. 20/05/2010.

<sup>120</sup> *Ibid.* hal: 12

kenegaraan tidak akan efektif menjangkau seluruh aspek negara. Seperti yang terjadi di Iran, walaupun negara tersebut mempunyai stabilitas politik, namun pendekatan juga harus dilakukan kepada ulama-ulama Syi'ah yang mempunyai kekuasaan informal dalam menentukan kebijakan nasional. Begitu juga dengan kondisi di Lebanon, pemerintahannya praktis tidak memiliki akses dalam mengendalikan kondisi negaranya. Kekuasaan justru dipegang oleh Hassan Nasrallah yang memimpin gerakan Hizbullah di Lebanon Selatan yang mempunyai pasukan sepuluh kali lipat dari pasukan pemerintah. Kondisi seperti itu menyebabkan diplomasi yang dilakukan *vis a vis* negara secara formal tidak akan efektif. Di sini, peran NU melengkapi diplomasi tersebut dengan modal moderasinya. NU dapat bertemu dengan pihak mana pun yang bertikai. Hingga saat ini, peran NU dengan ICIS sulit untuk digantikan, baik di level nasional maupun internasional.<sup>121</sup>

Konsep Moderat yang dibawa oleh ICIS, juga merupakan bagian dari proses psikologi dakwah yang berupaya menumbuhkan lima hal yang meliputi pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang makin baik, dan tindakan. Metode yang dilakukan ICIS bisa dijelaskan dalam psikologi dakwah sebagai berikut<sup>122</sup>:

- 1) Pengertian mengandung makna penerimaan cermat isi stimulus seperti yang dimaksud oleh komunikator. Yang menjadi persoalan di sini adalah bagaimana manusia sering berselisih hanya karena salah mengartikan pesan (*misinterpretation*) lawan komunikasinya. Dengan demikian, setiap pelaku

<sup>121</sup> Hasyim Muzadi. "Pak Hassan Telah Berhasil Mengemas Islam Moderat dalam Diplomasi Global" *Tabloid Diplomasi* 15 November-14 Desember. 2009. hal: 9.

<sup>122</sup> Totok Jumantoro. *Psikologi Dakwah Dengan Aspek-Aspek Kejiwaan yang Qur'ani*. Jakarta: Amzah, 2001. hal: 28.

dakwah harus menaruh perhatiannya secara mendalam, karena dampak salah tafsir dapat membuatnya menjauh dari tujuan dakwah itu sendiri. Di sini harus diupayakan terciptanya kesepemahaman antara *da'i* (*communicator* yang menyampaikan *input*) dengan *mad'u* (*audience* yang menghasilkan *output*).

- 2) Kesenangan dalam pengertian; aktivitas dakwah harus mampu menimbulkan kesenangan pada diri setiap *mad'u*, seperti Islam yang dikatakan sebagai 'pembawa berita gembira' yang mampu menimbulkan kesadaran dan rasa puas. Diupayakan agar setelah mendapat khotbah, *mad'u* tidak merasa seolah dimarahi atau bahkan tidak memahami materi khotbah yang tidak sesuai dengan lapisan masyarakatnya.
- 3) Mempengaruhi sikap yang berarti dakwah bersikap persuasif. Persuasif berarti dakwah berjalan sebagai proses yang mempengaruhi pendapat, sikap, dan tindakan orang dengan manipulasi psikologis sehingga orang tersebut bertindak seperti kehendaknya sendiri. Gagal atau tidaknya dakwah persuasif disini ditentukan oleh keadaan *da'i* itu sendiri karena pendengar juga akan memperhatikan siapa yang menyampaikan. Untuk menghindari *boomerang effect* (jawaban yang negatif), dalam dakwah harus diperhatikan kerangka pandangan (*frame of reference*) dan lapangan pengalaman (*field of experience*) pada komunikan.
- 4) Hubungan sosial yang baik menjadi penting karena tidak ada satu manusia pun yang ingin dikucilkan masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan yang positif dengan manusia lainnya. Dengan demikian, dakwah harus dapat menumbuhkan hubungan antarpersonal yang harmonis dan bukan membawa perpecahan (*disintegrated*) dalam anggota masyarakat. Untuk itu dibutuhkan strategi dakwah dengan pendekatan kejiwaan, sehingga Islam sebagai *Rahmatan Lil 'alamin* dapat terwujud, dan tidak berakhir dengan bencana seperti yang dialami oleh Galileo Galilei akibat penemuannya yang bertentangan dengan tradisi.

- 5) Tindakan berarti setelah dakwah mempengaruhi sikap, selanjutnya dakwah menghasilkan tindakan yang diinginkan. Dakwah selain bergerak dalam masalah kualitas, juga dalam hal kuantitas. Menimbulkan tindakan nyata merupakan indikator efektivitas yang paling penting karena hal tersebut merupakan akumulasi dari seluruh proses komunikasi dakwah.

### 3. 3 Program Kerja ICIS

Dengan segala usaha dan perjuangannya, ICIS akhirnya resmi menjadi lembaga internasional yang terdaftar di OKI (*Organisasi Konferensi Islam, Organization of the Islamic Conference*) dan Rabithah Alam Islami (Liga Muslim Dunia) yang berpusat di Mekah dan terdaftar di PBB. Sejauh ini, ICIS telah melakukan beberapa kesepakatan untuk mengatasi problem dunia Islam bersama dengan OKI, Rabithah, PBB, maupun *World Confrence of Religions for Peace* (WCRP) dan membicarakan tentang bagaimana menangani konflik Timur Tengah seperti konflik Israel-Palestina, Lebanon-Israel, rehabilitasi Irak, hingga isu nuklir Iran. ICIS juga melakukan koordinasi dengan pihak PBB, AS, Eropa, ataupun Australia untuk membicarakan isu *Islamophobia*, penanganan terorisme, dan mempersempit kesenjangan antara negara utara-selatan yang berpotensi menciptakan konflik. Di Timur-Tengah, NU juga melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh kunci seperti Sekjen Rabithah Alam Islami, Dr. Abdullah Atturki, dan Sekjen OKI,

Ekmeledin Ihsanoglu, keduanya di Mekah, serta pimpinan *Islamic Development Bank* (IDB) di Jeddah.<sup>123</sup>

Selanjutnya, langkah yang diambil adalah mengusahakan agar Presiden OKI bisa turut serta dalam acara ICIS. Usaha tersebut sukses dengan hadirnya Presiden OKI yang dijabat oleh Abdullah Ahmad Badawi. Dari sini akhirnya muncul kerja sama yang lebih konkrit seperti dalam bidang pendidikan dengan tukar menukar referensi pemikiran dari para ulama, usaha untuk melakukan peningkatan di bidang ekonomi, dan rumusan-rumusan di bidang budaya. Hal ini yang menjadikan hubungan antara ICIS dan OKI semakin kuat. Lalu pada 28 Agustus 2006, Hasyim Muzadi selaku Sekjen ICIS mendatangi Sekretariat Jenderal OKI di Jeddah guna mengemukakan ide-ide mengenai ICIS. OKI tertarik dengan posisi ICIS yang independen dan bebas kepentingan politik, sehingga dianggap mampu mendukung kemurnian dan perbaikan umat. Hingga kini, ICIS merupakan anggota resmi peninjau OKI. Begitu juga yang tengah diupayakan di Rabithah Alam Islami dengan Syekh Abdullah Atturki yang mempertimbangkan untuk memasukkan ICIS sebagai anggota organisasi yang bertempat di Arab Saudi tersebut.<sup>124</sup>

Pada 20 September 2006, KH. Hasyim Muzadi bersama tim PBNU dan Deplu RI, berangkat ke New York untuk menghadiri *High Level Interfaith*, sebuah diskusi lintas agama yang diselenggarakan oleh PBB bersamaan dengan Sidang Umum PBB. Di sana, ia mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip Islam *Rahmatan Lil 'alamin*

---

<sup>123</sup> Hasyim Muzadi. "Islam Rahmatan Lil 'alamin Menuju Keadilan dan Perdamaian Dunia (Perspektif NU)." *op.cit.* hal: 26.

<sup>124</sup> Hasyim Muzadi. "Islam Rahmatan Lil 'alamin Menuju Keadilan dan Perdamaian Dunia (Perspektif NU)." *op.cit.* hal: 28.

dan mendapat sambutan yang positif. Di lingkungan PBB tersebut, ia sekaligus mengunjungi Sekretariat WCRP yang merupakan bagian dari PBB seperti WHO, UNESCO, dan lain-lain. Selain itu, ia kembali menerangkan ICIS dan prinsip-prinsip Islam *Rahmatan Lil 'alamin* dan kemudian memberikan usulan konkrit. Usulan tersebut yaitu pertama, WCRP hendaknya melihat gejala kekerasan dalam agama dan lintas agama serta hubungannya dengan barat secara objektif, tidak sepihak. Kedua, WCRP hendaknya menegur kelompok-kelompok agama yang menimbulkan konflik baik Islam, Kristen, Budha, dan lain-lain, sehingga fungsinya menjadi konkrit. Ketiga, meminta WCRP membuat langkah-langkah penyelamatan ajaran agama dari kekerasan non-agama, karena faktor-faktor kekerasan konflik lintas agama itu hanya 30% saja, sedangkan yang 70% berasal dari non-agama seperti politik, ekonomi, dan lain-lain. Kekerasan non-agama itu dibalut oleh agama sehingga agama jadi limbah kekerasan non-agama. WCRP juga diminta untuk mempelajari Indonesia dengan kemungkinan menjadikan Islam di Indonesia sebagai *role model* dunia untuk penyelesaian konflik keagamaan.<sup>125</sup>

Selain itu ICIS juga turut melakukan serangkaian tindakan untuk mengkampanyekan Islam *Rahmatan Lil 'alamin* ke berbagai negara seperti berikut:

#### a) Thailand Selatan

Hasyim Muzadi telah melakukan dua kali kunjungan untuk membantu pemerintah Thailand menciptakan suasana damai dan penyelesaian konflik muslim

---

<sup>125</sup> Hasyim Muzadi. "Islam Rahmatan Lil 'alamin Menuju Keadilan dan Perdamaian Dunia (Perspektif NU)." *op.cit.* hal: 29.

minoritas Thailand Selatan. Kunjungan pertama pada Maret-April 2005, diterima oleh PM Thailand Thaksin Shinawatra, Raja Thailand Bhumibol Adulyadej, dan pejabat tinggi lainnya. Kunjungan kedua pada 11-12 September 2006, hanya kurang sepekan sebelum Thaksin dikudeta oleh militernya sendiri. Rombongan yang juga mewakili PBNU tersebut, memberikan beberapa masukan kepada pemerintah Thailand untuk menyelesaikan konflik di tiga propinsi di Thailand Selatan semenjak penyerangan militer Thailand ke Masjid Krue Se di Pattani dan terbunuhnya 84 demonstran muslim di Tak Bai, Narathiwat pada Oktober 2004 di Yala, Pattani, dan Narathiwat yang mayoritas penduduknya muslim.<sup>126</sup>

Sebelumnya, kepada PM Thaksin dan Raja Bhumibol, PBNU berterimakasih karena telah dinyatakan sebagai kelompok Islam yang moderat, yang belum pernah melakukan kekerasan dalam memperjuangkan aspirasinya. Lebih lanjut, NU ternyata sudah dikenal masyarakat muslim Thailand yang mempunyai banyak kesamaan kultur. Kemudian, NU juga memberikan saran, pertama, NU mempunyai pandangan bahwa konflik di Thailand sepatutnya dianggap sebagai konflik nasional, sehingga Thailand hendaknya menjauhkan anasir internasionalisasi dalam penyelesaian konflik.<sup>127</sup>

Kedua, NU menganggap bahwa muslim Thailand ialah bagian dari anak kandung warga asli Thailand, sehingga disarankan untuk menciptakan suasana “*Thai Moslem*” agar mereka tidak merasa diasingkan. Pendekatan militer dan keamanan

---

<sup>126</sup> *Ibid.* hal: 30.

<sup>127</sup> *Ibid.* hal: 30.

hendaknya diseimbangkan dengan pendekatan pendidikan, kesejahteraan, dan keadilan<sup>128</sup>.

Selanjutnya, ICIS juga menyarankan agar pemerintah Thailand mempunyai penasehat khusus yang mengerti agama Islam serta konteksnya dalam masyarakat Thailand, sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman antara pemerintah dan rakyat. Hal tersebut menjadi penting karena dalam upaya saling mengerti antarkultur, dibutuhkan pemahaman nilai-nilai kebudayaan setempat, seperti yang juga dilakukan oleh NU.<sup>129</sup>

Kepada ulama dan guru-guru agama di Thailand Selatan, PBNU juga menyarankan supaya jangan hanya mengajarkan formalisme khilafah Islam di tengah-tengah mayoritas Hindu-Budha karena dapat mengganggu proses demokrasi yang ada di sana. Islam mengajarkan pemeluknya untuk berbuat baik, membantu orang lain yang kesusahan, dan hidup harmonis dengan lingkungan. Prinsip ini tidak hanya berlaku kepada sesama muslim, tapi juga berlaku untuk pemeluk agama lainnya. Negara di sisi lain juga berkewajiban melindungi dan memberi kebebasan yang sama kepada semua umat beragama dalam beribadah.<sup>130</sup>

## **b) Suriah**

PBNU mengunjungi Suriah atas undangan Dubes Suriah di Jakarta saat itu dan kunjungan itu dimanfaatkan untuk bersilaturahmi dengan kalangan pejabat pemerintah, ulama, maupun intelektual di Suriah. Di sana, Hasyim Muzadi yang

---

<sup>128</sup> *Ibid*

<sup>129</sup> *Ibid.* hal: 31.

<sup>130</sup> *Ibid.*

mewakili NU dan ICIS memberikan dukungan moral bagi Suriah atas berbagai masalah yang menekan negara mereka. Rombongan sempat bertemu Menteri Wakaf dalam suatu arena media parlemen rakyat di Damaskus, sebuah kemah tempat rakyat menanyakan sesuatu kepada wakil-wakilnya di parlemen.<sup>131</sup>

Di Suriah, banyak terdapat ulama-ulama yang mempunyai reputasi mendunia, diantaranya Syekh Wahbah al Zuhaili, Said Ramadhan, dan Dr. Salahuddin Kaftaru. Ketiga tokoh tersebut banyak menulis mengenai agama, baik itu tasawuf, tafsir, *tauhid*, *syariah*, *mu'amalah*, maupun politik Islam. Tulisan-tulisan mereka juga menjadi referensi bagi ulama PBNU karena mengusung paham yang sama yaitu *ahlussunnah wal jamaah*. Rombongan NU yang terdiri dari Hasyim Muzadi, Kyai Masruri, Kyai Nur Muhammad Iskandar, dan Kyai Idris Marzuki, memperoleh ijazah dari Syekh Wahbah Zuhaili dan Said Ramadhan untuk dapat mengajarkan kitab-kitab mereka yang lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh PBNU. Dengan demikian, *tawassuth* yang dianut oleh NU tidak dipahami dalam arti tidak punya sikap, namun berupa jalan tengah yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Siapa pun yang dirusak atau diperlakukan tidak adil, NU akan melakukan tindakan, minimal berupa dukungan moral.<sup>132</sup>

### c) Iran

Isu pengadaan senjata nuklir Iran yang dianggap mengancam kedigdayaan AS, menjadi semakin besar dengan bertambahnya jumlah embargo yang dilakukan

---

<sup>131</sup> *Ibid.* hal: 32.

<sup>132</sup> *Ibid.* hal: 33.

oleh AS terhadap Iran. Sehubungan dengan hal tersebut, Hasyim Muzadi sebagai pemrakarsa ICIS mengunjungi Iran. Setelah mendapat jawaban pasti dari Presiden Mahmoud Ahmadinejad mengenai tidak adanya senjata nuklir di Iran, NU memberikan dukungan kepada Iran dalam melakukan pengadaan nuklir untuk tujuan damai dan pembangunan. Dukungan ini dihargai oleh Iran, sehingga ketika Presiden Iran berkunjung ke Indonesia, dia melakukan kunjungan balasan ke Sekretariat PBNU.<sup>133</sup>

Hubungan baik dan dukungan terhadap Iran tersebut tidak dapat diartikan bahwa NU sepakat dengan ajaran Syi'ah, namun hal ini berada dalam konteks keadilan dan pembelaan terhadap hak-haknya tanpa harus takut dengan hegemoni AS. Pembicaraan tersebut tidak pernah masuk ke ranah ideologi, karena Syi'ah dan Sunni memang berbeda, namun hal tersebut tidak boleh menghilangkan pembelaan terhadap keadilan. PBNU memandang agar PBB menghormati dan menjamin hak tiap negara untuk mengembangkan nuklir, selama negara tersebut berkomitmen pada Traktat Non-Proliferasi.<sup>134</sup>

#### **d) Pakistan**

Ketika ICIS menghadiri Konferensi II OIC CEP (*Commission of Eminent Persons*) di Islamabad, 28-29 Mei 2005, dalam rangka memperbaiki dokumen-dokumen OKI, kunjungan itu dimanfaatkan oleh KH. Hasyim Muzadi untuk silaturahmi pada ulama Sunni dan Syi'ah di Pakistan. Dalam konferensi tersebut,

---

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> *Ibid.* hal: 34.

Hasyim Muzadi mempresentasikan wawasan mengenai *ukhuwwah Islamiyah* dan bahaya pemecahbelahan dari kelompok luar kepada kelompok Sunni dan Syi'ah. Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Menteri Agama Pakistan, serta ulama-ulama Sunni dan Syi'ah.<sup>135</sup>

Akhirnya, dari pertemuan tersebut didapatkan pengetahuan bahwa memang ada konflik, namun intensitasnya meningkat setelah dicampuri tangan-tangan asing. Hal ini membuktikan, setiap ada celah pertikaian terbuka, akan selalu dimasuki oleh orang luar. Pertikaian merupakan larangan agama dan ketika manusia melanggarnya maka akan berakibat buruk. Dalam hal ini ICIS bertugas untuk menggerakkan *ukhuwwah Islamiyah* di Pakistan yang merupakan tempat pangkalan AS untuk masuk ke Afghanistan dalam memberantas “terorisme” dan menjadikan Pakistan sarat konflik politik dan agama.<sup>136</sup>

#### e) Vatikan

PBNU telah melakukan dua kali kunjungan ke Tahta Suci Vatikan, di Roma, dalam rangkaian kampanye Islam moderat yang *Rahmatan Lil 'alamin*. Kunjungan pertama PBNU ke Vatikan dipimpin oleh Kardinal Darmaatmaja dari KWI saat negara tersebut dipimpin oleh Paus Yohannes Paulus II, sebelum AS menyerang Irak. Ketika itu, NU meminta dukungan Paus untuk memperkuat penolakan terhadap rencana penyerangan AS ke Irak. Semula, rombongan dari Indonesia menduga, mungkin saja Paus tidak merespon serangan Irak ini. Ternyata, yang

---

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> *Ibid.* hal: 35.

terjadi adalah sebaliknya. Sikap Paus justru lebih keras dari umat Islam di Indonesia. Paus mengatakan, serangan terhadap Irak bukan hanya tragedi kemanusiaan tetapi juga tragedi agama, bahkan tragedi sejarah. Begitu rombongan tiba di sana, Paus segera menugaskan Kardinal yang ada di AS untuk mendukung Deklarasi Anti Perang Lintas Agama yang dimotori oleh Gerakan Moral Nasional (Germalnas) Indonesia dan segera menyampaikannya kepada pemerintah AS. Hal tersebut membuktikan bahwa sesungguhnya agresi-agresi AS tidak mendapat dukungan dari semua agama.<sup>137</sup>

Pada kunjungan yang kedua, NU datang atas undangan Duta Besar Indonesia di Vatikan untuk mempromosikan Islam moderat. NU bertemu HE Archbishop Michael Fitzgerald (President of Pontical Council for Interreligious Dialogue) pada 28-30 September 2005 dalam sebuah seminar bertema “*Islam in Pluralistic Society*”. Seminar ini membahas tentang koeksistensi, proeksistensi, dan toleransi. Koeksistensi adalah menghargai eksistensi masing-masing tanpa harus mengintervensi hal-hal dari agama lain yang memang berbeda dan tidak pula menyerang secara apriori keyakinan agama lain yang memang berbeda. Proeksistensi adalah inisiatif dan kreativitas dari masing-masing agama untuk menciptakan modus-modus bersama atau *modus vivendi*. Setelah itu, baru kemudian dirumuskan toleransi dan moderasi. Moderasi menurut NU-Vatikan adalah moderasi pemikiran dalam agama berupa keseimbangan antara agama dan

---

<sup>137</sup> *Ibid.*

toleransi. Jadi, seorang moderat harus menghargai keyakinan yang lain, tetapi tidak perlu mereduksi agamanya sendiri hanya untuk melakukan toleransi.<sup>138</sup>

Nilai-nilai itu juga yang dibawa NU pada tahun 2006 ke Porto Alegre dalam Assembly IX di Brazil. Momen tersebut berhasil mempertemukan antara NU dengan WCC (*World Council of Churches*) milik Protestan yang berpusat di Genewa. Di Assembly IX tersebut, KH Hasyim Muzadi membahas tentang garis moderasi NU dan Islam di Indonesia serta kesepakatan-kesepakatan yang pernah dilakukan. Ternyata, hak tersebut juga disetujui oleh kelompok Kristen Protestan, sehingga pada tanggal 16 Februari 2006 muncul pernyataan bahwa gereja-gereja Protestan di AS meminta maaf kepada dunia karena tidak mampu mencegah pemerintah dan Presiden AS melakukan agresi. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa konflik di dunia pada hakikatnya tidak timbul akibat faktor agama. Konflik yang terjadi dewasa ini adalah dampak dari hegemoni politik dan ekonomi dengan label agama secara timbal balik dalam hukum sebab-akibat. Oleh karena itu, perjuangan yang harus kita lakukan adalah bagaimana memurnikan agama sebagai agama dan memilah agama dari faktor non-agama yang diagamakan.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> *Ibid.* hal: 36.

<sup>139</sup> *Ibid*

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6. 1 Kesimpulan

International Conference of Islamic Scholars (ICIS) yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2004 merupakan upaya dalam '*amar ma'ruf nahi munkar*' yang diprakarsai oleh Hasyim Muzadi sebagai pimpinan Nahdlatul Ulama (NU). Konferensi tersebut merupakan wujud kegelisahan Hasyim Muzadi untuk merespon kondisi pasca 9/11 yang mengakibatkan ketegangan antara Islam dan barat. Hasyim menyadari, tragedi tersebut merupakan puncak 'gunung es' dari tidak adanya komunikasi di antara dua peradaban itu selama berabad-abad. Ketiadaan komunikasi ini memelihara kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Secara tegas, NU menolak tesis '*Clash of Civilization*' yang digunakan Barat sebagai alasan paranoid terhadap Islam.

Hasyim Muzadi yang saat itu menjabat sebagai Ketua Tanfidziyah PBNU, mempunyai gagasan untuk memperkenalkan karakter Islam moderat di Indonesia sebagai citra baru Islam. Pencitraan ini dirasa penting dilakukan untuk mengimbangi wacana Islam radikal yang begitu menguasai media-media Barat. Islam moderat yang dibawa NU merupakan karakter Islam dalam paham *Ahlussunnah Wal Jamaah* yang telah diterapkan oleh NU sejak berdirinya di tengah beragamnya kultur lokal Indonesia. Paham Aswaja ini menjadikan NU tidak mudah dalam mengkafirkan

kelompok lain dan menghargai pluralisme selama tidak melanggar syariah. Karakter ini pada dasarnya telah tumbuh dan berkembang seiring dengan interaksi NU di level masyarakat pedesaan dalam bentuk hubungan antara pesantren dan desa sekitarnya. Sehingga, menciptakan hubungan kultural yang mengikat dan mengakar. Bahkan, sejak pertama NU dibentuk mampu menyedot anggota yang banyak dan terus berkembang hingga hari ini.

Islam moderat dalam kerangka Aswaja ini tidak akan mampu bergerak tanpa peran sentral para ulama (*scholars*), yang telah banyak berperan dalam mengembangkan nilai-nilai keislaman. Ulama yang juga disebut 'Kiai', tidak hanya sebagai pengajar agama Islam, namun sebagai teladan yang diakui oleh masyarakat dengan penilaian terhadap ilmu dan akhlaknya. Seorang ulama merupakan pewaris para nabi, mengontrol masyarakat dengan membaktikan dirinya bukan untuk mencari keuntungan duniawi semata. Oleh karena itu, NU berkembang secara 'go global', dengan melakukan konsolidasi terhadap ulama (*scholars*) di seluruh dunia, dengan harapan nantinya akan berdakwah di tengah masyarakatnya masing-masing. Dalam ICIS, nilai pluralisme tersebut diwujudkan dengan mengundang seluruh pemerhati Islam, baik Sunni, Syi'ah, atau non-muslim sekalipun. Di sini, NU tidak membatasi diri dalam menyerukan kebaikan, karena pentingnya untuk merangkul berbagai pihak dengan tetap saling menghargai kepercayaan masing-masing.

Sebagai Ketua PBNU, Hasyim Muzadi mempunyai legitimasi dalam mengemban nilai-nilai pemikiran NU, sehingga seluruh kebijakannya dapat mempengaruhi cara pandang warga NU. Begitupun ketika Hasyim Muzadi berinisiatif untuk mengadakan ICIS, dengan menggandeng pemerintah melalui

Deplu, Hasyim Muzadi berhasil bersinergi bersama Deplu untuk memperkenalkan Islam moderat Indonesia kepada dunia. Kampanye terhadap Islam moderat Indonesia pada dasarnya mempunyai beberapa sasaran yaitu; (1) untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat internasional bahwa hakikat Islam sebagai *Rahmatan Lil 'alamin*. Islam bukan hanya milik negara Islam di kawasan Timur Tengah yang senantiasa dirundung berbagai konflik dan tindakan kekerasan. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, menjadi contoh bagaimana Islam mengakui pluralisme dan terbuka terhadap perubahan, (2) bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antara umat Islam di Indonesia, khususnya ulama, terhadap umat Islam internasional karena dari berbagai pengalaman di luar negeri, Hasyim Muzadi dan ulama lainnya merasakan masih banyak ulama negara lain yang tidak mengenal Islam di Indonesia. Mereka menganggap bahwa Islam di Indonesia sebagai sinkretisme, sebuah Islam yang lain, dan (3) menyadari bahwa semua kekerasan yang terjadi di wilayah negara muslim akan dapat menimbulkan ekses-ekses negatif bagi umat muslim negara lain, termasuk Indonesia. Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU dipandang mempunyai kapabilitas dalam menengahi berbagai permasalahan di negara muslim lainnya.

## **6. 2 Saran**

Penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memiliki beberapa saran kepada para pembaca dan kepada orang-orang yang ingin melakukan penelitian terhadap pemikiran NU dalam ICIS, diantaranya:

1. Untuk lebih menjelaskan manfaat yang ditimbulkan ICIS, baik kepada NU ataupun terhadap Indonesia, baik secara sosial politik atau sosial religius karena kehadiran ICIS menjadi pendekatan alternatif pemerintah Indonesia dalam forum internasional, terutama dalam isu “*interfaith dialogue*”.
2. Untuk mengembangkan situasi dan kondisi ICIS, dalam konteks pasca muktamar NU ke-32 yang memilih Said Aqil Siradj sebagai Ketua PBNU yang baru. Hal ini berpengaruh terhadap hubungan NU dan ICIS terkait hubungan keduanya ditentukan oleh Hasyim Muzadi. Posisi ICIS dalam kerangka struktural PBNU tidaklah resmi, dan hanya sebatas kesamaan visi yang ingin dibawa ke tingkat global. Sehingga, muncul spekulasi mengenai transformasi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang setelah posisi Hasyim Muzadi tidak lagi sebagai Ketua PBNU.

## Daftar Referensi

### Buku

- Azra, Azyumardi. *Islam Substantif Agar Umat Tidak Jadi Buih*. Jakarta: Mizan, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Bagun, Rikard. "Dunia Canggung Memasuki Tahun 2002." dalam *Lorong Panjang-Laporan Akhir Tahun 2001 Kompas*. Jakarta: Kompas, 2002.
- Bamualim, Chaider S. et.al. *Islam & The West Dialogoe of Civilizations in Search of a Peaceful Global Order*. Jakarta: PBB-UIN, 2003.
- Bashor, Dumyathi A. (Ed). *Osama bin Laden Melawan Amerika*. Bandung: Mizan, 2001.
- Baso, Ahmad. *NU Studies Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo Liberal*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Burhani, Ahmad Najib. *Islam Dinamis: Mengugat Peran Agama, Membongkar Doktrin yang Membantu*. Jakarta: Kompas. 2001.
- Daman, H.Rozikin. *Membedik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- El Fadl, Khaled Abou. *Islam dan Tantangan Demokrasi*. Trans. Gifta Ayu Rahmani & Ruslani. Jakarta: Ufuk Press, 2004. Trans.of *Islam and The Challenge of Democracy*. 2004.
- \_\_\_\_\_, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*. Trans. Helmi Mustofa. Jakarta: Serambi, 2006. Trans.of *The Great Theft Wrestling Islam from the Extremists*. 2005.
- Fachruddin, Fuad. *Agama dan Pendidikan Demokrasi, Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Trans. Tufel Najib Musyadad. Jakarta. Pustaka Alvabet,

2006. Trans. *Educating for Democracy Ideas and Practicies of Islamic Civil society Association in Indonesia*, 2006.
- Fealy, Greg dan Greg Barton (Ed.). *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama- Negara*. Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Gani, Bustani A. *Al- Quran dan Tafsirnya*. Jilid VII. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Al- Quran dan Tafsirnya*. Jilid IX. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1991.
- Graaf, H.J de dan Th. Pigeaud. *Kerajaan Islam Pertama di Jawa; Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti dan KITLV, 2000.
- Hadibroto, Iwan Syamsir Alam., Eric K. Suryaputra, Eri Widjanarko. *Osama bin Laden Teroris atau Mujahid*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Hardiman, F. Budi. *Memahami Negativitas Diskursus tentang Massa, Teror, dan Trauma*. Jakarta: Kompas, 2005.
- Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gaus AF (Ed.). *Islam, Negara, & Civil society : Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina, 2005.
- Hikam, Muhammad A.S. *Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil society*. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Husaini, Adian. *Jihad Osama Versus Amerika*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Jumantoro, Totok. *Psikologi Dakwah Dengan Aspek-Aspek Kejiwaan yang Qur'ani*. Jakarta: Amzah, 2001.
- Karim, A. Gaffar. *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 1995.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008
- Mahmud, Amir (Ed.) *Islam dan Realitas Sosial di Mata Intelektual Muslim Indonesia*. Jakarta: Edu Indonesia Sinergi, 2005.
- Misrawi, Zuhairi. *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Mu'nim DZ, Abdul. *Islam di Tengah Arus Transisi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2000.

- Muhammadiyah, Hilmy dan Sultan Fathoni. *NU: Identitas Islam Indonesia*. Jakarta: eLSAS, 2004.
- Mujani, Saiful dan Jajat Burhanudin. *Benturan Peradaban: Sikap dan Perilaku Muslim Indonesia terhadap Amerika*. Jakarta: PPIM-UIN, 2005.
- Muzadi, Abdul Mucith. *Mengenal Nahdlatul Ulama*. (4<sup>th</sup> Ed). Surabaya: Khalista, 2006.
- Muzadi, H.A. Hasyim. *Membangun NU Pasca Gus Dur (Dari Sunan Bonang sampai Paman Sam)*. Jakarta: Grasindo, 1999.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Noeh, Munawar Fuad dan Mastuki HS. *Menghidupkan Ruh Pemikiran K.H. Achmad Siddiq*. Jakarta: Gramedia, 2001
- Prasetyo, Hendro, Ali Munhanif, et al. *Islam dan Civil society: Pandangan Muslim Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Qomar, Mujamil. *NU "Liberal", Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*. Bandung: Mizan, 2002.
- Rahmat, M. Imdadun. *Islam Pribumi Mendialogkan Agama Membaca Realitas*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Sekolah Dinas Luar Negeri Angkatan 34. *Diplomasi Indonesia dalam Dinamika Internasional Perspektif dan Analisis Diplomat Muda Indonesia*. Jakarta: Pusdiklat Deplu RI, 2009.
- Sewang, Ahmad M. "Hubungan Agama dan Negara: Studi Pemikiran Politik Buya Hamka". dalam *Islam dan Realitas Sosial di Mata Intelektual Muslim Indonesia*. Amir Mahmud (Ed). Jakarta: Edu Indonesia Sinergi, 2005
- Shihab, Alwi. *Islam Sufistik Islam Pertama dan Pengaruhnya Hingga Kini di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2001
- Suaedy, Ahmad (Ed.). *Pergulatan Pesantren & Demokrasi*. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Sukma, Rizal (Ed.). *Gerakan dan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer*. Jakarta: CSIS, 2007.

- Turmudi, Endang. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Trans. Supriyanto Abdi. Yogyakarta : LKiS Yogyakarta, 2004. Trans.of *Struggling for the Umma Changing Leaderships Roles of Kiai in Jombang, East Java*, 2003.
- Turner, Bryan S. *Sosiologi Islam Suatu Telaah Analitis Atas Tesa Sosiologi Weber*. Jakarta: Rajawali Pers, 1974.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.

### **Karya Tulisan**

- Hasyim Muzadi. "Islam Rahmatan Lil 'alamin Menuju Keadilan dan Perdamaian Dunia (Perspektif NU)." dalam Pidato Pengukuhan Doktor Honoris Causa dalam Peradaban Islam. Disampaikan di IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Sabtu, 2 Desember 2006.
- Hasyim Muzadi. Naskah pidato sebagai Secretary General of International Conference of Islamic Scholars (ICIS). Disampaikan di Praha, Republik Ceko. 27 Mei 2010.
- Hasyim Muzadi. "Religious Education as an Effort to Prevent Radicalism." dalam *5th Regional Interfaith Dialogue; Future Faith Leaders, Regional Challenges and Cooperartion*. Di Perth, 28-30 Oktober 2009.
- Hasyim Muzadi. Pidato sambutan pada pembukaan ICIS III. Di Jakarta, 30 Juli 2008.

### **Media Cetak**

- Azra, Azyumardi. "Capetown, Melayu Indonesia." Dalam *Kompas*. 12 Juni 2010.
- Munir, Rozy (Ed). "ICIS II dalam Liputan Media." Sebuah kumpulan dokumentasi oleh Sekretariat ICIS.
- Wahyudi, M Zaid. "Agama dan Peluang Diplomasi." Dalam *Kompas*. Kamis, 24 Juni 2010.
- Gatra, 22 September 2001.
- Kompas, 13 September 2001.

### Serial

- Muzadi, Hasyim. “Pak Hassan Telah Berhasil Mengemas Islam Moderat dalam Diplomasi Global.” Dalam *Tabloid Diplomasi*. 15 November-14 Desember 2009.
- Muzadi, Hasyim. “Menangkal Terorisme Dengan Memberdayakan Pemikiran Moderat.” Dalam *Tabloid Diplomasi*. 15 Desember-14 Januari 2009.
- Muzadi, Hasyim. “ICIS, Islam Moderat, dan Interfaith Dialogue.” Dalam *Tabloid Diplomasi*. 15 Juni-14 Juli 2010.

### Wawancara

- Abdillah, Masykuri. Berdasarkan wawancara langsung. Pada 20 Mei 2010.
- Muzadi, Hasyim. Berdasarkan wawancara langsung. Pada 13 Mei 2010.
- Wirajuda, Hassan. Berdasarkan wawancara langsung. Pada 04 Juni 2010.

### Website

- Abdillah, Masykuri. “Agama & Konsep Demokrasi.” ([www.okezone.com](http://www.okezone.com)). Diunduh pada 25/05/2010.
- Muzadi, Hasyim. “Khilafah Versus Demokratisasi.” ([www.khilafah1924.org](http://www.khilafah1924.org)). Diunduh pada 20/05/2010.
- “Prof. Dr. Masykuri Abdillah.” ([www.bwi.or.id](http://www.bwi.or.id)). Diunduh pada 25/05/2010.
- “Menteri Luar Negeri Indonesia.” ([www.ensiklopediatokohindonesia.co.id](http://www.ensiklopediatokohindonesia.co.id)). Diunduh pada 07/06/2010.
- “Warisan Besar Menlu Hassan Wirajuda.” ([www.vivanews.com](http://www.vivanews.com)). Diunduh pada 30/05/2010.
- “Hasyim Muzadi: Gus Dur Membuat NU Dihormati.” ([www.antarane.ws.com](http://www.antarane.ws.com)). Diunduh pada 07/05/2010.

## Lampiran I

### Transkrip Interview

Narasumber: Hasyim Muzadi

Hari & Tanggal: Kamis, 13 Mei 2010

Lokasi: Kediaman Hasyim Muzadi, di Kukusan, Depok

Waktu: 20.00-21.30 WIB

Penanya: Hafid Fuad

#### **Hafid Fuad (HF) :**

Saya membahas ICIS dari masa tragedi 9/11 yang memunculkan wacana radikalisme Islam, dan kemudian NU memunculkan wacana tandingan Islam moderat. Bagaimana bapak menanggapi?

#### **Hasyim Muzadi (HM) :**

Jadi, NU sudah sejak awal berfikir tentang konsep moderat. Tidak hanya setelah momentum 9/11 tersebut. Hal tersebut tercermin dengan adanya keseimbangan di antara bidang; fiqh dan dakwah, amar ma'ruf dan nahi munkar, serta tata hubungan antara agama dan negara. Ketiga poin tersebut merupakan fondasi dalam moderasi NU.

Pertama, NU menggunakan teori fiqh untuk memahami Islam, tetapi dalam mengembangkannya digunakan teori dakwah. Dalam ilmu fiqh terdapat nilai-nilai normatif, seperti; halal atau haram, pahala atau dosa, dan sebagainya. Namun, dengan berdakwah kita memproses seseorang menjadi muslim, tidak sekedar menuduh orang lain kafir. Selanjutnya kita mengarahkan manusia untuk mempelajari nilai-nilai Islam, dan diharapkan akan muncul pemahaman yang baik. Proses tersebut akan menyebabkan demarkasi antara muslim dan non-muslim menjadi seimbang.

Kedua, dalam amar ma'ruf, kita menyerukan sesuatu yang baik, dan nahi munkar berarti mencegah sesuatu yang jelek. Lalu, bagaimana cara dalam pencegahan itu, bisa menggunakan teori kekuasaan, teori kekerasan, atau teori penyadaran. NU sebagai *civil society*, mengambil opsi yang ketiga, teori penyadaran.

Ketiga, dalam relasi agama dan negara. Warga NU sebagai umat muslim harus menjalankan dan menegakkan syariat Islam, tapi sebagai warga negara Indonesia mereka harus tahu bagaimana memposisikan diri dan agama. Hal tersebut bisa dengan meletakkan Islam *vis a vis* negara, atau negara menyerap nilai-nilai agama sebagai konstitusi kebangsaan. NU memilih yang ke-dua, merumuskan bentuk hubungan yang substansial- inklusif, bukan formal- eksklusif. Sehingga, nilai agama disublimasikan melalui konstitusi nasional ke dalam negara. Nilai-nilai tersebut akan memudahkan semua agama berkompromi, karena semua agama mempunyai hakikat nilai yang sama, walaupun berbeda secara formulasi dan ritual. Nilai yang disebarkan melalui negara dapat diterima Islam karena adanya nilai toleransi. Masalah substansial dan formalistik dapat dilihat dari RUU Anti Korupsi yang tidak perlu disebut RUU Islam Anti Korupsi, karena Islam anti korupsi, dan begitupun agama lainnya. Nilai moderasi yang dipakai NU, baik itu dalam hal agama dan sosial, merupakan pilar NKRI. Jika NU menjadikan agama berhadapan dengan negara, maka negara ini tidak akan pernah aman oleh gerakan perlawanan.

Moderasi telah dilakukan NU sejak awal berdiri hingga sekarang. Kemudian, di tahun 2002 merebak konflik Barat dan Timur yang diperparah dengan teori Clash of Civilization. Teori tersebut lebih tepat disebut Clash of Interest, karena 'benturan' yang dimaksud hanya menjadi konflik jika disertai kepentingan ekonomi dan politik. Perang terhadap terorisme yang menginvasi Afghanistan dan Irak, menyebarkan terorisme hingga ke Indonesia. Terorisme di Indonesia merupakan paham impor, karena masyarakat Indonesia berwatak moderat. Paham kekerasan dengan terorisme tersebut tumbuh akibat kondisi pasca reformasi, yang menjadikan UU dan negara tidak ketat dalam mengawasi paham-paham yang berpotensi negatif. Para teroris tidak bisa ditangkap sebelum terbukti bersalah, sehingga mereka dengan bebas bergerak menyebarkan paham-paham tentang kekerasan.

**HF:**

Bagaimana proses munculnya ICIS?

**HM:**

Pada tahun 2003, muncul ide dari NU untuk membuat sebuah forum internasional yang berkeinginan mengundang para ulama dari seluruh dunia. Kemudian, di tahun berikutnya NU berinisiatif meminta dukungan Presiden Megawati Soekarnoputri. Setelah mendapat rekomendasi dari presiden, NU mengundang para ulama dari seluruh dunia dengan menggunakan nama ICIS. Dengan demikian, ICIS akhirnya dapat terlaksana pada bulan Februari di tahun 2004 tersebut. Pada ICIS yang pertama, kita memprioritaskan untuk menyamakan visi mengenai Islam Moderat yang *Rahmatan Lil 'alamin*. Visi tersebut kemudian kita proklamirkan dalam bentuk Deklarasi Jakarta. Dalam sidang pleno ICIS yang pertama itu juga saya ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen), sementara sidang tersebut dipimpin oleh almarhum Rozy Munir.

**HF:**

Apakah Rozy Munir mempunyai tulisan mengenai ICIS?

**HM:**

Saya kira tidak ada. Pikirannya mengenai ICIS hanya berupa kutipan pendapat yang tersebar di berbagai media massa. Hal tersebut karena Rozy Munir berposisi sebagai eksekutif yang melaksanakan ide-ide dari saya. Sedangkan Masykuri Abdillah belum banyak terlibat di masa awal ICIS I. Sehingga, hanya terdapat saya dan Rozy Munir dalam pembentukan ICIS, kalau Hassan Wirajuda hanya sebagai penyokong dan membantu.

**HF:**

Siapa pencetus ide mengenai NU *go global*?

**HM:**

Ide tersebut dari saya yang saya bicarakan bersama Deplu, untuk kemudian membuat rumusan mengenai forum internasional dengan nama ICIS.

**HF:**

Menurut bapak, apakah format seperti ICIS belum pernah ada sebelumnya?

**HM:**

Belum, saya yang pertama kali memulai ide seperti ini. Ide yang diusung ialah pemikiran Islam moderat ala NU ditambah nilai kebangsaan. Posisi saya, sebagai Ketua PBNU yang memberikan kerangka pemikiran, diangkat sebagai Sekjen pada Sidang Pleno ICIS.

**HF:**

Apakah ICIS merupakan bagian dari NU?

**HM:**

ICIS menjadi bagian NU secara visioner, yaitu visi mengenai Islam yang moderat. ICIS belum masuk di struktur NU, dan hal ini bermanfaat agar hubungan keduanya tetap longgar. ICIS berada di bawah pleno ICIS, berbeda dengan lajnah yang terdapat di NU.

**HF:**

Apakah ICIS berencana untuk berubah menjadi semacam organisasi, sehingga tidak sekedar menunggu momentum setiap dua tahun?

**HM:**

Saat ini terdapat ide untuk meningkatkan formatnya dari sekedar konferensi menjadi studi. Sehingga di ICIS akan diadakan survei dan penelitian untuk kasus-kasus di seluruh dunia. Hal penting lainnya yang akan dilakukan ialah penguatan ide NU yang berakar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan demikian, ICIS akan mempunyai kegiatan dua tahun sekali yang menjadi ajang silaturahmi, ditambah menjadi kegiatan studi penelitian, dan memperkuat paham Ahlussunnah wal Jamaah untuk Islam yang moderat.

**HF:**

Apakah ada tokoh lain yang dapat saya jadikan sumber informasi?

**HM:**

Saya rasa tidak. Karena yang paling banyak mengetahui mengenai ICIS hanya Rozy Munir. Sedangkan tokoh-tokoh lainnya hanya bergabung ketika ICIS telah terbentuk.

**HF:**

Apakah dalam pembentukan ICIS terdapat dokumentasi mengenai pembicaraan yang terjadi?

**HM:**

Tidak ada catatan mengenai pembicaraan dalam ide pembentukan ICIS. Karena itu hanya berupa diskusi informal yang tidak didokumentasikan.



## **Lampiran II**

### **Transkrip Interview**

Narasumber: Masykuri Abdillah

Hari & Tanggal: Kamis, 20 Mei 2010

Lokasi: Kantor Dewan Pertimbangan Presiden. Jl. Veteran III, Jakarta Pusat

Waktu: Pukul 10.00 – 11.00 WIB

Penanya: Hafid Fuad

**Hafid Fuad (HF):**

Bagaimana bapak memaknai NU?

**Masykuri Abdillah (MA):**

NU pada dasarnya memperkuat praktik kehidupan beragama di Indonesia, terutama dikarenakan upaya-upaya pembaharuan menganggap praktik yang sudah berjalan di Indonesia itu sebagai sebuah penyimpangan. Ternyata para ulama waktu itu sepakat, hal itu harus dipertahankan karena tidak menyimpang. Praktik keislaman Indonesia tidak menyimpang karena berdasarkan empat madzhab yang diakui kebenarannya. Karakter yang menonjol dari NU ialah daya peyesuaian dengan kondisi lokal selama itu tidak bertentangan dengan syariah. Kemudian, sifat tersebut masih dibawa hingga kini dalam mengakomodasi semua kultur dan semua peradaban termasuk peradaban modern yang secara filosofis berbeda dengan peradaban Islam. Karena itu, walaupun pada satu sisi NU mempunyai sisi tradisionalisme namun dengan sifat moderasinya bisa mengakomodasi ide-ide modern seperti perdamaian, manajemen konflik, demokrasi, HAM, atau pluralisme. Walaupun sebagian besar orang-orang NU masih mempertahankan tradisionalisme dalam gaya hidup tapi dari segi ide tidak mempunyai masalah secara keislaman. Hal ini yang membuat NU dicitrakan moderat karena bisa mengakomodasi ide-ide berbeda yang sifatnya modern.

Dewasa ini hubungan Islam dan Barat mempunyai pergeseran-pergeseran yang berpuncak dengan terjadinya kasus 9/11. Sejak itu, Barat menganggap umat Islam

sebagai umat yang kurang mendukung perdamaian walaupun tidak semua orang Barat berpikiran seperti itu. Stereotipe itu yang tersebar dalam media-media cukup mempengaruhi perkembangan Islam. Hal ini selanjutnya direspon oleh NU melalui Hasyim Muzadi dan bekerjasama dengan Hassan Wirajuda. Mereka mempunyai keinginan agar praktik Islam di Indonesia dapat dipahami oleh kalangan Islam dan non-Islam. Dengan membawa konsep *Rahmatan Lil 'alamin* dengan praktik keislaman yang ada di Indonesia akan menjadi contoh baik bagi pihak yang masih asing terhadap Islam.

**HF:**

Bagaimana proses kerjasama dengan Deplu bisa terjalin?

**MA:**

Itu hasil proses diskusi. Karena ketika ada pencitraan negatif seperti itu maka semua pihak akan terkena getahnya, baik untuk kawasan Arab atau kawasan pinggiran yang mempunyai penduduk mayoritas beragama Islam. Dalam beberapa pertemuan antara Hasyim Muzadi dan Hassan Wirajuda muncul ide untuk mengadakan *second track diplomacy* yang dilakukan oleh *civil society* untuk mendukung posisi negara.

**HF:**

Tapi kenapa harus bermitra dengan NU? Kenapa bukan bersama Muhammadiyah misalnya?

**MA:**

Karena NU organisasi keagamaan terbesar dan adanya moderasi pada NU. Sedangkan, Muhammadiyah dengan modernisme dipengaruhi oleh Muhammad 'Abduh, namun disana juga terdapat pemikiran Wahabi yang melakukan pemurnian Islam. Walaupun kini mereka sudah mengambil jarak, namun dari sisi historisnya mereka mempunyai potensi untuk menjadi 'kurang' Moderat. Karena masih ada pihak-pihak disana yang memiliki pemahaman tentang pemurnian Islam yang menganggap akulturasi terhadap kebudayaan lain sebagai bid'ah dan khurafat. Hal ini yang membuat NU lebih kondusif dalam mewujudkan moderasi

dibanding ormas lainnya, karena ide Ahlussunnah Wal Jamaah yang dimiliki NU tidak terpengaruh oleh purifikasi Islam yang cenderung menolak perbedaan.

**HF:**

Secara lebih tegas, apa yang diperjuangkan oleh NU?

**MA:**

Jadi terdapat beberapa faktor, yang pertama ialah untuk Islam itu sendiri secara menyeluruh dengan *image building* Islam Rahmatan Lil 'alamin. Jangan hanya melihat umat muslim sebagai pejuang-pejuang di Palestina atau sebagai mujahidin. Dunia juga harus melihat umat muslim di Indonesia sehingga mengetahui bahwa Islam itu berwarna warni tidak semua mengenai Islam harus tentang kekerasan ataupun anti demokrasi.

Kedua, dari sisi Indonesia, komunikasi di antara umat muslim Indonesia dan pihak luar masih sangat kurang. Terutama di kalangan masyarakat Timur Tengah yang memiliki sedikit wawasan mengenai Islam di Indonesia. Masih banyak ulama di Timur Tengah yang menganggap Islam di Indonesia sebagai Islam yang lain, dan saya sudah membuktikan itu dalam beberapa kali pertemuan di luar negeri. Mereka menganggap Islam di Indonesia sebagai sinkretisme, sehingga saya harus menjelaskan bahwa ibadah yang kami lakukan berdasarkan madzhab yang juga berlaku di negara mereka. Saya merasa bahwa forum yang mewadahi, khususnya ulama, masih sangat kurang dan tidak dapat dilakukan dalam sebuah kunjungan singkat. Oleh karena itu, ICIS didirikan sebagai forum komunikasi agar ulama-ulama di Indonesia bisa berhubungan dengan pihak luar negeri, dan ulama di luar negeri juga dapat memahami karakter Islam yang sebenarnya secara langsung. Dan akhirnya mereka mengerti bahwa tidak ada bedanya Islam yang dilaksanakan di Indonesia karena menggunakan kitab yang sama.

Ketiga, banyak masukan dari para pengamat yang melihat permasalahan di dunia yang merugikan umat Islam. Sedangkan, Indonesia terdiri dari mayoritas umat Islam. Maka muncul semacam tuntutan dari intelektual agar tokoh islam dan

pemerintah agar dapat berperan lebih besar untuk menyelesaikan masalah-masalah di negara yang mempunyai umat muslim disana.

Ketiga hal itu yang mendasari kita untuk bergerak lewat ICIS, kita bergerak bahkan terlibat dengan didukung faktor moderasi membawa semangat kerukunan umat beragama di Indonesia. Hal itu diakui oleh semua pihak baik Barat atau juga masyarakat Islam di Timur Tengah. Moderasi Indonesia adalah sesuatu hal yang sangat maju dengan semua agama mempunyai hari besarnya masing masing. Dua hari lalu, saya bertemu pihak Deplu Jerman yang kagum dengan adanya hari besar masing-masing agama yang menjadi hari besar nasional yang tidak mungkin terjadi di Jerman. Walaupun terdapat konflik, namun hal itu masih dianggap tidak terlalu signifikan dibanding kerukunan yang tercipta di Indonesia. Hal ini yang membuat Indonesia diminta untuk berperan aktif dalam penyelesaian konflik yang terjadi di negara berpenduduk Islam lainnya.

**HF:**

Bagaimana NU memandang globalisasi?

**MA:**

Globalisasi merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kita menolak globalisasi karena sifatnya memang sudah ada sejak dahulu. Suatu peristiwa yang terjadi di suatu negeri lalu menyebar ke negara lainnya maka itu sudah disebut globalisasi. Agama turut menjadi bagian dari globalisasi seperti Kristen ataupun Yahudi yang berasal dari Timur Tengah kemudian menyebar. Hanya saja dulu tidak dikenal sebagai globalisasi dikarenakan dahulu membutuhkan waktu yang lama hingga berbulan-bulan. Namun globalisasi kini didukung oleh akses informasi yang semakin cepat hanya dalam hitungan detik. Hal ini menyebabkan globalisasi sebagai sesuatu yang tak terhindarkan. Itu juga menyangkut permasalahan ide, nilai, peradaban, tradisi, ekonomi, apalagi politik. Barat sebagai penguasa sektor media informasi, ataupun bidang-bidang lainnya sangat dimungkinkan dalam menyebarkan nilai-nilai peradabannya. NU sebagai bagian masyarakat dunia mempunyai kebijakan untuk mengambil nilai-nilai baik peradaban asing tersebut, dan menolak nilai yang tidak

sesuai. Walaupun kadang penolakan tersebut tidak berhasil. Seperti adegan ciuman di film yang kalau 30 tahun yang tidak mungkin dilakukan sekarang sudah sering ditemui, wajar jika NU mengeluarkan fatwa NU dalam hal infotainment untuk melindungi masyarakat dari dampak globalisasi. Kita harus menyadari yang namanya kebebasan itu ada batasannya, seperti dalam UU Pornografi yang mengurangi akses globalisasi, namun bagi pihak yang pro kebebasan mengatakan itu tidak melanggar HAM. Isu terbaru ialah UU Penodaan Agama, hal ini untuk menjaga dari kebebasan beragama yang mutlak secara konstitusional, dengan merujuk kepada pasal 28 mengenai hal mengekspresikan kebebasan yang dibatasi oleh nilai moral, ataupun agama. Hal itu merupakan upaya Indonesia dengan demokrasi substantifnya untuk tetap mempertahankan nilai budaya lokal dari penjajahan budaya asing.

Namun, yang masih terlambat ialah globalisasi dalam konteks ekonomi, hal ini yang masih kurang dikuasai oleh warga NU.

**HF:**

Perwakilan atau cabang yang dimiliki NU di luar negeri bertujuan ke arah mana?

**MA:**

Lebih bertujuan untuk pengkaderan, karena untuk mengkader sebaiknya dari usia muda, terutama mahasiswa. Karena mahasiswa-mahasiswa dari warga NU membutuhkan wadah bagi yang tetap ingin berafiliasi ke NU. Serta sebagai upaya untuk saling memahami di antara NU dan masyarakat di negara setempat.

**HF:**

Bagaimana NU memandang negara dan memposisikan diri?

**MA:**

Negara dapat dilihat dari beberapa aspek, aspek filosofi negara apakah negara Islam ataupun negara sekuler. NU dengan pendekatan dalil-dalil keagamaannya menganggap penting keberadaan negara dan NU tidak bisa lepas dari politik kenegaraan.

Kemudian setelah mengakui keberadaan negara, selanjutnya bentuk negara yang seperti apa yang diinginkan NU. Terutama dari filosofi dan ideologinya hal ini

telah dibicarakan sejak masa pendirian negara ini. Dalam panitia BPUPKI telah ada tokoh NU seperti Hasyim Asy'ari yang juga duduk sebagai dewan konstituante. Tapi, yang jelas waktu itu NU mendukung bentuk negara Islam, karena pada waktu itu hanya ada dua opsi yaitu sekuler atau Islam. Kemudian terjadilah kompromi-kompromi seperti dalam hal piagam Jakarta. Jadi bisa dilihat NU telah berperan sejak proses pendirian negara republik ini. Setelah ada perdebatan-perdebatan mengenai bentuk negara Islam yang diinginkan NU dan gagal, maka NU sudah memutuskan itulah bentuk final dari negara ini. menjadikan Pancasila sebagai dasar negara.

Kemudian, NU menempatkan diri sebagai *civil society* sejak kembalinya NU ke khittah 1926 untuk memisahkan diri dari *political society*. Untuk itu harus ada kesadaran dari masyarakat NU agar memisahkan bentuk ideal dengan kenyataan yang menginginkan dukungan politik NU sebagai organisasi Islam terbesar di dunia.

**HF:**

Mengenai ICIS, siapa aktor intelektualnya?

**MA:**

Dulu itu dimotori oleh Hasyim Muzadi yang didukung oleh Rozy Munir, dan setelah tiga tahun Rozy Munir diangkat sebagai dubes di Qatar, maka saya yang mengantikan beliau. ICIS sebagai forum dan organisasi dengan kegiatan utamanya yaitu konferensi ICIS tersebut, dan disamping itu juga mempunyai kegiatan yang kecil-kecil, seperti workshop dan diskusi-diskusi terbatas walaupun tidak selalu menggunakan nama ICIS. Misalnya dulu pernah kita bekerjasama dengan organisasi Islam di AS untuk seminar dengan tema perekonomian umat Islam, atau juga ada seminar tentang terorisme, juga ada kegiatan inter culture dialogue, dan beberapa undangan untuk seminar di luar negeri yang tetap jalan.

**HF:**

Apakah posisi ICIS tidak bisa digantikan oleh badan lainnya di NU?

**MA:**

Tidak, karena itu memang sebagai sayap luar negeri NU walaupun kita belum tahu di kepengurusan PBNU yang baru ini. Saya dan pak Hasyim masih menunggu kebijakan kepengurusan PBNU, yang masih menginginkan kepengurusan yang sama dalam ICIS. Sama mungkin seperti Muhammadiyah yang mempunyai CCDC yang melakukan dialog antar peradaban, tapi ICIS juga melakukan dialog antar ulama.

**HF:**

Menurut bapak makna Islam moderat seperti apa?

**MA:**

Moderat dalam bahasa lain disebut jalan tengah, tidak ekstrim ke kanan atau juga ekstrim kiri, nah jika di tengah itu moderat. Sedangkan dalam konteks Islam, maka di satu sisi masih komitmen pada Islam, dan di sisi lain mempunyai komitmen juga pada modernitas yang menghargai kelompok dan ide-ide yang lain. Hal ini jangan disamakan dengan kelompok liberal, saya sering meninggalkan komitmen pada Islam walaupun mereka sering mengaku sebagai pihak yang moderat. Sedangkan bagi ekstrim di sisi lainnya mengatakan segala sesuatu yang berbeda sebagai bid'ah. Moderat disini masih mempunyai batasan seperti dalam komitmen rukun Islam dan rukun iman. Dalam konteks agama, kita masih menggunakan pendekatan dalam isi UU yang bisa menggunakan pendekatan keislaman. Tidak mutlak semuanya menggunakan syariah Islam, karena kondisi masyarakat kita yang mejemuk.

## **Lampiran III**

### **Transkripsi Interview**

Narasumber: Hassan Wirajuda

Hari & Tanggal: Jumat, 4 Juni 2010

Lokasi: Di Kawasan Semanggi

Waktu: 14.00-16.00 WIB

Penanya: Hafid Fuad

#### **Hafid Fuad (HF):**

Bagaimana sejarah terbentuknya ICIS?

#### **Hassan Wirajuda (HW):**

Mengenai sejarah ICIS, maka kita harus membicarakan peristiwa 9/11 di Amerika Serikat (AS) yang memunculkan beberapa kondisi. Pertama, Islam yang mudah diasosiasikan dengan kekerasan, ekstrimisme dan terorisme. Kedua, AS sebagai negara adikuasa yang murka sehingga melampiaskannya ke negara dan kelompok masyarakat tertentu. Peristiwa 9/11 jangan dilihat berdiri sendiri, namun dilihat dalam rangkaian kejadian. Peristiwa penangkapan Syaikh Rahman di New York, bukti kecenderungan AS untuk mencurigai Islam sebagai terorisme. Kemudian, pada ledakan di kantor polisi federal Oklahoma, bahkan telah muncul tuduhan terhadap muslim sebagai pelaku penyerangan sebelum penyelidikan usai. Jika sebelumnya telah muncul tesis Clash of Civilization, maka hal itu semakin dipercaya AS setelah adanya serangan 9/11. Kemudian, AS melanjutkan kemurkaan dengan menyerang Afghanistan dengan tuduhan sebagai negara yang mensponsori gerakan al-Qaeda. Tidak lama, dilanjutkan menyerang Irak dengan dalih adanya senjata pemusnah massal dan Saddam Husein merupakan bagian dari al-Qaeda.

Ketika terjadi serangan 9/11, saya langsung dipanggil oleh presiden, gambaran yang pertama kali ialah kesan memunculkan Islam sebagai ekstrimisme dan terorisme. Hal ini akibat telah muncul kecenderungan untuk menyalahkan Islam dalam beberapa

kejadian sebelumnya di AS. Kemudian, opini yang akan saya bangun ialah Indonesia bukan negara Islam dan bukan juga negara sekuler, namun negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia yang terbuka terhadap nilai moderat. Kita juga yakin bahwa agama Islam yang kita yakini ialah agama yang damai, toleran, dan anti kekerasan, bahkan *Rahmatan Lil 'alamin*. Sehingga, gambaran kekerasan yang diberikan oleh barat terhadap Islam tidak bisa diterima, dan kita mempunyai tanggung jawab sebagai negara muslim terbesar di dunia untuk meluruskan mispersepsi tersebut.

Pernyataan pertama yang dikeluarkan pemerintah ialah mengutuk tindakan terorisme. Kemudian, mengatakan bahwa Islam ialah agama yang membawa kedamaian dan mengajak seluruh negara untuk bekerjasama menghadapi terorisme dalam kerangka multilateral, bukan dalam unilateral sepihak. Pernyataan tersebut berdasarkan bahwa terorisme merupakan ancaman terhadap kemanan internasional. Tidak hanya AS yang menjadi korban, bahkan Indonesia juga telah mendapatkan serangan terorisme sebelum serangan 9/11. Sehingga ancaman terhadap kemanan internasional merupakan suatu yang riil. Ini merupakan suatu rangkaian ancaman yang saling berkaitan, dan bukan isu yang diimpor dari AS kepada pemerintah Indonesia.

Sebagai Menteri Luar Negeri, saya selalu menggunakan konsep diplomasi '*Indonesia Incorporated*'. Konsep ini menyadari diplomasi tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah, namun oleh semua elemen masyarakat. Hal ini menyebabkan saya mulai menyadari NU sebagai sebuah aset nasional. Terlebih lagi, pada tahun 2002 saya diundang untuk menghadiri istighotsah NU di Surabaya. Dalam konsep Indonesia Incorporated yang saya terapkan, dibutuhkan seorang menlu yang menjangkau hingga ke luar deplu. Sehingga, pemerintah perlu bermitra dengan kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan jalur masing-masing yang bervariasi dan bersinergi.

Kita ingin membuktikan bahwa tidak ada yang namanya Clash of Civilization, yang ada hanyalah kesalahpahaman terhadap Islam. Kita harus mengantisipasinya dengan berdialog kepada non-muslim ataupun umat muslim sendiri, dan Deplu menggandeng ulama untuk melakukannya. Pada dunia Islam, harus harus dirubah mengenai konsep jihad dengan menghalalkan segala cara, dan ini tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, untuk membuktikan kekeliruan clash of civilization, kita

harus melakukan dialog dengan peradaban lainnya, terutama Barat. Dialog bukanlah sistem nilai bangsa kita, namun itu merupakan hasil dari kebhinekaan yang ada, dalam bentuk tenggang rasa dan toleransi. Di sini kita meletakkan budaya dialog dalam posisi yang tinggi dan kita tampilkan ke luar.

Sejak mengikuti istighotsah NU, saya melihat sebuah potensi besar, dan saya mempunyai ide tentang “*NU go global*”. Selama ini telah muncul pemikiran-pemikiran lokal yang bernilai tinggi di luar, seperti Islam Moderat atau *Rahmatan Lil 'alamin*. Tidak hanya kepada negara-negara non-muslim, tapi juga kepada negara Islam. Hal ini terbukti setelah saya menyampaikan mengenai Islam moderat di Komisi I DPR, Dubes Arab Saudi menemui saya untuk menolak Islam Moderat. Dubes Arab Saudi mempertanyakan jika ada Islam Moderat, berarti tentu ada Islam yang tidak moderat. Saya jelaskan bahwa benar ada Islam yang tidak moderat, yaitu Islam yang mengklaim dirinya yang paling benar, sehingga diluar itu berarti kafir. Dengan kebenaran yang mereka yakini sendiri mereka merasa berhak menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini Arab Saudi merasa dirugikan, karena paham yang konservatif di negara mereka harus diakui sebagai sandaran kelompok Islam ekstrimisme. Kemudian, saya melihat perlu dilakukan dialog oleh para ulama atau *scholars*, namun bukan hanya *Islamic Scholars* muslim, namun juga non-muslim. Dalam dialog ini, mereka lebih mudah untuk dirangkul dalam menjelaskan mengenai Islam, dan meluruskan persepsi tentang Islam yang diasosiasikan dengan kekerasan. Bahkan dengan ulama Syi'ah yang ternyata lebih mudah untuk diajak bekerjasama, selain masalah teologi tentu saja.

**HF:**

Jadi kolaborasi bersama NU dimulai dari Istighotsah di Surabaya itu?

**HW:**

Iya, sesuai dengan masalah besar yang kita hadapi dan fakta bahwa Indonesia sebagai negara muslim terbesar yang menghadapi ancaman politik internasional.

**HF:**

Bagaimana rangkaian berdirinya ICIS? Siapa tokoh di belakangnya?

**HW:**

Kalau tokohnya ya tidak diragukan, KH. Hasyim Muzadi, tidak hanya sebagai ketua PBNU, tapi juga sebagai seorang cendekiawan. Posisi itu bersintesa dengan pemikiran lainnya, termasuk pemikiran saya mengenai konteks diplomasi global dan konsep diplomasi Indonesia *Incorporated* yang menggandeng para *stakeholder* di masyarakat

**HF:**

Apakah ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan sebelum ICIS?

**HW:**

Banyak. Sebelumnya, saya sudah mempunyai forum untuk deplu mengkomunikasikan arah kebijakan dan merasionalisasikan politik luar negeri Indonesia. Sehingga para *stakeholders* kita mengerti program dari deplu, apa yang sudah ataupun belum dilakukan deplu. Hal ini bertujuan agar para komponen masyarakat seperti ormas lintas agama, think tank, ataupun media, mengerti dan diharapkan mendukung kebijakan yang dilakukan pemerintah. Hal ini juga untuk menciptakan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Kemudian, pada saat menjelang serangan AS ke Irak kita bertemu untuk membahas bagaimana perang ini akan dipersepsikan oleh masyarakat. Bagaimana peran kita dalam mencegah peperangan terjadi. Setelahnya, kita sepakati untuk mencegah peperangan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Deplu juga memfasilitasi para tokoh lintas agama untuk berkunjung ke luar negeri dan kemudian meyakinkan publik bahwa umat agama lain di luar negeri juga menolak perang. Faktanya, bahwa perang tidak terhindarkan membuat kita harus menyamakan persepsi mengenainya. Perang tersebut bukan peperangan antara Islam dan Kristen. Sejak itu interaksi antara deplu dan tokoh agama semakin kokoh, dan kemudian berlanjut hingga lahirnya ICIS. Deplu membantu dalam hal fasilitas persiapan pembuatan protokoler konferensi internasional.

**HF:**

Tapi apa membuat Deplu harus menggandeng NU?

**HW:**

Saya belajar dari negara-negara muslim, seperti Mesir dan Arab Saudi, bahwa para ulama memegang peranan penting dalam masyarakat. Kultur pesantren membuat NU lebih mudah membuat networking dibandingkan dengan ormas Islam lainnya. NU mempunyai 14 cabang internasional yang menjadikan komunitas dan nilai-nilai NU tersebar dengan baik. Bagaimanapun, kita juga memberikan porsi tersendiri untuk Muhammadiyah, seperti dalam *Interfaith Dialogue* yang kita percayakan kepada Muhammadiyah untuk mensponsori program tersebut.

**HF:**

Bagaimana Deplu membahas isu agama?

**HW:**

Hubungan antara negara tidak boleh menjadi monopoli negara, 'total diplomasi' mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan memproyeksikan kepentingan nasional negara. Berangkat dari pidato Bung Hatta pada 10 desember '45, yang berpesan bahwa harus ada persatuan di antara komponen masyarakat untuk memproyeksikan kepentingan nasional ke luar. Saat ini negara bukan satu-satunya aktor dalam mengambil keputusan, bahkan dalam negara masih terdapat DPR, dan *think tank*, serta organisasi *civil society*. Sehingga deplu dalam hal ini bekerja aktif ke luar dan dalam negeri, untuk menciptakan kesamaan ide. Dari sini muncul ICIS, *Interfaith Dialogue*, dialog antar agama Indonesia-Eropa, ataupun di Asia Pasifik. Sehingga ada hal-hal yang lebih bisa dilakukan oleh *civil society*, dan juga yang bisa dilakukan oleh negara, atau gabungan keduanya.

**HF:**

Bagaimana anda menjelaskan konsep Islam moderat?

**HW:**

Islam moderat merupakan antitesis dari pemikiran yang menghalalkan segala cara yang tidak peduli bahwa yang menjadi korban bukan saja orang-orang AS atau

Australia, namun juga banyak orang-orang muslim turut menjadi korban. Dan ini bisa diukur oleh rasionalitas kita.

**HF:**

Bagaimana dengan komentar yang menilai ICIS hanya sebuah wacana?

**HW:**

Ini sudah dilaksanakan, bukan dalam kerangka membicarakan lagi. Coba lihat dalam ICIS I yang sudah menghasilkan kebulatan persepsi bahwa terorisme sebagai masalah dan bagaimana cara meluruskan masalah teologi yang keliru. Ini sebuah guliran yang panjang, karena untuk memperbaiki pencitraan dunia Barat tentang Islam bukanlah pekerjaan yang sebentar, namun terus menerus. Bukti konkritnya ialah bulan Maret 2009, ketika saya dan tokoh lintas agama lainnya diundang oleh Pemerintah Italia ke Roma yang notabene Katolik. Pada salah satu sub tema seminar tersebut menjadikan Indonesia sebagai contoh kehidupan antar agama, dan Menteri Luar Negeri Italia memuji keberhasilan Indonesia membangun perikehidupan beragama, itu patut menjadi bukti kesuksesan. Kemudian, Inggris selepas terkena serangan terorisme juga akhirnya mengakui perlu ada dialog terhadap kaum muslim, yang selama ini terpinggirkan. Mereka berinisiatif belajar mengenai Islam yang moderat kepada Indonesia. Pihak yang bisa berdialog mengenai itu ialah diantara sesama ulama. Jadi, ICIS jangan dinilai dari produk ICIS itu sendiri, tapi lihat dari semangat *interfaith and culture* yang bersama-sama dengan diplomasi menciptakan suasana damai di dunia internasional. Pemahaman tersebut menular dan menjadi tren dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri. Indonesia pasti yang menjadi pimpinan forum jika diadakan dialog lintas agama, dan itu karena sudah diakui. Kita sudah mencapai tataran praksis, sehingga jika PBB mulai ikut membahas mengenai dialog lintas peradaban, itu sudah terlambat. Jadi, budaya dialog yang kita miliki merupakan aset yang tidak dimiliki oleh negara yang tidak memiliki karakter pluralis.